

MODAL SOSIAL TRANSFORMASI KEARAH PENGELOLAAN

*Konflik & Pembentukan
Open Society*



Dr Kurniati Abidin, S.Sos., M.Si

MODAL SOSIAL
TRANSFORMASI
KEARAH PENGELOLAAN

*Konflik & Pembentukan
Open Society*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

MODAL SOSIAL
TRANSFORMASI
KEARAH PENGELOLAAN
Konflik & Pembentukan
Open Society

Oleh :
Dr. Kurniati Abidin, S.Sos., M.Si

Editor :
Samino Setiawan, S.Ag., MSI



Modal Sosial Transformasi Kearah Pengelolaan

(Konflik & Pembetulan Open Society)

viii+220 hal. ;15 x 23 cm

Hak Cipta © 2023 pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahk an sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektrinis maupunmekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penyusun dan Penerbit.

Disusun Oleh:

Dr. Kurniati Abidin, S.Sos., M.Si

Editor:

Samino Setiawan, S.Ag., MSI

Cetakan ke 1, Februari 2023

ISBN : 978-602-5599-73-6

Penerbit:

Trustmedia Publishing

Jl. Cendrawasih No. 3 Maguwo Banguntapan

Bantul, D.I. Yogyakarta 55198

Telp. +62 274 4539208, +62 81328230858.

E-mail: penerbittrustmedia@gmail.com

website : <http://www.penerbittrustmedia.com>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah tiada kata yang patut diucapkan melainkan kata syukur yang begitu besar kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga buku yang berjudul Modal Sosial (Transformasi Kearah Pengelolaan Konflik dan Pembentukan Open Society) dapat diselesaikan.

Shalawat dan salam sejahtera kepada baginda Rasulullah beserta seluruh keluarganya, sahabatnya yang telah menyampaikan petunjuk bagi umat manusia dengan ajarannya untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat.

Penulis menyadari bahwa seluruh rangkaian dalam proses pembuatan buku ini, tidak lepas dari bantuan dan motivasi secara moril dan material dari suami tercinta dan kelima anak penulis oleh karenanya sepatutnyalah penulis mengucapkan terima kasih kepadanya. Selain itu ucapan terima kasih pula kepada teman-teman yang membantu dalam memberikan referensi dan diskusinya selama ini sehingga buku ini dapat selesai.

Semoga dengan kehadiran buku ini dapat memberikan manfaat kepada segenap yang membacanya, Aamiin.

Watampone, Februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ~ v

DAFTAR ISI ~ vii

BAB I ~ 1

Fenomena Konflik Sosial di Indonesia ~ 1

BAB II ~ 11

Fenomena Konflik Sebagai Realitas Sosial
Tak Terhindarkan ~ 11

BAB III ~ 111

Tinjauan Teoritis Modal Sosial ~ 111

BAB IV ~ 141

Modal Sosial Sebagai Antisipator Konflik Sosial ~ 141

BAB V ~ 173

Transformasi Modal Sosial Mewujudkan Masyarakat Terbuka
(Open Society) ~ 173

BAB VI ~ 203

Kesimpulan ~ 203

DAFTAR PUSTAKA ~ 205

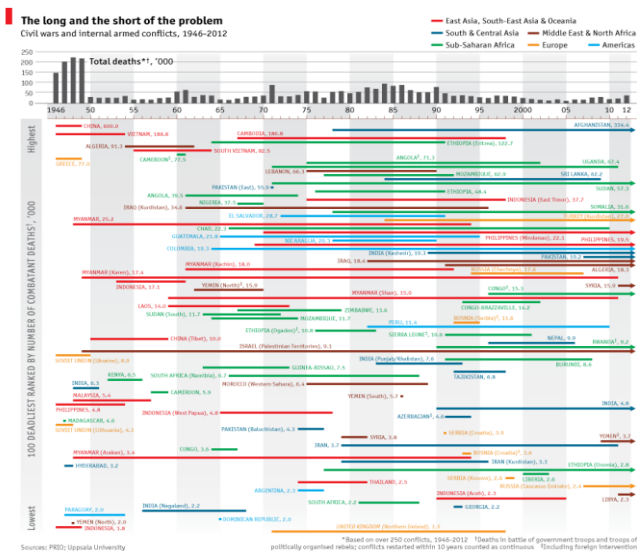
TENTANG PENULIS ~ 219

BAB I

FENOMENA KONFLIK SOSIAL DI INDONESIA

Dinamika kehidupan sosial telah banyak memberikan kepada manusia pelajaran berharga. Beragam konflik yang tergambar dalam perjalanan historis peradaban manusia menunjukkan bahwa umat manusia sangat rentang. Kerentanan yang disebabkan oleh beragam kepentingan primordial yang mendasari manusia memangsa sesamanya. Wattimena menggambarkan perang saudara dan konflik internal yang terjadi dari tahun 1946-2012 yang menyebabkan korban jiwa yang sangat besar. Perang saudara dan konflik internal tersebut tergambar dalam alur sejarah, sebagai berikut :¹

Perang Saudara dan Konflik Internal 1946 sampai 2012
(Economist 2018)



¹Wattimena, Reza A.A. 2018. Bisakah perang dihindari? sejarah, anatomi dan kemungkinan perang di abad 21. The Ary Suta Center. Vol 43 : hal 50.

Jutaan nyawa melayang. Kerusakan akibat perang tak terhitung. Umat manusia selalu berada dalam ancaman konflik yang sewaktu-waktu bisa merugikan umat manusia sendiri. Di tanah air, sejarah mencatat beragamnya konflik sosial dengan beragam penyebab seperti agama, etnisitas, politik dan sebagainya. Misalnya Konflik yang berskala besar yang terjadi pasca reformasi yang menimbulkan ribuan korban jiwa, antara lain :

1. Konflik Agama di Maluku

Sebaran konflik agama ini terjadi di Maluku dan Maluku Utara sepanjang tahun 1999-2002. Jumlah korban jiwa mencapai angka 8.000-9.000 orang dan 70.000 orang lainnya mengungsi. Kerugian materi dalam kasus ini adalah 29.000 rumah terbakar, 7.046 rusak termasuk 46 masjid, 47 gereja, 719 toko, dan 38 gedung pemerintah.

2. Konflik etnis di Sampit

Konflik etnis ini terjadi pada tahun 2001. Tercatat 469 orang meninggal dan 108.000 orang mengungsi. Kerugian materi sebanyak 192 rumah dibakar dan 784 lainnya rusak, 16 mobil dan 43 sepeda motor juga hancur.

3. Konflik politik Kerusuhan Mei 1998

Pada peristiwa ini, sebanyak 1.217 orang meninggal, 85 orang diperkosa dan 70.000 orang mengungsi. Kejadian ini berlangsung selama 3 hari dari 13-15 Mei 1998 dengan kerugian materil diperkirakan mencapai Rp 2,5 triliun.

Konflik ini menunjukkan bahwa masyarakat semajemuk seperti ini membutuhkan alat perekat yang berguna bukan hanya untuk menghindari konflik tapi juga

menyelesaikannya. Panggabean mengklasifikasikan watak konflik sosial di Indonesia, yang penulis rangkum sebagai berikut :²

Tabel 1.1
Jenis Konflik dan Studi Kasus Konflik

No	Jenis Konflik	Studi Kasus Konflik
1	Konflik Agama	<p>1) Konflik Maluku dan Maluku Utara Konflik ini terjadi antara 1999-2002 di Maluku dan Maluku Utara yang melibatkan dua agama yakni Kristen dan Islam.</p> <p>2) Konflik Poso Konflik ini terjadi antara 1999-2002 di Sulawesi Tengah yang Kembali melibatkan dua agama yakni Kristen dan Islam. Melalui Perjanjian Malino pada tahun 2001, konflik ini diakhiri.</p> <p>3) Konflik Rumah Ibadah Salah satu tipe konflik agama adalah konflik rumah ibadah khususnya yang menimpa gereja-gereja umat Kristiani yang kebanyakan terjadi di Jawa Barat. Misalnya yang menimpa Jemaat Gereja di Bandung.</p> <p>4) Konflik Sektarian Konflik sektarian adalah konflik yang terjadi pada intern agama. Salah satu konflik sektarian terjadi di Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada September 2002 yang menyebabkan penyerangan pada kelompok Ahmadiyah. Begitu juga penyerangan pada kaum Ahmadiyah</p>

² Panggabean, Samsu Rizal. 2012. Conflict Studies in Indonesia: A Preliminary Survey of Indonesian Publications. PCD Journal Vol. IV No. 1 : hal 149-163.

		<p>di Manislor Kuningan Jawa Barat. Lalu penyerangan Ahmadiyah di Cikeusik yang menyebabkan 3 orang umat Ahmadiyah terbunuh. Penyerangan pada kelompok kecil penganut al-Qiyadah al-Islamiah Siroj Jaziroh di Padang.</p>
2	Konflik Etnis	<p>1) Konflik di Kalimantan Barat dan Tengah Konflik etnis komunal yang terjadi di Kalimantan Barat dan Tengah melibatkan Suku Dayak dengan Suku Madura. Kekerasan di Kalimantan Barat dimulai pada tahun 1996, dengan puncak kekerasan pada tahun 1997 dan 1999, sedangkan kekerasan di Kalimantan Tengah terjadi pada tahun 2001.</p> <p>2) Konflik melawan Cina Konflik etnis berupa penyerangan terhadap etnis Cina yang menyebabkan kerusakan terjadi di akhir kekuasaan Soeharto di tahun 1998. Begitu pula penyerangan terhadap etnis Cina juga terjadi di Makassar pada tahun 1997. Kekerasan terhadap Cina juga terjadi di Solo Jawa Tengah, terjadi antara tanggal 13-15 Mei 1998.</p>
3	Konflik Separatis	<p>1) Konflik Papua Konflik separatis Papua merupakan konflik dengan melibatkan kelompok separatis OPM (Organisasi Papua Merdeka). Menuntut kemerdekaan. Konflik menuntut kemerdekaan bangsa akibat kekecewaan kelompok ini pada pemerintah pusat.</p>

		<p>Kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah pusat, seperti kurangnya perhatian terhadap sejarah Papua dalam kurikulum, redistribusi ekonomi yang tidak adil, kurangnya partisipasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi, kurangnya representasi orang Papua dalam posisi pemerintahan, pelanggaran hak asasi manusia dan marginalisasi.</p> <p>2) Konflik Aceh</p> <p>Konflik Aceh melibatkan kelompok perlawanan bersenjata GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang disebabkan ketidakpuasan atas pemerintah pusat. Khususnya Ketika Daerah Operasi Militer (DOM) di era tahun 1990an. Berbagai pelanggaran HAM terjadi. Pelanggaran tersebut antara lain penyiksaan, pemerkosaan, eksekusi mati, dan penghilangan yang sebagian besar dilakukan oleh aparat keamanan. Titik balik terpenting dalam sejarah konflik, kesepakatan damai tahun 2005 dan peran Jusuf Kalla, Wakil Presiden Indonesia saat itu, dalam prosesnya.</p>
4	Konflik Lingkungan & sumber daya alam	<p>Bagian yang penting dalam konflik ini adalah konflik yang terjadi di lingkaran pertambangan. Menggunakan pengalaman Freeport Indonesia di Papua dan Pertambangan Khatulistiwa Kelian di Kalimantan Timur, adalah kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk hidup, dan kebebasan dari rasa takut</p>

		<p>karena penangkapan sewenang-wenang, penghilangan, penyiksaan, dan sebagainya. Salah satunya adalah kasus konflik dan pelanggaran yang timbul akibat penambangan emas di Pongkor dan Cikotok, Jawa Barat, menjadi subjek. Pihak-pihak yang terjerat dalam konflik termasuk perusahaan milik negara Aneka Tambang, masyarakat lokal, migran, pasukan keamanan, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan anggota PETI – penambang emas skala kecil yang tidak terdaftar. Berbagai bentuk konflik seperti kerusuhan, serangan, pembakaran, dan demonstrasi telah terjadi antara masyarakat dan PETI, antara PETI dan Aneka Tambang, dan antara Aneka Tambang dan masyarakat setempat. Berbagai data menunjukkan bahwa insiden konflik pertambangan meningkat pada tahun 2000 khususnya selama transisi administrasi bernegara ke desentralisasi. Lebih banyak insiden terjadi di Kalimantan Timur, diikuti oleh Sumatera dan Jawa Tengah. Pelaku dalam konflik tersebut antara lain masyarakat lokal, pemilik konsesi (HPH), perkebunan industri (HTI), perkebunan kelapa sawit, dan taman nasional. Penyebab konflik yang paling umum adalah batas-batas administratif dan teritorial yang tidak jelas bersama dengan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang aksesnya terhadap sumber daya dan manfaat hutan dibatasi oleh perusahaan.</p>
--	--	--

Fenomena diatas menunjukkan bahwa ancaman disintegrasi sosial tak pernah hilang dari masyarakat kita. Perbedaan kepentingan menjadi dasar beragam konflik yang terjadi. Begitu pula ketegangan sosial yang tercermin dari angka kriminalitas yang tinggi. Badan Pusat Statistik merilis laporan Statistik Kriminal 2021 menyatakan : “Data Polri memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada tahun 2018 sebanyak 294.281 kejadian, menurun menjadi sebanyak 269.324 kejadian pada tahun 2019 dan menurun pada tahun 2020 menjadi 247.218 kejadian. Selama periode tahun 2018-2020, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung fluktuatif. *Crime rate* merupakan angka yang dapat menunjukkan tingkat kerawanan suatu kejahatan pada suatu wilayah tertentu dalam waktu tertentu. Semakin tinggi angka *crime rate* maka tingkat kerawanan akan kejahatan suatu daerah semakin tinggi pula, begitupun sebaliknya. Selama periode tahun 2018-2020, tingkat resiko terkena kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk juga mengalami penurunan, pada tahun 2020 sebesar 94. Angka ini menurun dari 113 pada tahun 2018 dan 103 pada tahun 2019. Dibawah ini sebaran jumlah kejahatan yang termuat dalam Statistik Kriminal 2021 , sebagai berikut :³

³ Badan Pusat Statistik. 2021. Statistik Kriminal 2021. Jakarta. Badan Pusat Statistik : hal 9-11



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Sulawesi Selatan termasuk daerah dengan tingkat *crime rate* tertinggi keempat. Fakta ini menunjukkan bahwa ketegangan sosial masih tinggi di Sulawesi Selatan. Beragam tindak kejahatan yang mencerminkan ketegangan sosial yang melibatkan kelompok misalnya kasus pembegalan dan tawuran antar kelompok atau warga. Kedua tindak kriminalitas tersebut semakin menunjukkan eskalasi yang menguatirkan. Kejahatan komunal tersebut biasanya terjadi di daerah perkotaan yang padat penduduk. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kota Makassar tahun 2022 menunjukkan sebaran angka kriminalitas di setiap kecamatan di Makasaar sebagai berikut :⁴

⁴ Badan Pusat Statistik Kota Makassar. 2022. Kota Makassar dalam Angka 2022. Makassar. Badan Pusat Statistik Kota Makassar : hal 220

Tabel 1.2

Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk, Persentase Penyelesaian Tindak Pidana, dan Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor (Polsek) di Kota Makassar, 2021

Kepolisian Sektor (Polsek) Sector Police Force	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Crime Total	Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk Crime Rate per 100,000 Population	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Percentage of Crime Clearance	Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana ¹ Time Interval of Crime Occurance ¹
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mariso	164	100	60,98	53.31'12"
Mamajang	165	53	32,12	35.24'00"
Tamalate	372	153	41,13	23.31'12"
Rappocini	395	179	45,32	22.48'00"
Makassar	213	85	39,91	41.24'00"
Ujung Pandang	119	55	46,22	73.40'48"
Rontolala	292	126	43,15	30.00'00"
Tallo	369	295	79,95	23.45'36"
Panakkukang	176	48	27,27	49.40'48"
Manggala	281	107	38,08	31.12'00"
Biringkanaya	362	160	44,20	24.14'24"
Tamalanrea	337	73	21,66	25.55'12"
Jumlah/Total	3 245	1 434	44,19	02.38'24"

Catatan/Note: ¹. = jam/hours; ' = menit/minutes; " = detik/second

Sumber/Source: Kepolisian Resort (POLRES) Kota Makassar/Departmental (Resort) Police Office of Makassar Municipality

Kota Makassar merupakan kota dengan tingkat kriminalitas tertinggi di Sulawesi Selatan. Besarnya angka kriminalitas di Kota Makassar menunjukkan dinamika masyarakat perkotaan yang tinggi. Dinamika kehidupan yang dinamis di masyarakat perkotaan tentu saja berpotensi untuk menciptakan ketegangan sosial antar kelompok masyarakat.

Kohesivitas sosial yang diharapkan tercipta tidak akan terjadi bila intensitas dan eskalasi ketegangan sosial

meninggi. Beragam luaran dinamika interaksi sosial menjadi perhatian utama sosiologi. Sosiologi berupa mendeskripsikan secara komprehensif fenomena interaksi sosial beserta bentuk, dinamika dan hasilnya.

Buku ini dibuat sebagai bentuk kepedulian teoritis dan praktis penulis terhadap beragam konflik sosial yang sebagiannya terjadi karena pengelolaan yang salah kaprah. Penulis berupaya untuk menyajikan paparan teoritik tentang modal sosial yang memiliki signifikansi dalam menjaga kohesivitas sosial dari ancaman potensi konflik yang bisa mengoyaknya.

BAB II

FENOMENA KONFLIK SEBAGAI REALITAS SOSIAL TAK TERHINDARKAN

Secara alamiah, seseorang senantiasa mengembangkan dirinya melalui interaksi sosialnya dengan orang atau kelompok lain. Fenomena alamiah inilah yang disebut dengan kehidupan sosial manusia dan juga menjadi obyek bahasan sosiologi. Upaya untuk menganalisis output interaksi sosial dan menjadi perhatian para sosiologi sepanjang sejarah. Modal sosial merupakan salah satu fenomena sosiologis yang dianggap sebagai modal yang memiliki keunggulan untuk mentransformasi masyarakat kearah yang lebih baik. Modal sosial menjadi obyek bahasan sosiologis karena sifatnya sebagai fenomena yang erat kaitannya dengan dinamika kemasyarakatan.

Secara historis, sosiologi sebagai sebuah disiplin ilmu yang telah berkembang dengan 5 tahapan penting yakni :⁵

1. Fase ketika Sosiologi masih tak terpisahkan dengan Filsafat. Para Filsuf Yunani kuno seperti Socrates, *Plato*, dan *Aristoteles* beranggapan bahwa masyarakat terbentuk begitu saja tanpa ada yang bisa merubahnya. Masyarakat mengalami perkembangan dan kemunduran, kemakmuran maupun krisis dan semua itu merupakan masalah yang tidak dapat terelakkan. Anggapan tersebut bertahan semasa abad pertengahan (abad ke-5 M sampai akhir abad ke-14 M). Para pemikir seperti *Agustinus*, *Avicenna*, dan *Thomas Aquinas* menegaskan bahwa nasib masyarakat harus diterima sebagai bagian dari kehendak Ilahi.

⁵ Sudarsono, Agus & Wijayanti, Agustina Tri. 2016. Pengantar Sosiologi. Yogyakarta. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta : hal. 2-5

Sebagai makhluk yang fana, manusia tidak dapat mengetahui, apalagi menentukan apa yang akan terjadi di masyarakatnya. Pertanyaan dan pertanggungjawaban mengenai perubahan masyarakat belum terpikirkan pada saat itu.

2. Fase Kelahiran Awal Sosiologi. Suatu fase yang dimulai pada abad ke-17 M merupakan abad berkembangnya ilmu pengetahuan yang ditandai dengan berbagai macam penemuan di bidang ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan berpengaruh terhadap pandangan mengenai perubahan masyarakat yang sebelumnya dianggap sebagai nasib yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Muncul pemikiran jika perubahan yang terjadi di dalam masyarakat harus dapat dijelaskan secara rasional (masuk akal), dan berpedoman pada akal budi manusia. Maka muncullah metode ilmiah. Beberapa pemikir yang menekankan pentingnya metode ilmiah untuk mengamati masyarakat, diantaranya ada Francis Bacon dari Inggris, Rene Descartes dari Prancis, dan Wilhelm Leibnitz dari Jerman.
3. Fase Revolusi Industri. Fase ini merupakan kristalisasi pembentukan ilmu sosiologi yang ditandai dengan adanya perubahan pada abad pencerahan mengakibatkan perubahan revolusioner di sepanjang abad ke-18 M. Perubahan itu dapat dikatakan revolusioner karena perubahan terjadi dengan cepat, mengakibatkan struktur (tatanan) masyarakat lama berganti dengan struktur yang baru. Revolusi sosial paling jelas terlihat dalam tiga revolusi besar terjadi sepanjang abad ke-18 M yang mengakibatkan perubahan besar di seluruh dunia. Revolusi tersebut adalah Revolusi Amerika, Revolusi Industri dan

Revolusi Prancis. Revolusi Amerika ditandai dengan didirikannya negara republik di Amerika Utara dengan sistem pemerintahan demokratis. Pemerintahan jenis ini tergolong baru untuk saat itu, karena kebanyakan negara masih berbentuk monarki. Revolusi Amerika menggugah kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia. Gagasan kedaulatan rakyat (rakyat yang berkuasa) dan pentingnya hak asasi manusia (semua orang bermartabat sama) mengubah susunan serta kedudukan orang dan kelompok di masyarakat. Revolusi Industri ditandai dengan perubahan besar dalam bidang produksi, yakni berubahnya penggunaan tenaga manusia ke tenaga mesin. Revolusi industri berpengaruh terhadap munculnya kalangan baru dalam masyarakat yaitu para pemilik modal yang disebut kaum kapitalis (*borjuis*) dan para pekerja pabrik yang disebut kaum buruh (*proletar*). Kaum kapitalis memiliki modal untuk membuat usaha, sedangkan kaum buruh bekerja di pabrik. Kaum bangsawan dan rohaniawan yang sebelumnya lebih berkuasa, mulai tergeser posisinya oleh kaum kapitalis yang mampu mengendalikan perekonomian. Kemudian muncul kesadaran akan hak asasi manusia dan persamaan semua orang di hadapan hukum yang mengakibatkan munculnya revolusi Prancis menguatkan tersebarnya semangat liberalisme di segala bidang kehidupan. Di bidang sosial semangat liberalisme muncul dalam kesadaran akan hak asasi manusia sedangkan dalam bidang politik semangat liberalisme tampak dari penerapan hukum atau undang-undang. Pada saat itu rakyat menggulingkan kekuasaan bangsawan yang dianggap bersenang-senang di atas penderitaan rakyat, lalu membentuk

pemerintahan yang lebih demokratis. Perubahan besar dalam masyarakat abad Revolusi mengakibatkan terjadinya perubahan besar dalam masyarakat. Tatanan yang telah ratusan tahun dianut oleh masyarakat dijungkirbalikan dan dikacaukan. Gejolak abad revolusi itu menggugah para ilmuwan untuk mencari cara menganalisis perubahan masyarakat dengan penjelasan yang rasional dan ilmiah sehingga dapat diketahui sebab serta akibatnya, dengan harapan bencana yang terjadi akibat perubahan di masyarakat dapat dihindari, diantisipasi serta diberikan solusi.

4. Fase Kelahiran Sosiologi. Fase ini ditandai diakuinya sosiologi sebagai satu disiplin ilmu yang pada abad ke-19 M ilmuwan mulai menyadari perlunya menyadari kondisi dan perubahan sosial secara khusus. Mereka berusaha membangun teori sosial berdasarkan ciri-ciri hakiki masyarakat pada tiap peradaban manusia. Untuk membangun teori tersebut, mereka membandingkan masyarakat dan peradaban manusia dari masa ke masa. Auguste Comte seorang berkebangsaan Prancis dalam bukunya *Course de Philosophie Positive* memperkenalkan istilah sosiologi sebagai pendekatan khusus untuk mempelajari masyarakat. Sebenarnya pendekatan khusus tersebut merupakan metode ilmiah yang biasa digunakan dalam ilmu alam. Bisa dikatakan Auguste Comte merintis upaya penelitian terhadap masyarakat, yang ratusan tahun dianggap mustahil oleh masyarakat.
5. Fase Kelahiran Sosiologi Modern. Meski sosiologi lahir di Eropa namun perkembangannya justru terjadi dengan pesat di Amerika. Ini berhubungan dengan gejolak sosial yang terjadi di sana. Gejolak sosial

tersebut terjadi saat memasuki abad ke-20 M ditandai dengan berdatangnya imigran dalam jumlah besar ke Amerika mengakibatkan pesatnya pertumbuhan penduduk, munculnya industri baru yang lengkap dengan gejala kehidupan kota besar, kriminalitas, kerusuhan, sampai tuntutan akan hak wanita dan kaum buruh. Perubahan masyarakat yang begitu mencolok menggugah para ilmuwan sosial untuk berpikir keras, karena mereka menyadari pendekatan sosiologi lama ala Eropa sudah tidak lagi relevan. Mereka berupaya menemukan pendekatan baru yang sesuai kondisi masyarakat saat itu, maka lahirlah sosiologi modern.

Ilmu sosiologi sendiri memiliki beragam pengertian yang berbeda di antara para sosiolog. Setiadi dan Kolip menguraikan beragam definisi sosiologi menurut para ahli sosiologi sebagai berikut :⁶

1. Pitirim Sorokin membatasi sosiologi sebagai suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial seperti, antara gejala ekonomi dan agama, keluarga dan moral, hukum dan ekonomi, gerakan masyarakat dan politik, dan sebagainya; hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala-gejala sosial dan gejala-gejala nonsosial seperti gejala geografis, biologis dan sebagainya; dan ciri-ciri umum dari semua jenis gejala-gejala sosial. Pernyataan ini menggambarkan bahwa gejala sosial yang membentuk gejala ekonomi, agama, keluarga dan moral tak akan pernah terjadi tanpa hubungan timbal balik antara satu individu dengan individu lainnya

⁶ Setiadi, Elly M. & Kolip, Usman, 2011, Pengantar Sosiologi, Jakarta, Kencana : hal.2-3

- dengan mengarahkan tindakannya ke orang lain dan mendapatkan respon balik dari orang lain.
2. Roucek dan Warren mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan kelompok. Pernyataan ini menggambarkan hubungan antar manusia yang tak akan terbentuk jika masing-masing pihak tidak mengarahkan tindakannya kepada orang lain yang merupakan inti dari tindakan sosial.
 3. William F Ogburn dan Meyer F Nimkoff berpendapat bahwa sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Pernyataan ini menggambarkan bahwa organisasi sosial terbentuk dari adanya interaksi sosial dan setiap interaksi sosial tidak akan pernah terjadi tanpa adanya tindakan sosial antar 2 orang atau lebih.
 4. Berbeda dengan J.A.A. von Doorn dan C.J. Lammers, ia mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. Pernyataan ini menempatkan struktur dan proses kemasyarakatan yang sama diketahui tak akan mungkin terjadi tanpa adanya hubungan resiprokal seseorang dengan orang lain dengan melakukan satu tindakan yang disebut tindakan sosial.
 5. Selo Soemarjan dan Soelaiman Soemantri membatasi sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari struktur sosial (yaitu keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok seperti kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial dan lapisan sosial) dan proses-proses sosial (yang berupa pengaruh timbal balik antara pelbagai kehidupan bersama seperti kehidupan ekonomi dan

kehidupan politik, kehidupan hukum dan kehidupan agama dan lain sebagainya), termasuk didalamnya adalah perubahan-perubahan sosial. Pernyataan Selo Soemartjan dan Soelaman Soemantri sekali lagi menegaskan bahwa realitas sosial merupakan kumpulan dari jejaring tindakan sosial yang berhubungan satu sama lain yang menciptakan proses sosial dan proses sosial tersebut akan menciptakan struktur sosial.

6. Max Weber yang lebih berorientasi pada behavioralis (pendekatan tingkah laku) menekankan sosiologi sebagai ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Pernyataan Max Weber dengan jelas menempatkan tindakan sosial sebagai konsep inti dari sosiologi.
7. Paul B Horton berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu yang memusatkan penelaahan pada kehidupan kelompok dan produk kehidupan kelompok tersebut. Pernyataan ini dengan cara tertentu menjelaskan tentang transformasi kehidupan kelompok. Kehidupan kelompok sebagaimana yang diketahui merupakan jejaring tindakan sosial antar anggotanya.
8. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatiannya pada segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Pernyataan ini menurut peneliti semakin mempertegas bahwa konsep tindakan sosial merupakan dasar dari seluruh pola-pola umum kemasyarakatan. Pola-pola umum kemasyarakatan pada dasarnya merupakan jejaring hubungan sosial yang kompleks yang tanpa tindakan sosial hubungan sosial tidak akan pernah terjadi.

9. William Kornblum mendefinisikan sosiologi sebagai upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pernyataan ini menurut peneliti memusatkan pada konsep perilaku sosial yang pada dasarnya berwujud tindakan-tindakan sosial antar satu anggota yang diarahkan ke anggota lainnya dan memperoleh tanggapan balik. Bahkan perilaku masyarakat adalah perilaku tindakan sosial dari masing-masing anggota kelompok masyarakat tersebut.
10. Allan Johnson mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku terutama dalam kaitannya dengan suatu sistem sosial dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi orang dan bagaimana pula orang yang terlibat didalamnya mempengaruhi sistem itu. Pernyataan ini menegaskan bahwa sistem sosial terbentuk karena adanya perilaku tertentu. Perilaku ini tentunya perilaku individu secara sosial. Perilaku sosial adalah sejenis tindakan sosial. Relasi tindakan sosial antar manusia akhirnya menciptakan sebuah sistem sosial yang akan disepakati bersama dan bersifat mengikat dan mengarahkan tindakan sosial didalam kelompok tersebut sesuai dengan norma dan nilai dalam sistem sosial.
11. Mayot Polak mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yakni hubungan diantara manusia dan kelompok, kelompok dan kelompok, baik kelompok formal maupun kelompok material atau baik kelompok statis maupun kelompok dinamis. Pernyataan ini menurut peneliti sekali lagi

menegaskan bahwa hubungan antar manusia dan kelompok sebagai hal vital bagi sosiologi. Hubungan sosial tersebut tentunya tak akan pernah terjadi tanpa adanya tindakan sosial yang terarahkan ke orang lain dan memperoleh timbal balik.

Stolley menjabarkan beragam fungsi eksplanasi sosiologis dalam menganalisis fenomena sosial, sebagai berikut :⁷

1. *Sociology provides an understanding of social issues and patterns of behavior.* It helps us identify the social rules that govern our lives. Sociologists study how these rules are created, maintained, changed, passed between generations, and shared between people living in various parts of the world. They also study what happens when these rules are broken. Sosiologi memberikan pemahaman tentang masalah sosial dan pola perilaku. Ini membantu kita mengidentifikasi aturan sosial yang mengatur hidup kita. Sosiolog mempelajari bagaimana aturan-aturan ini dibuat, dipertahankan, diubah, diturunkan antar generasi, dan dibagikan di antara orang-orang yang tinggal di berbagai belahan dunia. Mereka juga mempelajari apa yang terjadi ketika aturan ini dilanggar.
2. *Sociology helps us understand the workings of the social systems within which we live our lives.* Sociologists put our interactions with others into a social context. This means they look not only at behaviors and relationships, but also how the larger world we live in influences these things. Social structures (the way society is organized around the regulated ways people

⁷ Stolley, Kathy S. 2005. *The Basic Of Sociology*. Greenwood Press. Westport, Connecticut & London : pp.2

interrelate and organize social life) and social processes (the way society operates) are at work shaping our lives in ways that often go unrecognized. Because of this perspective, sociologists will often say that, as individuals, we are social products. Sosiologi membantu kita memahami cara kerja sistem sosial di mana kita menjalani hidup kita. Sosiolog menempatkan interaksi kita dengan orang lain ke dalam konteks sosial. Ini berarti mereka tidak hanya melihat perilaku dan hubungan, tetapi juga bagaimana dunia yang lebih besar tempat kita hidup memengaruhi hal-hal ini. Struktur sosial (cara masyarakat diorganisir di sekitar cara orang-orang yang diatur saling berhubungan dan mengatur kehidupan sosial) dan proses sosial (cara masyarakat beroperasi) sedang bekerja membentuk hidup kita dengan cara yang sering tidak dikenali. Karena perspektif ini, sosiolog akan sering mengatakan bahwa, sebagai individu, kita adalah produk sosial.

3. *Sociology helps us understand why we perceive the world the way we do.* We are inundated with messages in a variety of forms about how we, and the world around us, both are and should be. These messages come in forms as diverse as guidance from parents and teachers, laws handed down by religious and political entities, and advertisements ranging from pitches for athletic shoes to feeding hungry children. Sociology helps us examine the types of messages we are constantly receiving, their source, how and why they influence us, and our own roles in producing, perpetuating, and changing them. Sosiologi membantu kita memahami mengapa kita memandang dunia seperti yang kita lakukan. Kita dibanjiri dengan pesan

dalam berbagai bentuk tentang bagaimana kita, dan dunia di sekitar kita, keduanya dan seharusnya. Pesan-pesan ini datang dalam berbagai bentuk seperti bimbingan dari orang tua dan guru, undang-undang yang diturunkan oleh entitas agama dan politik, dan iklan mulai dari penawaran sepatu atletik hingga memberi makan anak-anak yang kelaparan. Sosiologi membantu kita memeriksa jenis pesan yang terus-menerus kita terima, sumbernya, bagaimana dan mengapa pesan itu memengaruhi kita, dan peran kita sendiri dalam memproduksi, mengabadikan, dan mengubahnya.

4. *Sociology helps us identify what we have in common within, and between, cultures and societies.* Sociologists know that, although people in different parts of the city, country, or world dress differently, speak differently, and have many different beliefs and customs, many of the same types of social forces are at work shaping their lives. This is an especially important perspective in a world where media headlines are often accused of focusing on divisive issues. Sociologists look for what social structure and processes mean for various groups. They look at how various groups shape, and are impacted, by society. Sociologists can help groups find common concerns, understand other groups' perspectives, and find ways to work together rather than work at odds with each other. Sosiologi membantu kita mengidentifikasi kesamaan yang kita miliki di dalam, dan di antara, budaya dan masyarakat. Sosiolog tahu bahwa, meskipun orang-orang di berbagai bagian kota, negara, atau dunia berpakaian berbeda, berbicara secara berbeda, dan memiliki banyak kepercayaan dan

kebiasaan yang berbeda, banyak dari jenis kekuatan sosial yang sama sedang bekerja membentuk kehidupan mereka. Ini adalah perspektif yang sangat penting di dunia di mana berita utama media sering dituduh berfokus pada isu-isu yang memecah belah. Sosiolog mencari apa arti struktur dan proses sosial bagi berbagai kelompok. Mereka melihat bagaimana berbagai kelompok membentuk, dan dipengaruhi, oleh masyarakat. Sosiolog dapat membantu kelompok menemukan keprihatinan bersama, memahami perspektif kelompok lain, dan menemukan cara untuk bekerja sama dari pada bekerja bertentangan satu sama lain.

5. *Sociology helps us understand why and how society changes.* Obviously, the social world is constantly changing. This change has been a major interest to sociologists from the beginning of the discipline. However, many sociologists believe that sociology should not stop with only explaining society and how and why the world changes. They argue that sociologists also have an obligation to act, using their unique skills and perspectives to work to improve the world. Sociology, they argue, is a “field of inquiry simultaneously concerned with understanding, explaining, criticizing, and improving (italics mine) the human condition” (Restivo 1991, 4). Armed with a sociological perspective, we can more effectively take action if we don’t like what is happening. We can better participate in shaping the future for ourselves and for others. Sosiologi membantu kita memahami mengapa dan bagaimana masyarakat berubah. Jelas, dunia sosial terus berubah. Perubahan ini telah menjadi minat utama sosiolog dari awal disiplin.

Namun, banyak sosiolog percaya bahwa sosiologi tidak boleh berhenti hanya menjelaskan masyarakat dan bagaimana dan mengapa dunia berubah. Mereka berpendapat bahwa sosiolog juga memiliki kewajiban untuk bertindak, menggunakan keterampilan dan perspektif unik mereka untuk bekerja memperbaiki dunia. Sosiologi, menurut mereka, adalah "bidang penyelidikan yang secara simultan berkaitan dengan pemahaman, penjelasan, kritik, dan peningkatan kondisi manusia" Berbekal perspektif sosiologis, kita bisa lebih efektif mengambil tindakan jika kita tidak menyukai apa yang terjadi. Kita dapat berpartisipasi lebih baik dalam membentuk masa depan untuk diri kita sendiri dan orang lain.

6. *Sociology provides us theoretical perspectives within which to frame these understandings and research methods that allow us to study social life scientifically.* Sociology is a social science. That means sociologists work to understand society in very structured, disciplined ways. Like scientists who study the physical world, sociologists follow scientific guidelines that incorporate an assortment of theories and methods that provide for accuracy in gathering, processing, and making sense of information. Sosiologi memberi kita perspektif teoretis untuk mendingkat pemahaman ini dan metode penelitian yang memungkinkan kita mempelajari kehidupan sosial secara ilmiah. Sosiologi adalah ilmu sosial. Itu berarti sosiolog bekerja untuk memahami masyarakat dengan cara yang sangat terstruktur dan disiplin. Seperti ilmuwan yang mempelajari dunia fisik, sosiolog mengikuti pedoman ilmiah yang menggabungkan berbagai macam teori dan metode yang memberikan

akurasi dalam mengumpulkan, memproses, dan memahami informasi.

7. *Sociology is not just common sense.* Results of sociological research may be unexpected. They often show that things are not always, or even usually, what they initially seem. Sosiologi bukan hanya akal sehat. Hasil penelitian sosiologis mungkin tidak terduga. Mereka sering menunjukkan bahwa segala sesuatunya tidak selalu, atau bahkan biasanya, seperti yang terlihat pada awalnya.

Narwoko & Suyanto menyatakan bahwa obyek sosiologi ada dua macam, yaitu : 1) Obyek materi dari sosiologi adalah kehidupan sosial manusia, dan gejala serta proses hubungan antar manusia yang mempengaruhi kesatuan hidup bersama, 2) Obyek Formal adalah pengertian terhadap lingkungan hidup manusia dalam kehidupan sosial, meningkatkan kehidupan harmonis masyarakatnya, meningkatkan kerja sama antar manusia⁸.

Obyek sosiologi tidak lain adalah upaya mengeksplorasi secara mendalam dan komprehensif fenomena interaksi sosial di masyarakat. Bahkan Turner menyatakan bahwa "*The basic unit of sociological analysis is not action, but interaction; and the presumption that one can begin with elementary conceptualizations of action and then progressively move up to the analysis of interaction and structure is highly questionable*"⁹. Bagi Turner obyek sosiologi bukanlah tindakan sosial namun interaksi sosial. Meskipun dasar interaksi sosial adalah tindakan sosial.

⁸ Narwoko, J Dewi&Suyanto, Bagong. 2010. *Sosiologi. Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta. Prenada Media : hal.117

⁹ Turner, Jonathan. 1988. *A Theory of Social Interaction*. California. Stanford University Press : pg.3

Interaksi sosial sendiri adalah " hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang berkaitan dengan orang perorangan, kelompok dengan kelompok, maupun perorangan dengan kelompok manusia. Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia manusia terjadi sebagai sebuah kesatuan dan tidak menyangkut pribadi-pribadi anggotanya"¹⁰. Interaksi sosial memiliki 4 kriteria, antara lain¹¹ :

1. Harus ada pelaku yang jumlahnya lebih dari satu
2. Ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol
3. Ada dimensi waktu
4. Ada tujuan-tujuan tertentu

Soekanto menguraikan secara detail dua bentuk interaksi sosial yakni asosiatif dan disosiatif, sebagai berikut ¹²:

1. Hubungan Asosiatif

- a. Kerjasama; Beberapa sosiolog menganggap bahwa kerja sama merupakan bentuk interaksi sosial yang pokok. Sosiolog lain menganggap bahwa kerja sama merupakan proses utama. Golongan terakhir tersebut memahami kerjasama untuk menggambarkan sebagian besar bentuk-bentuk interaksi sosial atas dasar bahwa segala macam bentuk interaksi tersebut dapat dikembalikan kepada kerja sama. Kerja sama di sini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk dan pola-pola kerja sama dapat dijumpai pada semua kelompok manusia. Kebiasaan-kebiasaan

¹⁰Elly M Setiadi & Usman Kolip. 2011. Pengantar Sosiologi. Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya.Cet. II. Jakarta. Penerbit Kencana : hal. 63

¹¹ Ibid. hal 65-66

¹² Soekanto, Soerjono.2007. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. Rajawali Press : hal. 65-96

dan sikap-sikap demikian dimulai sejak masa kanak-kanak di dalam kehidupan keluarga atau kelompok-kelompok kekerabatan. Bentuk kerja sama tersebut berkembang apabila orang dapat digerakkan untuk mencapai suatu tujuan bersama dan harus ada kesadaran bahwa tujuan tersebut di kemudian hari mempunyai manfaat bagi semua. Juga harus ada iklim yang menyenangkan dalam pembagian kerja serta balas jasa yang akan diterima. Dalam perkembangan selanjutnya, keahlian-keahlian tertentu diperlukan bagi mereka yang bekerja sama, agar rencana kerja samanya dapat terlaksana dengan baik. Kerja sama timbul karena orientasi orang perorangan terhadap kelompoknya (*in-group*-nya) dan kelompok lainnya (*out-group*-nya). Kerja sama mungkin akan bertambah kuat apabila ada bahaya luar yang mengancam atau ada tindakan-tindakan luar yang menyinggung kesetiaan yang secara tradisional atau institusional telah tertanam di dalam kelompok, dalam diri seseorang atau segolongan orang. Kerja sama dapat bersifat agresif apabila kelompok dalam jangka waktu yang lama mengalami kekecewaan sebagai akibat perasaan tidak puas, karena keinginan-keinginan pokoknya tak dapat terpenuhi oleh karena adanya rintangan-rintangan yang bersumber dari luar kelompok itu. Sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama, ada lima bentuk kerja sama, yaitu: 1) Kerukunan yang mencakup gotong-royong dan tolong-menolong, 2) *Bargaining*, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa-jasa antara dua organisasi atau lebih, 3) Ko-optasi (*Co-optation*), yaitu suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam

kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi, sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilisasi organisasi yang bersangkutan.4) Koalisi (*Coalition*), yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Koalisi dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil untuk sementara waktu, karena dua organisasi atau lebih tersebut kemungkinan mempunyai struktur yang tidak sama antara satu dengan lainnya. Akan tetapi karena maksud utama adalah untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama, maka sifatnya adalah kooperatif.5) *Joint-venture*, yaitu kerja sama dalam perusahaan proyek-proyek tertentu, misalnya pemboran minyak, pertambangan batu bara, perfilman, perhotelan dan sebagainya.

- b. Akomodasi; Istilah akomodasi dipergunakan dalam dua arti yaitu untuk menunjuk pada suatu keadaan dan untuk menunjuk pada suatu proses. Akomodasi yang menunjuk pada suatu keadaan, berarti adanya suatu keseimbangan (*equilibrium*) dalam interaksi antara orang-orang atau kelompok-kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Sebagai suatu proses, akomodasi menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Menurut Gillin dan Gillin, akomodasi adalah suatu pengertian yang digunakan oleh para sosiolog untuk menggambarkan suatu proses dalam hubungan-hubungan sosial yang sama artinya dengan pengertian adaptasi (*adaptation*) yang dipergunakan oleh ahli-ahli biologi untuk

menunjuk pada suatu proses dimana makhluk-makhluk hidup menyesuaikan dirinya dengan alam sekitarnya. Dengan pengertian tersebut dimaksudkan sebagai suatu proses dimana orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan, saling mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan-ketegangan. Akomodasi sebenarnya merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Tujuan akomodasi dapat berbeda-beda sesuai dengan situasi yang dihadapinya, yaitu:

- 1) Untuk mengurangi pertentangan antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia sebagai akibat perbedaan paham. Akomodasi disini bertujuan untuk menghasilkan suatu sintesa antara kedua pendapat tersebut, agar menghasilkan suatu pola yang baru.
- 2) Mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu.
- 3) Untuk memungkinkan terjadinya kerja sama antara kelompok-kelompok sosial yang hidupnya terpisah sebagai akibat faktor-faktor sosial psikologis dan kebudayaan, seperti yang dijumpai pada masyarakat yang mengenal sistem kasta.
- 4) Mengusahakan peleburan antara kelompok-kelompok sosial yang terpisah.

Adapun bentuk-bentuk akomodasi adalah sebagai berikut :

- a) *Coercion*, adalah suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan oleh karena adanya

paksaan. *Coercion* merupakan bentuk akomodasi, dimana salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan pihak lawan. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara fisik (langsung) maupun psikologis (tidak langsung).

- b) *Compromise*, adalah suatu bentuk akomodasi dimana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya, agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. Sikap dasar untuk dapat melaksanakan *compromise* adalah bahwa salah satu pihak bersedia untuk merasakan dan memahami keadaan pihak lainnya dan begitu pula sebaliknya.
- c) *Arbitration*, merupakan suatu cara untuk mencapai *compromise* apabila pihak-pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainya sendiri. Pertentangan diselesaikan oleh pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak atau oleh suatu badan yang berkedudukan lebih tinggi dari pihak-pihak bertentangan.
- d) *Mediation* hampir menyerupai *arbitration*. Pada *mediation* diundanglah pihak ketiga yang netral dalam soal perselisihan yang ada. Tugas pihak ketiga tersebut adalah mengusahakan suatu penyelesaian secara damai. Kedudukan pihak ketiga hanyalah sebagai penasihat belaka, dia tidak berwenang untuk memberi keputusan-keputusan penyelesaian perselisihan tersebut.
- e) *Conciliation*, adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari

pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama. *Conciliation* bersifat lebih lunak dari pada *coercion* dan membuka kesempatan bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan asimilasi.

- f) *Toleration*, juga sering disebut sebagai *tolerant-participation*. Ini merupakan suatu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formal bentuknya. Kadang-kadang *toleration* timbul secara tidak sadar dan tanpa direncanakan, ini disebabkan karena adanya watak orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia untuk sedapat mungkin menghindarkan diri dari suatu perselisihan.
- g) *Stalemate*, merupakan suatu akomodasi, dimana pihak-pihak yang bertentangan karena mempunyai kekuatan yang seimbang berhenti pada suatu titik tertentu dalam melakukan pertentangannya. Hal ini disebabkan oleh karena kedua belah pihak sudah tidak ada kemungkinan lagi baik untuk maju maupun untuk mundur.
- h) *Adjudication*, yaitu penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan.

Hasil-hasil akomodasi adalah sebagai berikut :

- 1) Akomodasi, dan integrasi masyarakat, telah berbuat banyak untuk menghindari masyarakat dari benih-benih pertentangan latent yang akan melahirkan pertentangan baru.

- 2) Menekan oposisi. Seringkali suatu persaingan dilaksanakan demi keuntungan suatu kelompok tertentu demi kerugian pihak lain.
- 3) Koordinasi berbagai kepribadian yang berbeda.
- 4) Perubahan lembaga-lembaga kemasyarakatan agar sesuai dengan keadaan baru atau keadaan yang berubah.
- 5) Perubahan-perubahan dalam kedudukan.
- 6) Akomodasi membuka jalan ke arah asimilasi.

c. Asimilasi; Asimilasi merupakan proses sosial dalam taraf lanjut. Ia ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Secara singkat, proses asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama, walau kadangkala bersifat emosional, dengan tujuan untuk mencapai kesatuan, atau paling sedikit mencapai integrasi dalam organisasi, pikiran, dan tindakan. Proses asimilasi timbul bila ada:

- 1) Kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya.
- 2) Orang perorangan sebagai warga kelompok tadi saling bergaul secara langsung dan intensif untuk waktu yang lama.
- 3) Kebudayaan-kebudayaan dari kelompok-kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri.

Faktor-faktor yang dapat mempermudah terjadinya suatu asimilasi adalah:

- 1) Toleransi
- 2) Kesempatan-kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi
- 3) Sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya
- 4) Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat
- 5) Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan
- 6) Perkawinan campur (*amalgamation*)
- 7) Adanya musuh bersama di luar.

Faktor-faktor umum yang dapat menjadi penghalang terjadinya asimilasi adalah:

- 1) Terisolasi kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat.
- 2) Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi.
- 3) Perasaan takut terhadap kekuatan suatu kebudayaan yang dihadapi.
- 4) Perasaan bahwa suatu kebudayaan golongan atau kelompok tertentu lebih tinggi dari pada kebudayaan golongan atau kelompok lainnya.
- 5) Perbedaan warna kulit atau perbedaan ciri-ciri badaniah.
- 6) *In-group feeling* yang kuat.
- 7) Golongan minoritas mengalami gangguan-gangguan dari golongan yang berkuasa.
- 8) Perbedaan kepentingan dan pertentangan-pertentangan pribadi.

2. Hubungan disosiatif. Proses disosiatif sering disebut sebagai *oppositional processes*, seperti halnya dengan kerja sama, dapat ditemukan pada setiap masyarakat, walaupun bentuk dan arahnya ditentukan oleh kebudayaan dan sistem sosial masyarakat bersangkutan. Apakah suatu masyarakat lebih menekankan pada salah satu bentuk oposisi, atau lebih menghargai kerja sama, hal itu tergantung pada unsur-unsur kebudayaan terutama yang menyangkut sistem nilai, struktur masyarakat dan sistem sosialnya. Faktor yang paling menentukan adalah sistem nilai masyarakat tersebut. Oposisi dapat diartikan sebagai cara berjuang melawan seseorang atau sekelompok manusia, untuk mencapai tujuan tertentu. Terbatasnya makanan, tempat tinggal serta lain-lain faktor telah melahirkan beberapa bentuk kerja sama dan oposisi. Pola-pola oposisi tersebut dinamakan juga sebagai perjuangan untuk tetap hidup (*struggle for existence*). Perlu dijelaskan bahwa pengertian *struggle for existence* juga dipakai untuk menunjuk kepada suatu keadaan di mana manusia yang satu tergantung pada kehidupan manusia yang lainnya, keadaan yang menimbulkan kerja sama untuk dapat tetap hidup. Perjuangan ini mengarah pada paling sedikit tiga hal yaitu perjuangan manusia melawan sesama, perjuangan manusia melawan makhluk-makhluk jenis lain serta perjuangan manusia melawan alam. Hubungan disosiatif terdiri dari 3 bentuk yakni :

- a. Persaingan; suatu proses social, di mana individu atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing, mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum (baik perseorangan maupun

kelompok manusia) dengan cara menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada, tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan. Ada beberapa bentuk persaingan, di antaranya :

- 1) Persaingan ekonomi. Timbul karena terbatasnya persediaan apabila dibandingkan dengan jumlah konsumen.
- 2) Persaingan kebudayaan. Menyangkut persaingan kebudayaan, keagamaan, lembaga kemasyarakatan seperti pendidikan, dan sebagainya.
- 3) Persaingan kedudukan dan peranan. Di dalam diri seseorang maupun di dalam kelompok terdapat keinginan-keinginan untuk diakui sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kedudukan serta peranan yang terpandang.
- 4) Persaingan ras. Perbedaan ras baik karena perbedaan warna kulit, bentuk tubuh, maupun corak rambut dan sebagainya, hanya merupakan suatu perlambang kesadaran dan sikap atas perbedaan-perbedaan dalam kebudayaan.

Persaingan dalam batas-batas tertentu dapat memiliki beberapa fungsi, antara lain :

- 1) Menyalurkan keinginan-keinginan individu atau kelompok yang bersifat kompetitif.
- 2) Sebagai jalan di mana keinginan, kepentingan serta nilai-nilai yang pada suatu masa menjadi pusat perhatian, tersalurkan dengan baik oleh mereka yang bersaing.
- 3) Merupakan alat untuk mengadakan seleksi atas dasar seks dan sosial

- 4) Alat untuk menyaring para warga golongan karya (fungsional) yang akhirnya akan menghasilkan pembagian kerja yang efektif. Hasil suatu persaingan terkait erat dengan berbagai faktor, antara lain :
 - a) Kepribadian seseorang
 - b) Kemajuan masyarakat
 - c) Solidaritas kelompok
 - d) Disorganisasi
- b. Kontravensi ; Kontravensi merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian.
 - 1) Bentuk-bentuk kontravensi menurut Leopold von Wiese, dan Howard Becker, ada 5, yaitu :
Yang umum meliputi perbuatan-perbuatan seperti penolakan, keengganan, perlawanan, perbuatan menghalang-halangi, protes, gangguan-gangguan, perbuatan kekerasan, dan mengacaukan rencana pihak lain.; Yang sederhana seperti menyangkal pernyataan orang lain didepan umum, memaki melalui selebaran surat, mencerca, memfitnah, melemparkan beban pembuktian kepada pihak lain,dan sebagainya.; Yang intensif mencakup penghasutan, menyebarkan desas-desus mengecewakan pihak lain, dan sebagainya; Yang rahasia, seperti mengumumkan rahasia pihak lain, perbuatan khianat, dan sebagainya. ; Yang taktis, misalnya mengejutkan lawan, mengganggu atau membingungkan pihak lain, seperti dalam kampanye parpol dalam pemilihan umum.
 - 2) Tipe-tipe Kontravensi; Menurut von Wiese dan Becker terdapat tiga tipe umum kontravensi

yaitu kontravensi generasi masyarakat 9 bentukan antara generasi muda dengan tua karena perbedaan latar belakang pendidikan, usiadan pengalaman), kontravensi yang menyangkut seks (hubungan suami dengan istri dalam keluarga) dan kontravensi parlementer (hubungan antara golongan mayoritas dengan minoritas dalam masyarakat baik yang menyangkut hubungan mereka di dalam lembaga-lembaga legislatif, keagamaan, pendidikan, dan seterusnya). Selain tipe-tipe umum tersebut ada ada pula beberapa kontravensi yang sebenarnya terletak di antara kontravensi dan pertentangan atau pertikaian,yang dimasukkan ke dalam kategori kontravensi, yaitu :

- a) Kontravensi antar masyarakat
 - b) Antagonism keagamaan
 - c) Kontravensi intelektual
 - d) Oposisi moral. Kontravensi, apabila dibandingkan dengan persaingan dan pertentangan bersifat agak tertutup atau rahasia.
- c. Pertentangan atau pertikaian ; Pertentangan atau pertikaian adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan. Penyebab terjadinya pertentangan, yaitu :
- 1) Perbedaan individu-individu
 - 2) Perbedaan kebudayaan
 - 3) Perbedaan kepentingan dan
 - 4) Perbedaan sosial.

Pertentangan-pertentangan yang menyangkut suatu tujuan, nilai atau kepentingan, sepanjang tidak berlawanan dengan pola-pola hubungan sosial di dalam struktur social tertentu, maka pertentangan-pertentangan tersebut bersifat positif. Masyarakat biasanya mempunyai alat-alat tertentu untuk menyalurkan benih-benih permusuhan, alat tersebut dalam ilmu sosiologi dinamakan *safety-valve institutions* yang menyediakan objek-objek tertentu yang dapat mengalihkan perhatian pihak-pihak yang bertikai ke arah lain. Bentuk-bentuk pertentangan antara lain :

- 1) Pertentangan pribadi
- 2) Pertentangan rasial dan
- 3) Pertentangan antara kelas-kelas social, umumnya disebabkan oleh karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan.
- 4) Pertentangan politik
- 5) Pertentangan yang bersifat internasional.

Akibat dari bentuk-bentuk pertentangan adalah sebagai berikut :

- 1) Bertambahnya solidaritas “in-group” atau malah sebaliknya yaitu terjadi goyah dan retaknya persatuan kelompok.
- 2) Apabila pertentangan antara golongan-golongan yang terjadi dalam satu kelompok tertentu, akibatnya adalah sebaliknya, yaitu goyah dan retaknya persatuan kelompok tersebut.
- 3) Perubahan kepribadian para individu.

- 4) Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia.
- 5) Akomodasi, dominasi dan takluknya satu pihak tertentu.

Salah satu bentuk interaksi sosial yang menjadi perhatian utama adalah konflik. Konflik merupakan fenomena sosial yang dianggap sebagai pintu masuk kearah perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan keniscayaan. Masyarakat berubah dari waktu ke waktu. Soemardjan dan Soeleman memberikan pengertian bahwa “perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap sosial dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat”¹³.

Setiap perubahan sosial menyaratkan adanya ketegangan struktural dalam masyarakat yang pada akhirnya berpotensi memunculkan konflik sosial. Karl Marx adalah sosiolog yang memperkenalkan gagasan fundamental tentang konflik. Teori Konflik dipetakan dibawah payung Paradigma Fakta Sosial yang memiliki beberapa prinsip utama yakni ¹⁴:

1. Masyarakat senantiasa terlibat dalam persaingan tanpa akhir untuk memperebutkan alat produksi.

Dalam masyarakat kapitalis, ditandai adanya persaingan antara kelas borjuis dan kelas proletar (pekerja). Kelas borjuis akan selalu berjuang untuk mempertahankan alat produksi (*means of production*) yang mereka kuasai dengan cara ‘menindas’ kelas

¹³ Soemardjan, Selo dan Soeleman, Soemardi. 1974, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta, Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia : hal.23

¹⁴ Wahyudi. 2021. *Teori Konflik dan Penerapannya Pada Ilmu-Ilmu Sosial*. Malang. Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang : hal 17-18

proletar. Sementara kelas proletar berusaha ingin naik kelas melalui upaya merebut alat produksi yang dimiliki kelas borjuis. Perjuangan kelas proletar (*class struggle*) tersebut dilakukan melalui revolusi sosial (*social revolution*). Konflik tanpa akhir antara kelas borjuis dan kelas proletar ini diprediksi baru akan berhenti jika ada perubahan kebijakan yang berupa redistribusi sumber-sumber langka yang diperebutkan.

2. Ketimpangan pendapatan (*economic gap*) terbangun dengan sendirinya dalam sistem sosial ekonomi yang kapitalistik sebagaimana dikembangkan oleh kelas borjuis

Jumlah populasi dari kelas proletar (pekerja) jauh lebih banyak dibanding dengan populasi dari kelas borjuis. Kelompok borjuis mengembangkan sistem sosial ekonomi yang kapitalistik dalam struktur masyarakat, untuk tidak memberi ruang pengaruh kelas proletar yang jumlah populasinya lebih banyak tersebut. Para eksekutif perusahaan bekerja sama untuk mendevalusi tenaga kerja kelas pekerja, dan menetapkan upah rendah. Sementara itu, pemerintah berkecenderungan membuat peraturan yang tidak berpihak pada kelas proletar. Bahkan sebaliknya, cenderung membuat kebijakan yang memungkinkan kaum borjuis memiliki akses yang sangat longgar untuk mendapatkan bantuan pendanaan yang besar.

3. Ketimpangan sosial ekonomi mendorong revolusi sosial

Seperti kelas borjuis bersekutu satu sama lain untuk menindas kelas proletar, begitu pula kelas proletar dapat mengorganisir diri mereka sendiri untuk melakukan revolusi sosial yang dramatis dan

seringkali dengan kekerasan. Marx percaya bahwa revolusi sosial sangat mungkin terjadi dalam masyarakat kapitalis karena tidak ada jalan lain bagi kelas proletar untuk keluar dari masalahnya, kecuali hanya melalui revolusi sosial. Marx memandang, bahwa dominasi kelas borjuis atas kelas proletar tersebut, bukan masalah hukum, sehingga tidak mungkin diselesaikan melalui jalur hukum. Jalan penyelesaiannya hanya satu, yakni revolusi sosial.

Keniscayaan konflik pada proses sosial menegaskan bahwa bukan konsensus yang menjadi keniscayaan realitas sosial, seperti yang dipahami Teori Fungsionalisme Struktural. Stephen K. Anderson dalam Nasrullah menyebutkan prinsip-prinsip dasar fungsionalisme struktural yang terdiri dari : a) Masyarakat merupakan sistem yang kompleks dan saling tergantung. Dan setiap bagian saling berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya; b) setiap bagian dari sebuah masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan; c) semua masyarakat memiliki mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya, yaitu mekanisme yang merekatkannya menjadi satu. Salah satu bagian dari mekanisme ini adalah komitmen para anggota masyarakat kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama; d) Masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan ekuilibrium atau homeostasis, dan gangguan pada salah satu bagian cenderung menimbulkan penyesuaian pada bagian lain agar tercapai harmoni dan stabilitas; e) Perubahan sosial merupakan kejadian yang tidak biasa dalam masyarakat. Tetapi bila itu terjadi juga maka perubahan itu pada

umumnya akan membawa kepada konsekuensi-konsekuensi yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan¹⁵.

Pada awalnya para sosiolog memandang konflik sebagai sesuatu yang negatif, hingga Lewis Coser menunjukkan bahwa “para ahli sosiologi kontemporer telah mengabaikan analisa konflik sosial, sebagai implicit melihatnya sebagai destruktif atau patologi bagi kelompok sosial. Coser selanjutnya memilih menunjukkan berbagai sumbangan konflik yang secara potensial positif untuk membentuk serta mempertahankan struktur. Dia melalcukan hal ini dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan konflik sosial, seperti karya George Simmel yang sudah diuraikan sebelumnya. Konflik adalah salah satu bentuk sosiologi yang dibahas oleh Simmel. Konflik merupakan bentuk interaksi dimana tempat waktu seperti intensitas dan merupakan bentuk interaksi dimana tempat, waktu dan intensitas dan sebagainya tunduk pada perubahan, sebagaimana dapat dilihat dalam isi segitiga yang telah berubah (dalam Aliran Geometri) Coser mengambil pemahaman atau buah karya dari Simmel dan memodifikasi proporsi dan memperluas konsep Simmel dalam mengembangkan kondisi-kondisi dimana konflik secara positif membantu struktural sosial dan bila terjadi secara negatif akan memperlemah kerangka masyarakat. Bukan saja Lewis Coser yang tidak puas dengan mengabaikan konflik dalam pembentukan Teori Sosiologi Modern, tetapi juga Ralf Dahrendorf seorang Sosiolog Jerman pada tahun 1957-1958 berkunjung ke Amerika Serikat telah menyadur kembali teori kelas dan konflik kelas ke dalam Bahasa Inggris. Seperti Coser, Dahrendorf merupakan seorang pengkritik fungsional struktural tradisional oleh karena gagal memahami masalah

¹⁵ Nasrullah, Nazsir. 2009, Teori-Teori Sosiologi. Bandung. Widya Padjadjaran : hal. 9-10

perubahan sosial. Sebagai landasan teorinya Dahrendrof tidak menggunakan teori Simmel melainkan membangun teorinya dengan setengah penolakan, separuh permintaan dan modifikasi teori sosiologi Karl Marx. Dahrendrof melihat teori konflik sebagai teori parsial, menganggap teori itu merupakan perspektif yang dapat dipakai untuk menganalisa fenomena sosial Dahrendrof menganggap masyarakat berisi ganda, memiliki sisi konflik dan sisi kerjasama (kemudian dia menyempurnakan posisi ini dengan menyatakan bahwa segala sesuatu yang dapat dianalisa dengan fungsionalisme struktural dapat pula dianalisa dengan teori konflik. Dia menegaskan bahwa proses konflik sosial merupakan kunci bagi struktural sosial”¹⁶.

Terdapat beberapa teoritikus Teori Konflik yang memberikan beragam perspektif tentang konflik sosial :

1. Teori Karl Marx

Prinsip-prinsip dasar Teori Konflik Ralf Dahrendorf dapat dijabarkan dalam beberapa poin, sebagai berikut :

- a. Konflik terlahir karena adanya struktur kelas dan pertentangan kelas yang didalamnya terjadi ketimpangan. Kelas sosial yang dimaksud adalah kelas borjuis dan proletariat.
- b. Tindakan sosial, sikap, perilaku yang didasarkan pada kepercayaan tertentu sangat bergantung pada hubungan sosial yang polanya ditentukan oleh kelas sosial dan struktur ekonomi masyarakat.
- c. Kelas Borjuasi dan proletar berada dalam suatu bangun sosial hirarkis, kaum borjuis melakukan eksploitasi terhadap kaum proletar dalam proses produksi. Eksploitasi ini akan terus berlanjut

¹⁶ Tumengkol, Selvie M. 2012. Teori Sosiologi Suatu Perspektif Tentang Teori Konflik Dalam Masyarakat Industri. Karya Ilmiah. Fakultas Ilmu Sosial & Politik. Universitas Sam Ratulangi. Manado : hal.4-5

selama kesadaran semu eksis (*false consciousness*) dalam diri proletar, yaitu berupa rasa menyerah diri, menerima kondisi apa hal telah tersedia tetap terjaga. Ketegangan hubungan sela kaum proletar dan kaum borjuis mendorong terbentuknya gerakan sosial agung, yaitu revolusi. Ketegangan tersebut terjadi bila kaum proletar telah sadar akan eksploitasi kaum borjuis terhadap mereka.

- d. Ketimpangan kelas terjadi berdasarkan kepentingan ekonomi yang saling berlawanan. Semakin tidak merata distribusi sumber daya dalam sistem sosial maka semakin besar pulalah konflik kepentingan antara kelompok dominan/kuat dengan kelompok subordinat dalam sistem sosial.
- e. Kepentingan ekonomi yang dimaksud bahwa tiap kelas berupaya untuk menguasai asset-aset produksi yang membuat mereka menjadi kelas yang dominan
- f. Pengaruh konflik kelas menyebabkan perubahan struktur sosial

2. Georg Simmel

Prinsip-prinsip dasar Teori Konflik Ralf Dahrendorf dapat dijabarkan dalam beberapa poin, sebagai berikut :

- a. Pertikaian sebagai fakta gejala sosial tidak mungkin dihindari oleh masyarakat. Bangunan sosial ditandai oleh gejala yang meliputi proses asosiatif dan disosiatif yang selalu ada dan tidak dapat dipisahkan, namun dapat dibedakan dalam analisis.
- b. Konflik tunduk pada perubahan. Coser mengembangkan proposisi dan meluaskan pemikiran Simmel tersebut dalam menggambarkan kondisi-kondisi di mana konflik secara positif membantu masyarakat bila bangunan sosialnya berjalan secara

negatif yang justru memperlemah struktur masyarakat

- c. Konflik adalah bentuk paling mendasar interaksi antar individu maupun kelompok, yang memungkinkan interaksi terus berlangsung. Suatu konflik dapat merekatkan anggota kelompok.
- d. Konflik harus didasarkan dan dibatasi oleh norma dan hukum yang menjadikan sebuah kompetisi menjadi terkontrol. Sementara Kompetisi adalah konflik yang bersifat tidak langsung.
- e. Kelompok sosial yang lebih besar, akan melokalisir konflik pada kelompok sosial yang lebih kecil dikarenakan kelompok kecil memiliki solidaritas yang lebih organis yang bisa mentolerir konflik atau mencegah konflik yang lebih besar.
- f. Konflik bukanlah bertujuan menghentikan keteraturan sosial yang menyebabkan berhentinya kehidupan masyarakat. Keteraturan dan konflik akan membentuk kesatuan atau kehidupan sosial bersama dan secara keseluruhan akan bersifat positif.
- g. Masyarakat yang sehat dan normal tidak hanya membutuhkan hubungan sosial yang bersifat integratif dan harmonis, tetapi masyarakat juga membutuhkan dan memerlukan adanya konflik.

3. Teori Ralf Dahrendorf

Prinsip-prinsip dasar Teori Konflik Ralf Dahrendorf dapat dijabarkan dalam beberapa poin, sebagai berikut :

- a. Keadaan masyarakat tidak mesti dalam keadaan harmonis, terintegrasi dan harmonis. Namun ada kondisi lain yang menunjukkan adanya konflik.
- b. Konflik terjadi disebabkan eksisnya relasi-relasi sosial dalam sistem bermasyarakat.

- c. Masyarakat terdiri dari 2 wajah yakni konflik dan konsensus yang berdialektika dalam bentuk dari konflik ke konsensus atau konsensus ke konflik.
- d. Individu atau kelompok yang tidak berhubungan dalam sebuah sistem sosial tidak akan terlibat dalam konflik sosial.
- e. Distribusi otoritas dan kekuasaan yang berbeda merupakan faktor yang menentukan bagi terciptanya konflik sosial yang sistematis.
- f. Konflik berfungsi untuk menciptakan perubahan dan perkembangan.

4. Teori Jonathan Turner

Prinsip-prinsip dasar Teori Konflik Jonathan Turner dapat dijabarkan dalam beberapa poin, sebagai berikut :

- a. Konflik adalah suatu proses dari peristiwa-peristiwa yang mengarah kepada interaksi yang disertai kekerasan antara dua pihak atau lebih (konflik berkekerasan).
- b. Konflik terbuka terjadi bergantung kepada kemampuan masing-masing pihak untuk mendefinisikan kepentingan mereka secara obyektif atau kemampuan masing-masing pihak untuk menangani, mengatur dan mengontrol kelompok itu.
- c. Sistem sosial terdiri dari unit-unit kelompok yang saling berhubungan satu sama lain. Didalam unit kelompok tersebut terdapat ketidakseimbangan pembagian kekuasaan atau sumber penghasilan. Kelompok yang tidak berkuasa dan tidak mendapat bagian dari sumber penghasilan mulai mempertanyakan legitimasi sistem tersebut. Muncullah kesadaran untuk mengubah sistem dan kesadaran ini pulalah yang membawa kemarahan yang

sering meledak begitu saja dan tidak terorganisir. Keadaan ini membuat ketegangan dan ketegangan ini eskalasinya semakin hebat yang menyebabkan mereka mencari jalan untuk mengorganisasikan diri melawan kelompok berkuasa.

5. Teori Lewis Coser

Prinsip-prinsip dasar Teori Konflik Lewis Coser dapat dijabarkan dalam beberapa poin, sebagai berikut :

- a. Konflik berfungsi untuk mempertahankan keutuhan kelompok.
- b. Konflik berfungsi untuk memperjelas batas dan menguatkan solidaritas in group pada sebuah masyarakat yang agak longgar.
- c. Konflik juga berfungsi untuk mengurangi dan menghilangkan ketegangan dalam masyarakat.
- d. Prinsip Savety Falve dalam konflik bermakna bahwa konflik skala kecil dapat mencegah terjadinya konflik berskala besar atau meredakan permusuhan.
- e. Konflik terbagi kedalam dua bentuk yakni : a) konflik realistik, berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan pada objek yang dianggap mengecewakan. b) Konflik non-realistik, konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak.
- f. Konflik tidak tidak mesti merusak atau disfungsiional bagi sistem sosial. Namun konflik

juga dapat menimbulkan konsekwensi yang bersifat positif dan konstruktif yang berfungsi integratif.

Gamin mengumpulkan beragam definisi tentang konflik sebagai berikut :¹⁷

1. Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan.
2. Konflik adalah suatu situasi yang menunjukkan adanya praktik-praktik penghilangan hak seseorang atau lebih dan atau kelompok atas suatu benda atau kedudukan.
3. Konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.
4. Konflik adalah benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, yang disebabkan adanya perbedaan nilai, status, kekuasaan, dan kelangkaan sumber daya.
5. Suatu konflik sosial terjadi ketika dua atau lebih orang atau kelompok menyatakan keyakinannya bahwa mereka mempunyai tujuan-tujuan yang tidak berkesesuaian.
6. Konflik adalah suatu perwujudan perbedaan cara pandang antara berbagai pihak terhadap obyek yang sama.

Beragam perspektif tentang konflik diatas menunjukkan variasi gagasan yang pada prinsipnya berpusat pada satu tujuan besar yakni konflik bersifat niscaya dan dibutuhkan untuk mengubah pranata sosial yang tidak adil. Pranata sosial

¹⁷ Gamin. 2014. Resolusi Konflik Dalam Pengelolaan Hutan Untuk Mendukung Implementasi REDD+. Disertasi. Pascasarjana Institut Pertanian Bogor : hal. 1

sendiri secara prinsipil tidak jauh berbeda dengan apa yang sering dikenal dengan lembaga sosial, organisasi sosial maupun lembaga kemasyarakatan, karena didalam masing-masing istilah tersebut tersirat adanya unsur-unsur yang mengatur setiap perilaku warga masyarakat. Tiga kata kunci didalam setiap pembahasan mengenai pranata sosial adalah : (a) Nilai dan norma (b) Pola perilaku yang dibakukan atau yang disebut prosedur umum; dan (c) Sistem hubungan, yakni jaringan peran serta status yang menjadi wahana untuk melaksanakan perilaku sesuai dengan prosedur umum yang berlaku¹⁸.

Pranata sosial adalah sistem-sistem yang menjadi wahana yang memungkinkan warga masyarakat itu untuk berinteraksi menurut pola-pola resmi atau suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya Koentjaraningrat menyebutkan tujuan pranata sosial sebagai berikut¹⁹ :

- a. Memenuhi kebutuhan sosial dan kekerabatan (*kinship atau domestic institutions*)
- b. Memenuhi kebutuhan manusia untuk mata pencaharian hidup, memproduksi, menimbun dan mendistribusikan harta benda (*economic institutions*)
- c. Memenuhi kebutuhan pengetahuan dan pendidikan manusia (*educational institutions*)
- d. Memenuhi kebutuhan ilmiah manusia (*scientific institutions*)
- e. Memenuhi kebutuhan manusia untuk menyatakan rasa keindahan dan rekreasi (*aesthetic and recreational institutions*)

¹⁸ Narwoko, JD dan Suyanto B, 2004. Sosiologi Teks, Pengantar dan Terapan edisi ketiga. Prenada Media Grup. Jakarta : hal.216

¹⁹ Koentjaraningrat, 1979. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta. Penerbit Aksara Baru : hal.50

- f. Memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan (*religius institutions*)
- g. Memenuhi kebutuhan manusia untuk mengatur kebutuhan berkelompok atau bernegara (*political institutions*).
- h. Mengurus kebutuhan jasmani manusia (*somatic institutions*)

Fungsi khusus pranata sosial pada dasarnya menciptakan harmonisasi dan stabilitas sistem sosial. Namun pada tingkat tertentu pranata sosial masyarakat dianggap tidak mampu lagi menopang perkembangan masyarakat. Oleh karena itu penting untuk memahami sebab musabab konflik, yang terdiri atas :²⁰

- a. Perbedaan antar perorangan atau antar kelompok yang acap kali menimbulkan benturan-benturan.
- b. Perbedaan kebudayaan yang berpengaruh pada perbedaan kepribadian seseorang atau kelompok, sebab karakter kebudayaan akan berpengaruh dalam membentuk karakter kepribadian manusia dalam kehidupan sosialnya.
- c. Bentrokan antar kepentingan. Bentrokan atau benturan kepentingan dilatarbelakangi oleh pertentangan. Kepentingan manusia baik secara individu maupun kelompok bentuknya beragam antara lain kepentingan ekonomi, politik status (jabatan) dan sebagainya. Benturan antar kepentingan ini dipicu oleh keinginan agar orang lain atau kelompok lain berperilaku sesuai dengan seleranya, begitu pula sebaliknya. Masing-masing kehendak dan kepentingan saling bertemu dalam

²⁰Elly M Setiadi & Usman Kolip. 2011. Pengantar Sosiologi. Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya. Cet. II. Jakarta. Penerbit Kencana : hal. 91-92

kehidupan kelompok akhirnya menghasilkan produk sosial berupa bentrokan antar kepentingan.

- d. Perubahan-perubahan sosial yang meliputi perubahan nilai dan norma sosial. Ada dua sikap dalam mengsikapi perubahan yakni menerima atau menolak perubahan. Yang menerima perubahan tentunya menginginkan agar pola-pola kehidupan sosial harus diubah karena berbagai sebab karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Sementara yang menolak perubahan akan menganggap bahwa perubahan akan merusak nilai dan norma kehidupan sosial leluhurnya. Kedua kelompok saling berhadapan sehingga menimbulkan pengotak-ngotakan antara yang pro perubahan dan kontra perubahan.

Konflik yang eskalasinya besar dapat membuat pranata sosial bisa berubah termasuk didalamnya berubahnya lembaga-lembaga sosial yang mapan. Pranata atau institusi adalah norma atau aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus. Norma/aturan dalam pranata berbentuk tertulis (undang-undang dasar, undang-undang yang berlaku, sanksi sesuai hukum resmi yang berlaku) dan tidak tertulis (hukum adat, kebiasaan yang berlaku, sanksinya ialah sanksi sosial/moral (misalkan dikucilkan). Pranata bersifat mengikat dan relatif lama serta memiliki ciri-ciri tertentu yaitu simbol, nilai, aturan main, tujuan, kelengkapan, dan umur. Institusi dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu :²¹

1. Institusi formal adalah suatu institusi yang dibentuk oleh pemerintah atau oleh swasta yang mendapat pengukuhan secara resmi serta mempunyai aturan-aturan tertulis/resmi. Institusi formal dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu :

²¹ Wursanto.2003. Dasar-dasar Ilmu Organisasi. Yogyakarta.Penerbit Andi : hal.45

2. Institusi pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan suatu kebutuhan yang karena tugasnya berdasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan melakukan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan kebahagiaan kesejahteraan masyarakat. Institusi Pemerintah atau Lembaga Pemerintah dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
 - a. Lembaga pemerintah yang dipimpin oleh seorang menteri.
 - b. Lembaga pemerintah yang tidak dipimpin oleh seorang menteri, dan bertanggung jawab langsung kepada presiden (disebut Lembaga Pemerintah Non-Departemen). Contoh : Lembaga Administrasi Negara dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
3. Institusi swasta adalah institusi yang dibentuk oleh swasta (organisasi swasta) karena adanya motivasi atau dorongan tertentu yang didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Institusi atau lembaga ini secara sadar dan ikhlas melakukan kegiatan untuk ikut serta memberikan pelayanan masyarakat dalam bidang tertentu sebagai upaya meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Contoh : Yayasan Penderita Anak Cacat, Lembaga Konsumen, Lembaga Bantuan Hukum, Partai Politik.
4. Institusi non-formal adalah suatu institusi yang tumbuh di masyarakat karena masyarakat membutuhkannya sebagai wadah untuk menampung aspirasi mereka. Ciri-ciri institusi non-formal antara lain:
 - a. Tumbuh di dalam masyarakat karena masyarakat membentuknya, sebagai wadah untuk menampung aspirasi mereka.

- b. Lingkup kerjanya, baik wilayah maupun kegiatannya sangat terbatas.
- c. Lebih bersifat sosial karena bertujuan meningkatkan kesejahteraan para anggota.
- d. Pada umumnya tidak mempunyai aturan-aturan formal (Tanpa anggaran dasar/Anggaran rumah tangga)

Meskipun demikian, karena pranata sosial memiliki fungsi sebagai kontrol sosial maka didalam pranata sosial terdapat juga cara menangani konflik termasuk memberantasnya. Pranata sosial memerlukan kontrol sosial yang berfungsi sebagai alat agar anggotanya taat dan patuh terhadap norma yang telah ditentukan. Kontrol sosial dapat dilakukan melalui preventif yaitu dengan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keyakinan terhadap kebenaran suatu norma. Selain itu, kontrol sosial dapat juga dilakukan dengan penanggulangan/ referensif dengan jalan persuatif/ bujukan dan hukuman sanksi/ paksaan.²²

Adanya kontrol sosial menandakan bahwa konflik pada tingkat tertentu adalah anomali keteraturan sosial. Terkhusus bagi kalangan penganut teori struktural fungsional. *“Structural functionalism, or in many contexts simply functionalism, is a broad perspective in sociology and anthropology which sets out to interpret society as a structure with interrelated parts. Functionalism addresses society as a whole in terms of the function of its constituent elements; namely norms, customs, traditions and institutions. A common analogy, popularized by Herbert Spencer, presents these parts of society as “organs” that work toward the proper functioning*

²² Raho, Bernard. 2007, Teori Sosiologi Modern, Jakarta. Prestasi Pustaka : hal.72

of the "body" as a whole"²³. Sementara Stephen K. Anderson menyebutkan bahwa Teori Fungsionalisme Struktural memiliki prinsip-prinsip dasar, sebagai berikut : a) Masyarakat merupakan sistem yang kompleks dan saling tergantung. Dan setiap bagian saling berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya; b) setiap bagian dari sebuah masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan;c) semua masyarakat memiliki mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya, yaitu mekanisme yang merekatkannya menjadi satu. Salah satu bagian dari mekanisme ini adalah komitmen para anggota masyarakat kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama; d) Masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan ekuilibrium atau homeostasis, dan gangguan pada salah satu bagian cenderung menimbulkan penyesuaian pada bagian lain agar tercapai harmoni dan stabilitas; e) Perubahan sosial merupakan kejadian yang tidak biasa dalam masyarakat. Tetapi bila itu terjadi juga makaperubahan itu pada umumnya akan membawa kepada konsekuensi-konsekuensi yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan²⁴

Konflik, bagi Fungsionalisme Struktural, adalah bentuk disfungsi sosial yang disebabkan oleh hilangnya legitimasi, melemahnya kekuasaan, perebutan sumber daya terbatas, kohesivitas sosial semakin lemah, adanya ideologi tanding yang semakin menguat dan melemahnya modal sosial.

Penekanan pada azas organis yang mengandaikan keteraturan sebagai sifat dasar masyarakat menyebabkan fungsionalisme struktural berpandangan bahwa konflik

²³ Barnard, A. 2000. *History and Theory in Anthropology*. Cambridge: CUP

²⁴ Nasrullah, Nazsir. 2009, *Teori-Teori Sosiologi*. Bandung. Widya Padjadjaran : hal.9-10

adalah sejenis anomaly dalam perkembangan masyarakat. Meskipun demikian Fungsionalisme struktural tidaklah menafikan adanya konflik dalam realitas sosial. Konflik menandakan adanya masalah dalam suatu sistem sosial.

Konflik pada akhirnya adalah fase yang mesti dilewati sebagai konsekwensi dari perubahan sosial yang tak terelakkan. Namun karena fungsionalisme struktural meyakini bahwa masyarakat pasti akan kembali pada kondisi equilibrium. Proses penanganan konflik, bagi fungsionalisme struktural, mestilah dilakukan bertahap (evolutive) tidak dengan gerakan revolusioner seperti yang dipahami oleh Teori Konflik.

Watak evolutive terdapat pada 4 bentuk perubahan sistem : 1) Proses penyeimbangan sistem; berlangsung di dalam sistem itu sendiri. Proses ini dilakukan sebagai adaptasi di antara elemen-elemen yang berubah. 2) Perubahan struktural dalam sistem sosial; bentuk-bentuk perubahan bersifat fundamental sehingga akan memberikan yang mendasar dan luas pengaruhnya pada sistem sosial. 3) Diferensiasi struktural; merupakan perubahan dalam sistem sosial yang berlangsung pada satu sub sistem atau lebih tetapi tidak menimbulkan perubahan secara keseluruhan. 4) Evolusi; merupakan perubahan dalam sistem sosial yang berlangsung sepanjang waktu, pelan-pelan dan melekat dalam dinamika sehari-hari. Perubahan jenis ini seringkali terjadi tidak terasakan oleh aktor-aktor dalam sistem²⁵.

Konflik sosial meski sesuatu fakta sosial yang tak terelakkan digerakkan oleh *collective action* yang tiga hal pokok yang fundamental yaitu; 1) kepentingan (*interest*), 2) kapasitas (*capacity*), dan kesempatan (*opportunity*). Menurut

²⁵ Kusmanto, Thohir Yuli & Misbah Zulfa Elizabeth. 2018. Struktur dan Sistem Sosial pada Aras Wacana dan Praxis. JSW : Jurnal Sosiologi Walisongo. Vol. 2. No 1 : hal. 48

penulis, masih ada faktor lain yang ikut mempengaruhi terjadi tindakan konflik, diantaranya *power* (kekuatan), *threat* (ancaman), dan *facility* (dukungan), baik dalam bentuk materiil maupun non materiil. Tentu dalam pencapaian ini tidak bisa lepas dari peranan aktor (*agent*), sebagai bentuk tindakan sosial²⁶.

Tindakan sosial yang dilakukan agen sangat mempengaruhi eskalasi konflik. Ritzer menyebutkan 4 jenis tindakan sosial :²⁷

1. *Zwerk Rational* yaitu tindakan sosial murni. Dalam tindakan ini aktor tidak hanya sekedar menilai cara yang terbaik untuk mencapai tujuannya tapi juga menentukan nilai dari tujuan itu sendiri. Tujuan dalam *zwerk rational* tidak absolut. Ia dapat juga menjadi cara dari tujuan lain berikutnya. Bila aktor berkelakuan dengan cara yang paling rasional maka mudah memahami tindakannya itu.
2. *Werk Rational action*. Dalam tindakan tipe ini aktor tidak dapat menilai apakah cara-cara yang dipilihnya itu merupakan yang paling tepat ataukah lebih tepat untuk mencapai tujuan yang lain. Ini menunjuk kepada tujuan itu sendiri. Dalam tindakan ini memangantara tujuan dan cara-cara mencapainya cenderung menjadi sukar untuk dibedakan. Namun tindakan ini rasional, karena pilihan terhadap cara-cara kiranya sudah menentukan tujuan yang diinginkan. Tindakan tipe kedua ini masih rasional meski tidak serasional yang pertama. Karena itu dapat dipertanggungjawabkan untuk dipahami.

²⁶ Agung, Dewa Agung Gede. 2015. Pemahaman Awal Terhadap Anatomi Teori Sosial dalam Perspektif Struktural Fungsional dan Struktural Konflik. Sejarah & Budaya. Tahun Kesembilan. No. 2 : hal.167

²⁷ Ritzer, George. 2010. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta. Rajawali Press : hal.47

3. *Affectual Action*. Tindakan yang dibuat-buat. Dipengaruhi oleh perasaan emosi dan kepura-puraan si aktor. Tindakan ini sukar dipahami. Kurang atau tidak rasional
4. *Traditional Action*. Tindakan ini didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan dalam mengerjakan sesuatu di masa lalu saja

Tindakan sosial yang didasarkan pada afeksi dan tradisional dapat dianggap memiliki peluang yang besar menciptakan konflik dibanding tindakan rasional. Bagaimanapun juga Teori Tindakan Sosial dapat digunakan untuk menganalisis proses sosial termasuk didalamnya konflik. *“The Social Action Theory is a community-oriented model that is used to increase the problem-solving ability of entire communities through achieving concrete changes towards social justice. That is, individuals within communities come together to redress the imbalance of powers or privileges between a disadvantaged group and society at large”*.²⁸

Meskipun tindakan sosial bisa menjadi determinan konflik sosial namun tindakan sosial pun dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk menyelesaikan masalah problem-problem sosial serta menciptakan keadilan sosial bagi seluruh anggota komunitas. Caranya, dengan pelibatan seluruh anggota untuk memperbaiki persoalan ketidakadilan yang disebabkan oleh tidak berimbangannya kekuasaan antara kelompok yang diuntungkan dengan kelompok yang dirugikan.

Tindakan sosial sangat menentukan hasil interaksi sosial yang dihasilkan. Tindakan sosial tentu saja memiliki

²⁸ Minkler, M., Wallerstein, N., Wilson, N. 2009. *Improving Health Through Community organization and Community Building*. Glanz, K. *Health Behavior and Health Education: Theory, Research, and Practice*. San Francisco. John Wiley & Sons : pg. 291

tujuan-tujuan spesifik yang diruang publik terkadang bertabrakan. Weber menyatakan bahwa perkembangan dari suatu hubungan sosial dapat diterangkan melalui tujuan-tujuan dari manusia yang melakukan hubungan sosial itu dimana ketika ia mengambil manfaat dari tindakannya, sepanjang tindakan yang dimaksud menyatakan keterlibatan manusia secara individual dikategorikan sebagai fakta sosial.²⁹

Konflik akan tumbuh subur jika suatu tindakan diarahkan oleh sebuah status dan peran sosial yang berbeda dan bertentangan. Peran (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Sebagaimana kedudukan, maka setiap orangpun dapat mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti pula bahwa peran tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran sangat penting karena karena dapat mengatur perikelakuan seseorang, disamping itu peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilukunya sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.³⁰

²⁹ Narwoko, JD dan Suyanto B, 2004. Sosiologi Teks, Pengantar dan Terapan edisi ketiga. Prenada Media Grup. Jakarta : hal. 56

³⁰ Ibid : hal.158

Peranan sosial dapat diklasifikasi dalam beberapa bagian, sebagai berikut :³¹

1. Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - a. Peranan yang diharapkan (*expected roles*): cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. Peranan jenis ini antara lain peranan hakim, peranan protokoler diplomatik dan sebagainya.
 - b. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.
2. Berdasarkan cara memperolehnya, peranan bisa dibedakan menjadi :
 - a. Peranan bawaan (*ascribed roles*), yaitu peranan yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha, misalnya peranan sebagai nenek, anak, bupati dan sebagainya
 - b. Peranan pilihan (*achives role*), yaitu peranan yang diperoleh atas dasar keputusannya sendiri, misalnya seseorang yang memutuskan untuk memilih kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga dan menjadi mahasiswa program studi sosiologi.

³¹ Ibid : hal.160

Setiap individu dalam kelompoknya akan memiliki peran sosial yang berbeda. Jika peran tersebut dimiliki oleh anggota kelompok dengan status sosial yang tinggi maka besar kemungkinan peran kelompok akan diarahkan oleh peran dan tujuan sekelompok orang dengan status tinggi dan berpengaruh. Bila peran dan tujuan kelompok berbeda maka disitulah konflik disemai. Peranan sosial sifatnya sangat dinamis begitu pula dampak yang ditimbulkannya.

Peranan sosial sebagai aspek dinamis kedudukan (statis) la seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Dalam sosiologi dan antropologi, status sosial adalah kehormatan atau *prestise* yang dimiliki seseorang dalam masyarakat (satu posisi sosial). Status sosial berkaitan dengan suatu tingkat atau posisi yang dimiliki seseorang dalam sebuah kelompok, misalnya anak atau anak perempuan, teman bermain, anak-anak dan sebagainya. Status sosial, yang merupakan posisi atau tingkatan seseorang atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan dengan dua jalan. Seseorang dapat memperoleh status sosialnya berdasarkan prestasinya sendiri, yang biasa dikenal dengan status yang dicapai dengan usaha atau status pilihan. Alternatifnya, adalah seseorang dapat ditempatkan dalam sistem stratifikasi dengan posisi yang terberi dan turunan atau bawaan, yang biasa dikenal dengan istilah status bawaan. Status bawaan dapat juga didefinisikan sebagai kedudukan seseorang yang sifatnya tetap berdasarkan kelahiran. Status bawaan ada dalam setiap masyarakat termasuk didalamnya status bawaan yang berdasarkan atas seks, umur, ras dan etnis dan latar belakang keluarga. Orang yang terlahir dari keluarga kaya yang ditandai dengan ciri-ciri

seperti popularitas, bakat dan nilai-nilai tinggi akan memiliki harapan yang banyak dalam pertumbuhannya. Oleh karena itu, mereka diberikan dan diajarkan peran sosial karena mereka diposisikan secara sosial dalam keluarga yang dilengkapi dengan semua sifat-sifat dan karakteristik diatas. Status yang diraih adalah status yang individu peroleh selama seumur hidupnya sebagai akibat dari pelaksanaan pengetahuan, keterampilan kemampuan, dan/atau ketekunan. Pekerjaan memberikan contoh status yang mungkin diperoleh dari turunan atau yang tercapai. Pekerjaan dapat dicapai oleh seseorang dengan pengetahuan yang benar yang dimilikinya dan keterampilan yang dengan itu dia diposisikan pada posisi sosial yang lebih tinggi dari pekerjaan itu, pekerjaan mampu membangun identitas seseorang dan status sosial mereka dalam masyarakat.³²

Konflik sebagai bentuk pengejawantahan status dan peranan sosial yang berbeda menunjukkan kemampuan aktor sosial dalam menciptakan keteraturan atau konflik sosial. Aktor sosial adalah determinan utama penentu bentuk interaksi sosial. Aktor sosial adalah agen yang memiliki kebebasan dan kemampuan menginterpretasikan simbol-simbol. Hasil interpretasi terhadap simbol sangat menentukan bentuk interaksi sosial baik berupa kerjasama maupun konflik.

Pandangan diatas adalah khas perspektif Teori Interaksionisme Simbolik. Inti pandangan pendekatan teori interaksionisme simbolik ini adalah individu sebagai suatu hal yang paling penting dalam konsep sosiologi, sebagai obyek yang bisa secara langsung ditelaah dan dianalisis melalui interaksinya dengan individu yang lain. Interaksi manusia dimediasi oleh penggunaan simbol-simbol, oleh

³² Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada : hal.265

interpretasi, atau oleh penetapan makna dari tindakan orang lain yang ekuivalen dengan pelibatan proses interpretasi antara stimulus dan respon dalam kasus perilaku manusia.

Pendekatan interaksionisme simbolik memberikan banyak penekanan pada individu yang aktif dan kreatif dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan teoritis lainnya. Gagasan teori interaksionisme simbolik menjadi sebuah label untuk sebuah pendekatan yang relatif khusus pada ilmu dari kehidupan kelompok manusia dan tingkah laku manusia. Banyak ilmuwan yang telah menggunakan pendekatan ini dan memberikan kontribusi intelektualnya, di antaranya George Herbert Mead, John Dewey, W.I Thomas, Robert E.Park, William James, Charles Horton Cooley, Florian Znaniceki, James Mark Baldwin, Robert Redfield dan Louis Wirth.³³

Ada 7 asumsi utama perspektif interaksionisme simbolik sebagai berikut :³⁴

1. Kemampuan untuk berpikir. Individu-individu didalam masyarakat tidak dilihat sebagai makhluk-makhluk yang dimotivasi oleh aktor-aktor dari luar kontrol mereka untuk bertindak. Sebaliknya mereka melihat manusia sebagai makhluk yang reflektif dan karena itu bisa bertingkah laku secara reflektif.
2. Berpikir dan berinteraksi. Orang memiliki hanya kemampuan untuk berpikir yang bersifat umum. Kemampuan ini mesti dibentuk dalam proses interaksi sosial. Pandangan ini mengantar interaksionisme simbolik untuk memperhatikan satu bentuk khusus dari interaksi sosial, yakni sosialisasi. Bagi

³³ Prayitno, Ujianto Singgih. 2015. Etnisitas dan Agama di Kota Surabaya : Interaksi Masyarakat Kota dalam Perspektif Interaksionisme Simbolik. Aspirasi. Vol 6. No.2 : hal.121

³⁴ Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta. Prestasi Pustaka Publisher : hal. 106

interaksionisme simbolik, sosialisasi adalah proses yang bersifat dinamis. Didalam proses itu, manusia tidak cuma menerima informasi melainkan dia mengintepretasi dan menyesuaikan informasi itu sesuai kebutuhannya.

3. Pembelajaran makna simbol-simbol. Dalam interaksi sosial, orang belajar simbol-simbol dan arti-arti. Kalau orang memberikan reaksi terhadap tanda-tanda tanpa berpikir panjang maka dalam memberikan reaksi kepada simbol-simbol, orang harus terlebih dahulu berpikir. Tanda mempunyai arti didalam diri mereka sendiri, misalnya gerak-gerik dari anjing yang marah adalah tanda bahwa ia marah. Sedangkan simbol adalah obyek sosial yang digunakan untuk mewakili (*take place of*) apa saja yang disepakati untuk diwakilinya, misalnya, bendera merah putih adalah lambing bangsa Indonesia.
4. Aksi dan interaksi. Perhatian utama dari interaksionisme simbolik adalah dampak dari arti-arti dan simbol-simbol dalam aksi dan interaksi manusia.
5. Membuat pilihan-pilihan. Oleh karena kemampuan untuk mengerti arti dan simbol-simbol maka manusia bisa melakukan pilihan terhadap tindakan-tindakan yang diambil. Manusia tidak perlu menerima begitu saja arti-arti dan simbol-simbol yang dipaksakan kepada mereka. Sebaliknya, mereka bisa bertindak berdasarkan intepretasi yang mereka buat sendiri terhadap situasi itu. Dengan kata lain, manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan arti baru kepada situasi itu.
6. Diri atau *Self*. *Self* adalah konsep yang teramat penting bagi interaksionisme simbolik. Guna memahami konsep ini, kita harus terlebih dahulu memahami ide

looking glass self yang dikembangkan oleh Charles Horton Cooley. Apa yang dimaksudkan dengan *looking glass self* oleh Cooley adalah bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk melihat diri sendiri sebagai halnya kita melihat obyek sosial lainnya. Ide tentang *looking glass self* ini dapat dipecah-pecahkan ke dalam tiga komponen, yakni : pertama, kita membayangkan bagaimana kita menampakkan diri kepada orang-orang lain; kedua, kita membayangkan bagaimana penilaian mereka terhadap penampilan kita; ketiga, bagaimana kita mengembangkan semacam perasaan tertentu sebagai akibat dari bayangan kita tentang penilaian orang itu. Blumer mengartikan *self* secara sangat sederhana. Menurut dia, *self* semata-mata berarti bahwa manusia bisa menjadi obyek dari tindakannya sendiri. Dia berbuat sesuatu terhadap dirinya sendiri dan mengarahkan dirinya dalam tindakan tertentu. *Self* memungkinkan manusia bisa berbuat sesuatu dan bukan cuma bereaksi terhadap rangsangan atau stimuli yang berasal dari luar.

7. Kelompok-kelompok dan masyarakat. Menurut Blumer, masyarakat tidak terbuat dari struktur-struktur yang bersifat makro. Esensi dari masyarakat harus ditemukan di dalam aktor-aktor dan tindakannya. Kehidupan kelompok adalah keseluruhan tindakan yang sedang berlangsung. Namun demikian masyarakat tidak dibuat dari tindakan yang terisolasi. Disana ada tindakan yang bersifat kolektif yang melibatkan individu-individu yang menyesuaikan tindakan mereka terhadap satu sama lain. Dengan kata lain, mereka saling mempengaruhi dalam melakukan tindakan. Mead menyebut hal ini sebagai *social act* (perbuatan sosial)

dan Blumer menyebutnya *join action* (tindakan bersama).

Kemampuan yang dimiliki aktor sosial inilah yang dianggap berpotensi menimbulkan konflik sosial. Kesalahpahaman dalam tindak interpretasi akan menghasilkan pola konfliktual dalam hubungan sosial. Nugroho menyatakan “Esensi utama dari interaksionisme simbolik itu sendiri adalah fokus mempelajari hakikat interaksi, yang merupakan aktivitas sosial manusia yang dinamis. Perspektif ini mengasumsikan bahwa individu pada dasarnya aktif, reflektif dan kreatif, menafsirkan dan menampilkan perilaku yang kompleks dan tak terduga. Singkatnya, perspektif interaksi simbolik menolak gagasan bahwa individu adalah organisme pasif yang perilakunya ditentukan oleh kekuatan atau struktur yang ada di luar dirinya. Individu adalah makhluk hidup yang dinamis dan terus berubah. Karena individu ini adalah elemen utama masyarakat, itu berarti bahwa masyarakat berubah melalui interaksi antara individu-individu tersebut. Singkatnya, interaksi ini dipandang sebagai variabel penting dalam menentukan perilaku manusia dan bukan sebagai pengaruh pada struktur masyarakat. Struktur masyarakat itu sendiri dapat diciptakan dan dipengaruhi oleh interaksi manusia. Fenomenologi Schütz juga setuju dengan pemahaman ini, yang mengatakan bahwa tindakan, ucapan, dan interaksi individu merupakan prasyarat bagi keberadaan sosial setiap manusia. Schütz percaya bahwa pengetahuan kategori pertama ini pada dasarnya bersifat pribadi dan unik bagi

setiap individu ketika berinteraksi tatap muka dengan orang lain”³⁵.

Tiga teori klasik sosiologi yakni Teori Konflik, Teori Fungsionalisme Struktural dan Teori Interaksionisme simbolik memiliki pandangan khas tentang konflik sosial. Dua teori yakni Teori Konflik dan Fungsionalisme Struktural memusatkan perhatiannya pada determinan struktural terjadinya konflik sosial sementara Teori Interaksionisme Simbolik memusatkan perhatiannya pada individu sebagai determinan utama konflik sosial. Kedua pendekatan ini, tentunya mendistorsi kompleksitas konflik sosial.

Sosiologi kontemporer menawarkan sebuah pendekatan yang menolak dikotomi struktural versus individu. Salah satu teori yang memiliki penjelasan adalah Teori Praktek Sosial Pierre Bourdieu. Bourdieu bisa digolongkan sebagai pelanjut tradisi Marxian. Tepatnya Bourdieu seorang Neo-Marxis yang melakukan kritik terhadap prinsip dasar gagasan Marxis. Gagasannya tentang konflik sosial tergambar dalam Teori Praktek Sosial. Teori ini memiliki formula : (habitus x modal) + ranah. Formula ini berupaya menguraikan reproduksi struktur sosial penyebab hubungan kekuasaan yang tidak berimbang. *“Peran budaya mereproduksi struktur-struktur sosial atau cara dimana hubungan kekuasaan tidak setara diterima sebagai sesuatu yang sah dan bukannya tidak diketahui”*.³⁶

Pola hubungan kekuasaan yang tidak berimbang mengarahkan konflik yang sifatnya laten menuju bentuknya yang manifest. Ranah atau arena dalam skema formula Bourdieu adalah ruang dimana proses persaingan antar

³⁵ Nugroho, Ari Cahyo. 2021. Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksionisme Simbolik). Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa. Vol. 2 No. 2 : hal 192

³⁶ Bourdieu, Pierre. 2010. *Arena Produksi Kultural; Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. Jogjakarta: Kreasi Wacana : hal.ix

kelompok sosial terjadi. Bourdieu dalam Hurtardo (2010:54) menyatakan bahwa field adalah : “As a networks of social relations, structured systems of social positions, within which struggles or maneuvers take place over resources, stakes and access”³⁷. Arena diartikan sebagai jejaring hubungan sosial, sistem posisi-posisi sosial yang terstruktur, yang melaluinya persaingan atau manuver-manuver terjadi untuk memperebutkan sumber daya, status dan akses. Arena adalah ruang dimana keniscayaan konflik terjadi. Ranah merupakan: (1) arena kekuatan sebagai upaya perjuangan untuk memperebutkan sumber daya atau modal dan juga untuk memperoleh akses tertentu yang dekat dengan hirarki kekuasaan; (2) semacam hubungan yang terstruktur dan tanpa di sadari mengatur posisi-posisi individu dan kelompok dalam tatanan masyarakat yang terbentuk secara spontan.³⁸

Proses persaingan tersebut dalam kacamata Bourdieu disebut proses kontestasi. Klinken menyatakan ada 5 proses kunci kontestasi, sebagai berikut: “Pertama, *identity formation* (pembentukan identitas), yaitu bagaimana suatu identitas bersama dapat terbentuk pada sebuah kelompok sehingga menciptakan tindakan kolektif? Kedua, *scale shift* (eskalasi), yaitu bagaimana sebuah konflik yang mulanya kecil mengalami eskalasi sehingga melibatkan aktor-aktor yang jauh lebih banyak? Ketiga, *polarization* (polarisasi), yaitu bagaimana ruang politik antar pihak yang saling berseteru meluas ketika mereka saling menjauh menuju kedua titik ekstrim dan tidak ada pihak yang berada pada posisi moderat? Keempat, *mobilization* (mobilisasi), yaitu bagaimana orang yang biasanya apatis (acuh-tak acuh) dapat

³⁷ Hurtardo, Pedro.S. 2010. Assessing the use of Bourdieu's key concepts in the strategy-as-practice field. *Competitiveness Review An International Business Journal incorporating Journal of Global Competitiveness* 20(1): pg.54

³⁸ Adib, Muhammad. 2012. Agen dan Struktur dalam Pandangan Pierre Bourdieu. *BioKultur*. Vol.I.No.2 : hal 102-103

digerakkan untuk ikut serta dalam gerakan? Kelima, *actor constitution* (pembentukan aktor), yaitu bagaimana sebuah kelompok yang sebelumnya tidak terorganisasi atau apolitis berubah menjadi sebuah aktor politik tunggal?”³⁹

Kontstasi yang terjadi dalam praktek sosial sangat bergantung pada habitus dan modal yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Habitus pada prinsipnya adalah sistem pengetahuan yang ada pada diri aktor sosial yang digunakannya untuk berhubungan dengan dunia sosialnya. Habitus sendiri oleh Bourdieu didefinisikan sebagai “Habitus adalah struktur mental atau kognitif yang dengannya orang berhubungan dengan dunia sosial. Orang dibekali dengan serangkaian skema terinternalisasi yang mereka gunakan untuk mempersepsi, memahami, mengapresiasi, dan mengevaluasi dunia sosial. Melalui skema ini, orang menghasilkan praktik mereka, mempersepsi dan mengevaluasinya. Secara dialektif, habitus adalah “produk dari internalisasi struktur” dunia sosial. Habitus diperoleh sebagai akibat dari ditempatinya posisi di dunia sosial dalam waktu yang panjang”⁴⁰. Kleden menyebutkan 7 elemen penting habitus, sebagai berikut :⁴¹

1. Habitus merupakan produk sejarah. Habitus pada waktu tertentu telah diciptakan sepanjang perjalanan sejarah: “Habitus, produk sejarah, menghasilkan praktik individu dan kolektif, dan sejarah, sejalan dengan skema yang digambarkan oleh sejarah”. Habitus yang termanifestasikan pada individu tertentu diperoleh dalam proses sejarah individu dan merupakan fungsi dari titik temu dalam sejarah sosial tempat ia terjadi. Habitus

³⁹ Permana, Yogi Setya. 2010. Kontestasi Abangan-Santri Pasca Orde Baru di Pedesaan Jawa. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol 14 (1) : hal.66

⁴⁰ Op.cit : hal.96-97

⁴¹ Ibid : hal 97-102

bersifat tahan lama sekaligus dapat dialihkan yaitu dapat digerakkan dari satu arena ke arena lainnya. Sebagai contoh, sopir yang melajukan kendaraan di jalan raya pada posisi sebelah kiri. Menjalankan kendaraan pada posisi sebelah kiri, jelas-jelas telah menjadi sebuah “sistem atau perangkat disposisi yang bertahan lama dan diperoleh melalui latihan berulang kali”. Kita tidak tahu dengan pasti, kapan mulai terjadi. Tetapi jelas bahwa mula-mula kebiasaan tidak begitu saja terjadi. Selain itu, pembentukannya perilaku itu butuh upaya yang berkelanjutan dan dalam sebuah proses yang tidak pendek. Yang jelas, ia sudah bertahan sangat lama, sampai sekarang pun di sejumlah negara juga melakukan seperti itu termasuk di Indonesia.

2. Habitus merupakan struktur yang dibentuk dan membentuk. Habitus menghasilkan dan dihasilkan oleh dunia sosial. Di satu sisi, habitus “menstrukturkan struktur”; artinya, habitus adalah struktur yang menstrukturkan dunia sosial. Disisi lain, dia adalah “struktur yang terstrukturkan”; artinya habitus adalah yang distrukturkan oleh dunia sosial. Meskipun habitus adalah satu struktur terinternalisasi yang menghambat pikiran dan pilihan bertindak, ia tidak menentukannya. Tiadanya determinisme ini adalah salah satu hal utama yang membedakan posisi Bourdieu dari posisi strukturalis arus utama. Habitus sekedar “menyarankan” apa yang seharusnya dipikirkan orang dan apa yang seharusnya mereka pilih untuk dilakukan. Contoh, melajukan (menyopir) kendaraan di jalan raya di sebelah kiri memastikan keberadaan struktur yang distrukturkan. Orang menjadi nyaman dengan struktur yang telah tertata seperti ini. Kenyamanan itu menjamin hilangnya rasa kekhawatiran akan perilaku sopir lain dari arah

berlawanan yang juga melajukan kendaraan dari arah sebelah kiri mereka. Struktur ini telah tertata sebelum misalnya kira belum bisa menyopir kendaraan, tetapi saat itu kendaraan yang membawa kita disopiri oleh orang lain yang juga melajukan kendaraan di sebelah kiri. Jadi ia lahir dari kondisi sosial tertentu dan karena itu menjadi struktur yang sudah diberi bentuk terlebih dahulu oleh kondisi sosial dimana dia diproduksi.

3. Struktur yang menstrukturkan. Karena sudah menjadi kebiasaan, melajukan kendaraan di sebelah kiri, bagi para aktor, menjadi sebuah disposisi yang terstruktur. Ia telah menjadi kesadaran dan sikap yang “tertanam” dalam diri. Pada gilirannya kebiasaan itu “berfungsi sebagai kerangka yang melahirkan dan memberi bentuk kepada persepsi, presentasi dan tindakan seseorang”. Karena telah ditumbuh kembangkan maka tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan berjalan (melajukan kendaraan) di jalan (raya), akan dikerangkai oleh, atau disesuaikan dengan kebiasaan berjalan di lajur sebelah kiri ini. Konstruksi mobil dibuatnya setir (kemudi) di sebelah kanan yang juga dilakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sebelah kanan, agar dapat mudah dilihat oleh sopir yang posisi kemudinya di sebelah kanan kendaraan. Tegasnya, kebiasaan berjalan di lajur sebelah kiri menjadi penentu dari tindakan-tindakan selanjutnya. Bahkan tanpa sepenuhnya disadari, bila kita mampu membeli suatu barang di toko, misalnya minuman atau mampir di pom bensin, khususnya bila belum ditentukan sebelumnya, pilihan pertama adalah toko yang ada di sebelah kiri dari jalan yang kita lalui. Pilihan ini adalah berkaitan dengan kepraktisan, juga erat hubungannya dengan persepsi. Dapat pula diartikan, disebabkan kita berjalan di lajur sebelah kiri sudah menjadi persepsi,

berjalan dalam mimpi waku tidur pun pasti di sebelah kiri. Struktur berjalan di lajur sebelah kiri itu yang menstrukturkan (*structuring structures*) mimpi kita untuk juga berjalan di lajur sebelah kiri.

4. Sekalipun habitus lahir dalam kondisi sosial tertentu, dia bisa dialihkan ke kondisi sosial yang lain dan karena itu bersifat transposable. Maksudnya, meskipun kebiasaan berjalan di lajur sebelah kiri lahir dalam konteks makin ramainya jalan raya dan makin cepatnya kendaraan berjalan, kebiasaan ini tidak mempunyai kaitan langsung dan niscaya. Artinya, bisa saja lahir kebiasaan sosial lain. Dengan kata lain, kebiasaan sosial yang dibentuk itu menjadi cara penyelesaian dari suatu masalah yang muncul dari suatu konteks sosial yang baru. Sebagai cara, tidak bisa disimpulkan secara serta-merta. Bahwa di negara lain, kebiasaan yang lahir adalah berjalan di lajur sebelah kanan, menunjukkan hal ini. Disebabkan oleh tidak ada kaitan yang niscaya, maka kebiasaan ini pun bisa dibuat atau dilakukan dalam konteks sosial yang berbeda. Tidak ada alasan esensial yang menghalangi bila kebiasaan berjalan di lajur sebelah kiri ini diterapkan di tengah hutan misalnya.
5. Bersifat pra-sadar (*preconscious*) karena ia tidak merupakan hasil dari refleksi atau pertimbangan rasional. Maksudnya habitus “merupakan spontanitas yang tidak disadari dan tak dikehendaki dengan sengaja. Tetapi juga bukanlah suatu gerakan mekanistik yang tanpa latar belakang sejarah sama sekali”. Tampak jelas dalam contoh kebiasaan berjalan di lajur sebelah kiri. Kalau kita melakukannya, jelas kita tidak akan berfikir lagi. Ketika memasuki jalan raya, kita tidak perlu lagi memilih apakah mau berjalan di lajur sebelah kiri atau kanan. Kita lakukan itu dengan spontan. Bahwa kebiasaan

itu bukan sekedar gerakan mekanistik, melainkan sebuah kebiasaan yang mempunyai latar belakang sejarah dan latar belakang sosial, jelas dari bagian dua diatas yakni struktur yang distrukturkan (*structured structures*). Latar belakang sejarah juga sangat jelas dari kebiasaan berjalan di lajur sebelah kiri ini yakni adanya kesengajaan dalam proses awal pembentukannya. Kesengajaan ini berkaitan dengan tujuan yang lebih lanjut dipaparkan pada bagian ke tujuh. Kesengajaan (yang bertujuan) inilah yang membedakannya dari sekedar gerakan mekanistik, yang pada umumnya terjadi tanpa tujuan, yakni sekedar melepas dorongan dari dalam. Tujuan yang jelas dari kebiasaan berjalan di lajur sebelah kiri adalah untuk menciptakan tertib sosial, agar tidak terjadi kecelakaan misalnya bertabrakan dengan pengendara di depan kita, yang mereka juga berjalan di lajur sebelah kiri ke arah kita. Mengapa? karena mereka memiliki kesadaran bahkan di bawah kesadaran yang sama. Dengan demikian habitus bekerja di bawah alas kesadaran. Habitus bekerja "di bawah level kesadaran dan bahasa, di luar jangkauan pengawasan dan kontrol introspektif kehendak". Kendati tidak sadar akan habitus dan cara kerjanya, habitus mewujudkan dirinya di sebagian besar aktifitas praktis kita, dalam contoh tadi, kebiasaan berjalan di lajur sebelah kiri jalan raya. Seperti juga: cara kita makan, berjalan, berbicara. Habitus beroperasi sebagai struktur, namun orang tidak sekedar merespon secara mekanis terhadapnya atau terhadap struktur eksternal yang beroperasi padanya. Sebagai paradigma atau pendekatan, Bourdieu, dalam hal ini, menghindari kutub ekstrem kebaruan yang tak dapat diperkirakan dan determinisme total. Habitus lebih merupakan spontanitas yang tidak disadari dan tak dikehendaki dengan sengaja, tetapi juga

bukanlah suatu gerakan mekanistik yang tanpa latar belakang sejarah sama sekali.

6. Habitus bersifat teratur dan berpola, tetapi bukan merupakan ketundukan kepada peraturan-peraturan tertentu. Saat kita berjalan di lajur sebelah kiri, kebanyakan dari kita, sudah tidak perlu lagi, melihat keberadaan petugas polisi atau tidak, kecuali di persimpangan jalan yang umumnya terpasang lampu jalan (*traffic light*) untuk melanggar lampu larangan masuk, saat berwarna merah. Tidak diperlukan lagi pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang mengingatkan kita untuk berjalan di sebelah kiri—kecuali di jalan tol yang menunjukkan bahwa lajur kanan hanya untuk mendahului—sebab berjalan di sebelah kiri telah menjadi kebiasaan yang “bersifat teratur dan berpola, tetapi bukan merupakan ketundukan kepada peraturan-peraturan tertentu.” Tegasnya, berjalan di lajur sebelah kiri telah menjadi *a state of body* dan *the site of incorporated history*. Bukan hanya menjadi *a state of mind*. Habitus atau kebiasaan sosial adalah sebuah tindakan. Ketundukan kepada peraturan tertentu tidak selalu berarti takut hukuman. Dapat juga berarti lebih “positif” dalam pengertian mengharapkan hadiah (*reward*), baik berupa hadiah material maupun yang bersifat emotif misalnya rasa nyaman, senang, atau bangga. Suatu tindakan, baru dapat disebut sebagai kebiasaan sosial bila aktor juga tidak lagi mengharapkan “hadiah”. Seorang sopir yang mengemudikan kendaraan di lajur sebelah kiri, bukan hanya tidak lagi melakukannya karena takut, melainkan juga tidak lagi mengharapkan pujian dari orang lain. Saat banyak orang beramai-ramai memberikan uang koin kepada orang miskin, bencana alam, atau untuk Prita, tindakan itu tidak

bisa disebut sebagai kebiasaan sosial. Meskipun mungkin dilakukan dengan relatif spontan, yang dibaliknya terdapat motivasi kasihan, atau karena malu saat melihat orang lain telah melakukannya.

7. Habitus dapat terarah kepada tujuan dan hasil tindakan tertentu, tetapi tanpa ada maksud secara sadar untuk mencapai hasil-hasil tersebut dan juga tanpa penguasaan kepandaian yang bersifat khusus untuk mencapainya. Tindakan spontan yang dilakukan oleh para sopir untuk melajukan kendaraan di lajur sebelah kiri mempunyai makna penting bagi ketertiban, keteraturan, dan kepastian hidup bersama di jalan raya. Para pengguna jalan raya—baik sopir maupun penumpangnya—tidak lagi perlu stres untuk menebak-nebak apakah sopir atau pengguna lain, khususnya yang berlawanan arah akan berjalan di lajur sebelah kiri atau kanan. Tujuan saat kebiasaan ini mula-mula dibentuk, dengan demikian sudah dilupakan, tidak lagi menjadi motivasi yang disadari. Itulah maksudnya saat dikatakan bahwa “habitus dapat terarah kepada tujuan dan hasil tindakan tertentu, tetapi tanpa ada maksud secara sadar untuk mencapai hasil-hasil tersebut”. Begitu pula, saat kebiasaan itu dilakukan dengan “tanpa penguasaan kepandaian yang bersifat khusus untuk mencapainya.” Disebabkan oleh sifat sosial (bukan individual), banyak orang, atau bahkan hampir semua, dengan mudah melakukannya. Tidak perlu terdapat peraturan khusus untuk dapat berjalan di lajur sebelah kiri. Tujuan yang sudah “merasuk” di dalamnya itu pulalah yang memberi sifat sosial. Sebab tujuan dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan bersama. Keberadaan tujuan sosial ini sekaligus menegaskan bahwa habitus (kebiasaan sosial) seharusnya bersifat positif. Tujuan untuk kesejahteraan

dan kenyamanan bersama itu pulalah yang membedakan kebiasaan sosial dalam arti habitus dengan kebiasaan sosial dalam rangka sopan santun. Sebagai contoh, menyerahkan dan menerima sesuatu dengan tangan kanan. Kebiasaan yang sudah cukup umum dilakukan oleh kalangan masyarakat Indonesia ini dapatlah dikatakan sebagai kebiasaan sosial. Sebab berkaitan erat dengan nilai-nilai hormat kepada orang lain. Tangan kanan dipandang lebih terhormat dari pada tangan kiri. Karenanya, menyerahkan dan menerima dengan tangan kanan dipandang lebih santun. Hanya saja, meskipun berkaitan dengan nilai umum, tidak dilakukannya kebiasaan ini, tidak menimbulkan kerugian yang besar. Yang terjadi “hanyalah” sedikit terkoyaknya perasaan kesopanan dalam rangka hormat sosial. Disinilah letak perbedaan habitus dengan kebiasaan lain yang tidak menimbulkan kerugian yang besar bagi pelanggarnya.

Habitus dibentuk dalam proses yang panjang. Proses pembentukan habitus terjadi melalui proses internalisasi. “Internalisasi adalah proses yang dilakukan oleh pihak yang tengah menerima proses sosialisasi. Kendati proses internalisasi dikatakan sebagai proses penerimaan sosialisasi, namun proses ini tidaklah bersifat pasif, akan tetapi merupakan proses aktivitas pedagogis yang bersifat aktif juga. Yang dimaksud aktif dalam hal ini adalah proses internalisasi ini pihak yang disosialisasi melakukan interpretasi pemahaman dari pesan yang diterima terutama menyangkut makna yang dilihat dan didengarnya. Langkah selanjutnya adalah meresapkan dan mengorganisasi hasil pemahamannya ke dalam ingatan dan batinnya. Proses internalisasi sendiri sebenarnya telah terjadi sejak anak-anak dilahirkan dari kandungan ibunya. Pada saat itu ia mulai

mencerna atau memahami gejala-gejala kehidupan yang ada di sekitarnya melalui proses informal yang tanpa disengaja”⁴².

Wacquant menyatakan bahwa “*Habitus is a mediating notion that revokes the common sense duality between the individual and the social by capturing ‘the internalisation of externality and the externalisation of internality’ [in the famous expression of Bourdieu], that is, the way society becomes deposited in persons in the form of lasting dispositions, or trained capacities and structured propensities to think, feel, and act in determinate ways, which then guide them in their creative responses to the constraints and solicitations of their extant milieu*”.⁴³

Habitus adalah gagasan jalan tengah yang menceraub dualitas individu dan struktur. Habitus pada prinsipnya adalah proses internalisasi eksternalitas dan eksternalisasi internalitas. Pada konteks inilah, struktur masyarakat menjadi tersimpan dalam diri seorang individu dan menjadi wataknya. Internalisasi struktur sosial dalam diri individu berlangsung lama atau langgeng. Atau habitus juga bermakna kapasitas yang dilatih dan kecenderungan yang terstruktur dalam pikiran, perasaan dan perbuatan. Hal inilah yang menuntun aktor sosial untuk merespon secara kreatif struktur sosial yang memaksa.

Keberhasilan dalam memperebutkan kekuasaan di arena/ranah sangat bergantung pada habitus spesifik untuk arena/ranah yang spesifik. Arena ekonomi mensyaratkan habitus ekonomi. Arena politik mensyaratkan habitus politik. Habitus adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan evolusi sistem sosial. Individulah yang membentuk sistem

⁴² Setiadi, Elly M&Kolip, Usman. 2011. Pengantar Sosiologi, Pehaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi dan Pemecahannya. Jakarta. Kencana : hal 165

⁴³ Navarro, Zander. 2006. In Search of a Cultural Interpretation of Power: The Contribution of Pierre Bourdieu. IDS Bulletin Volume 37 Number 6 : Pg.16

namun juga dibentuk oleh sistem sebagai agen yang akan terus mencipta. Seperti pernyataan Fuchs *“Habitus is the concept that allows us to conceive of the evolution of social systems. The individuals that make up these systems are at once agents created by the systems but also at all times creators”*.⁴⁴

Sementara itu Habitus adalah skema generatif watak manusia yang diperoleh secara diam-diam selama masa kanak-kanak, dan karenanya bertahan lama". Watak-watak ini, yang menghasilkan praktik sosial, diperoleh melalui sosialisasi awal. Selanjutnya, habitus diwujudkan dalam individu, sementara pada saat yang sama menjadi milik kolektif kelompok individu dengan sosialisasi serupa (kelompok yang oleh Bourdieu sebut "kelas"). Baert menyatakan *“Habitus is a generative scheme of dispositions tacitly acquired during childhood, and therefore durable”. These dispositions, that generate social practice, are acquired through early socialization. Furthermore, the habitus is embodied in individuals, while being at the same time a collective property of groups of individuals with similar socializations (groups which Bourdieu calls “classes”)*.⁴⁵

Kematangan habitus seseorang akan menentukan keberhasilannya di arena. Namun selain habitus masih diperlukan satu unsur lagi yakni modal. Bourdieu menyatakan “untuk dapat memahami struktur dan cara berfungsinya dunia sosial perlu dibahas modal dalam segala bentuknya, tidak cukup hanya membahas modal seperti yang dikenal dalam teori ekonomi. Penting juga diketahui bentuk-

⁴⁴ Herbert, Maud & Isabelle Collin-Lachaud. 2016. Collaborative practices and consumerist habitus: An analysis of the transformative mechanisms of collaborative consumption. Recherche et Applications en Marketing (English Edition) : Pg. 11

⁴⁵ Hurtado, Pedro.S. 2010. Assessing the use of Bourdieu's key concepts in the strategy-as-practice field. Competitiveness Review An International Business Journal incorporating Journal of Global Competitiveness 20(1): pg.54

bentuk transaksi yang dalam teori ekonomi dianggap sebagai non-ekonomi karena tidak dapat secara langsung memaksimalkan keuntungan material. Padahal sebenarnya dalam setiap transaksi modal ekonomi selalu disertai oleh modal immaterial berbentuk modal budaya dan modal sosial. Bourdieu menjelaskan perbedaan antara modal ekonomi, modal budaya dan modal sosial, dan menggambarkan bagaimana ketiganya dapat dibedakan antara satu sama lain dilihat dari tingkat kemudahannya untuk dikonversikan”.⁴⁶

Bourdieu menyatakan bahwa struktur dan fungsi sosial hanya bisa dipahami lewat modal sosial, disamping juga modal ekonomi. Pada setiap transaksi ekonomi yang bersifat material selalu disertai transaksi non-ekonomi yang bersifat immaterial berbentuk modal sosial, yaitu berupa hubungan interpersonal di antara pelaku transaksi, misalnya, hubungan antara tenaga penjualan dengan konsumen. Selain itu, perbedaan modal ekonomi dan modal sosial terlihat pada konversi. Modal ekonomi mudah dikonversi dalam bentuk uang atau pemilikan. Modal sosial (seperti gelar pendidikan) bisa juga dikonversi menjadi modal ekonomi (nilai jual ekonomi)⁴⁷. Modal adalah sebuah hasil pekerjaan yang terakumulasi. Modal berada dalam bentuk yang ‘terbendakan” atau ‘menubuh’ dalam istilah lainnya. Modal terjiwai dalam diri seseorang. Dalam ranah atau field kontestasi atau pertarungan sosial, modal dibutuhkan seseorang untuk mempertahankan atau mengubah struktur lingkungan atau sosialnya⁴⁸.

⁴⁶ Syahra, Rusydi. 2003. Modal Sosial : Konsep dan Aplikasi. Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 5 No. 1 : hal.2

⁴⁷ Santoso, Thomas. 2020. Memahami Modal Sosial. Surabaya. CV Saga Jagadwipa : hal.2

⁴⁸ Haerussaleh & Nurid Huda. 2021. Modal Sosial, Kultural dan Simbolik sebagai Representasi Pelanggengan Kekuasaan Dalam Novel The President

Bourdieu membagi empat jenis modal yakni modal sosial, ekonomi, budaya dan simbolik. Penjelasan sebagai berikut :⁴⁹

1. Modal ekonomi dalam pemikiran Bourdiu, berkaitan dengan tradisi Marxian, bentuk modal ekonomi didefinisikan pada penguasaan ekonomi. Materi benda, dan alat-alat produksi dikategorikan sebagai modal ekonomi. Modal ekonomi merupakan jenis modal yang relative independen dan fleksibel.
2. Modal sosial merupakan hubungan serta jaringan hubungan yang merupakan sumber daya yang dapat digunakan dalam penentuan ataupun untuk reproduksi kedudukan sosial. Bourdiue melihat posisi pemilik modal dalam sebuah arena akan ditentukan oleh jumlah dan bobot modal yang mereka miliki. Modal sosial juga menjadi sebuah stretegi yang dijalankan pemilik modal untuk mencapai tujuannya. Pada praktiknya, modal sosial dapat digunakan untuk segala kepentingan dengan dukungan modal ekonomi dan modal kultural. Modal sosial menekankan pada potensi individu atau kelompok dengan ruang perhatian pada kepercayaan, jaringan dan nilai yang lahir dari kelompok tersebut. Kemanfaatan modal sosial sangat berkaitan dengan cara dan upaya dilakukan pemilik modal untuk melestarikan, memelihara, memperkuat, atau mungkin memperbaharunya serta komitmen dalam pendayagunaan modal sosial tersebut
3. Modal budaya atau modal kultural terkait salah satunya dengan kualifikasi diri terkait intelektual. Modal kultural dapat diproduksi melalui pendidikan formal ataupun

Karya Mohammad Sobari (Kajian Pierre Bourdieu). *Metalingua : Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. Vol.6. No 1 : hal.20

⁴⁹ Ibid : hal. 21

berupa keturunan. Modal kultural dapat berupa keyakinan akan nilai-nilai sesuatu yang dikategorikan benar dan diikuti upaya untuk mengaktualisasikan keyakinan tersebut. Dalam instrumen lainnya, modal budaya dapat berupa kemampuan individu untuk mendominasi kelompok kelas bawah. Berbagai aspek modal budaya seperti kemampuan berbicara, bersikap, bertutur kata diwujudkan melalui proses internalisasi dan penubuhan yang berupa disposisi tubuh dan pikiran yang dihargai di wilayah tertentu. Oleh karenanya, modal kultural dapat berupa representasi kemampuan intelektual.

4. Modal simbolik tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan simbolik. Kekuasaan simbolik dimaknai sebagai kekuasaan yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang setara dengan apa yang diperoleh melalui kekuasaan fisik dan ekonomi. Modal simbolik dapat berupa prestise dan juga dapat berupa bentuk 'citra' sebagai hal yang mampu ditukar dengan keuntungan dalam aspek ekonomi. Modal simbolik dalam bentuk prestise muncul dalam barang atau sesuatu hal yang dapat dijadikan sebagai nilai yang mampu menaikkan keuntungan pada seseorang. Modal simbolik merupakan sumber daya yang dioptimalkan untuk mencapai kekuasaan simbolik. Sebuah simbol memiliki kekuatan dalam mengkonstruksi realitas, mampu menggiring dan meningkatkan kepercayaan, mengubah pandangan seseorang/kelompok pada sebuah realitas. Modal simbolik, dapat mengacu pada akumulasi prestise, keterkenalan, kehormatan atau konsekrasi. Dan kesemua itu dibangun dalam sebuah dialektika pengetahuan (*connaissance*) dan pengenalan (*reconnaissance*). Pada akhirnya modal simbolik sangat berkaitan dengan kekuasaan simbolik.

Keberhasilan praktek sosial di arena ditentukan oleh nilai yang besar pada habitus dan modal. Watak kontestatif praktek sosial akan menghasilkan pemenang dengan praktek sosial yang paing kuat. Formulasi praktik sosial Bourdieu pada prinsipnya menegaskan bahwa konflik merupakan watak realitas sosial. Praktek sosial merupakan ajang perebutan kuasa di arena yang mensyaratkan habitus dan modal.

Gramsci adalah sosiolog yang memiliki perhatian pada ketegangan sosial yang mengakibatkan konflik. Gramsci adalah sosiolog beraliran neo-marxis. Gramsci mengkritisi pendekatan ekonomisme Marx. Karakter determinisme pada bangunan teori Marx dianggap menafikan kreativitas individu. Gramsci mengembangkan gagasannya tentang hegemoni sebagai akibat dari proses sosial yang timpang. Dimana kelompok dominan mensubordinasi kelompok tertindas.

Antonio Gramsci pemikir aliran Neo Marxis yang kerangka berpikirnya dikenal dengan teori Hegemoni. Sesungguhnya hegemoni sebagai sebuah teori lahir dari pandangan-pandangan Gramsci terhadap situasi politik yang ada pada jamannya. Jadi pemikiran mengenai hegemoni merupakan pemikiran yang banyak mengungkap mengenai perjuangan-perjuangan politik yang menggunakan kerangka berpikir dari Karl Marx. Dalam analisis terhadap media massa dan budaya populer, pemahaman hegemoni adalah sebagai sarana kultural maupun ideologis, dimana kelompok-kelompok dominan dalam masyarakat melestarikan dominasinya dengan mengamankan “persetujuan spontan” kelompok-kelompok subor-dinat, termasuk kelas pekerja

melalui penciptaan negosiasi-negosiasi konsensus politik maupun ideologis.⁵⁰

Teori Hegemoni sesungguhnya adalah kritik terhadap konsep pemikiran yang mereduksi dan menganggap esensi suatu entitas tertentu sebagai satu-satunya kebenaran mutlak, utamanya reduksionisme dan esensialisme yang melekat pada pemikiran-pemikiran penganut Marxisme dan Non Marxisme. Di kalangan penganut Marxisme telah lama terjadi perdebatan tentang konsep basic structure (ekonomi) dan superstructure (ideology, politik, pendidikan, budaya, dan sebagainya), dimana tafsiran Marxisme Klasik percaya bahwa struktur dasar ekonomi menentukan super struktur. Sosialisme oleh kalangan tradisional direduksi menjadi ekonomisme. Perjuangan kelas direduksi menjadi perjuangan kelas ekonomi saja, sehingga hanya menjadi gerakan pekerja semata, dan mengabaikan gerakan lain seperti *civil right movement*, gerakan perempuan, gerakan budaya, lingkungan dan gerakan sosial lainnya. Pemikiran Gramsci membukakan kesadaran tentang gerakan pekerja sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil (*civil society*) dan sebaliknya.⁵¹

Dua kutipan diatas menunjukkan teori Antonio Gramsci mewakili padangan sosiologi kritis dimana terdapat pemahaman akan proses opresi kelompok sosial tertentu didalam masyarakat yang berupaya meneguhkan posisinya dengan melakukan strategi tertentu. Wajah konfliktual realitas sosial menjadi tak terhindarkan. Rivalitas ini melibatkan proses untuk meneguhkan kuasa atas kelompok subordinat. Agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan

⁵⁰ Winata, I Nyoman. 2012. *Hegemoni Maskulinitas Dalam Iklan Minuman berenergi (Analisis Semiotika TVC Extra Joss dan Kuku Bima Ener-G)*. Jurnal Ilmiah Komunikasi MAKNA Vol. 3 (1) : hal. 45

⁵¹ Siswati, Endah. 2017. *Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci*. Jurnal Translitera. Edisi 7 : 12-33

mengintimidasi nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. Inilah yang dimaksud Gramsci dengan hegemoni atau menguasai dengan kepemimpinan moral dan intelektual secara konsensual. Dalam konteks ini, Gramsci secara berlawanan mendudukan hegemoni sebagai satu bentuk supremasi satu kelompok atau beberapa kelompok atas lainnya dengan bentuk supremasi lain yang ia namakan dominasi yaitu kekuasaan yang ditopang oleh kekuatan fisik.⁵²

Titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni adalah, bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Dalam catatannya terhadap karya Machiavelli, *The Prince* (Sang Penguasa), Gramsci menggunakan centaur mitologi Yunani, yaitu setengah binatang dan setengah manusia, sebagai simbol dari ‘perspektif ganda’ suatu tindakan – kekuatan dan konsensus, otoritas dan hegemoni, kekerasan dan kesopanan. Hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik ideologis.⁵³

Konflik antar kelompok sosial pada dasarnya memperebutkan sumber daya yang sifatnya terbatas. Ada empat hal utama yang mesti diperhatikan untuk memahami Konflik Sosial, yakni :⁵⁴

⁵² Ali, Zezen Zainuddin. 2017. *Pemikiran Hegemoni Antonio Gramsci (1891-1937) di Italia*. Yaqzhan. Vol.3. No.2 : hal.65

⁵³ Hidayati, Wahyu. Abdul Basit & Abdul Muntaqim al Anshori. 2017. *Hegemoni Taliban dalam Film The Kite Runner Berdasarkan Perspektif Teori Hegemoni Antonio Gramsci*. Prosiding Seminar Nasional Bahasa & Sastra IX. Universitas Trunojoyo Madura : hal.494

⁵⁴ Puspitawati, Herien. 2009. *Teori Konflik Sosial dan Aplikasinya dalam Kehidupan Keluarga*. Bogor. IPB : hal.3

- a. Kompetisi (atas kelangkaan sumber daya seperti makanan, kesenangan, partner seksual, dan sebagainya. Yang menjadi dasar interaksi manusia bukanlah konsensus seperti yang ditawarkan fungsionalisme, namun lebih kepada kompetisi.
- b. Ketidaksamaan struktural. Ketidaksamaan dalam hal kuasa, perolehan yang ada dalam struktur sosial.
- c. Individu dan kelompok yang ingin mendapatkan keuntungan dan berjuang untuk mencapai revolusi.
- d. Perubahan sosial terjadi sebagai hasil dari konflik antara keinginan (*interes*) yang saling berkompetisi dan bukan sekadar adaptasi. Perubahan sosial sering terjadi secara cepat dan revolusioner daripada evolusioner

Kompetisi, ketidaksamaan struktural dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan adalah sumber yang dapat memicu konflik. Pertentangan antar kelompok sosial untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas menjadi landasan beragam teori tentang konflik. Dahrendorf menyatakan bahwa “(1) Relasi wewenang yaitu selalu relasi-relasi antar super subordinasi; (2) di mana ada relasi-relasi wewenang, kelompok-kelompok superordinasi selalu diharapkan mengontrol perilaku kelompok-kelompok subordinasi melalui permintaan dan perintah serta peringatan dan larangan; (3) berbagai harapan tertanam relatif permanen dalam posisi sosial dari pada karakter individu; (4) dengan keberadaan fakta ini atau kekuasaan superordinasi, mereka selalu melibatkan spesifikasi subjek-subjek perorangan untuk mengontrol dan; (5) spesifikasi dari ruang sosial yang kontrol mungkin dilakukan; dan (6) wewenang menjadi hubungan terlegitimasi, tanpa protes dengan perintah-perintah otoritatif dapat diberi sanksi; sesungguhnya ini merupakan fungsi sebenarnya dari sistem

legal untuk mendukung pemberlakuan wewenang yang memiliki legitimasi.⁵⁵

Konflik tentu saja dapat membawa perubahan yang fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan yang terjadi meliputi perubahan sosial dan budaya. Dalam perubahan tersebut terjadi dalam beberapa tahap :⁵⁶

- a. Penyesuaian masyarakat terhadap perubahan: Keserasian atau harmoni dalam masyarakat (*sosial equilibrium*) merupakan keadaan yang diidam-idamkan setiap masyarakat. Keserasian masyarakat dimaksudkan sebagai suatu keadaan suatu lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pokok benar-benar berfungsi dan saling mengisi. Dalam keadaan demikian, individu secara psikologis merasakan akan adanya ketentraman karena tidak adanya pertentangan dalam norma-norma dan nilai-nilai.
- b. Saluran-saluran perubahan sosial dan kebudayaan : Saluran saluran perubahan sosial dan kebudayaan (*averue or channel of change*) merupakan saluran-saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan. Umumnya saluran-saluran tersebut adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, rekreasi, dan seterusnya. Lembaga kemasyarakatan tersebut menjadi titik tolak, tergantung pada *cultural focus* masyarakat pada suatu masa tertentu.
- c. Disorganisasi (disintegrasi) dan Reorganisasi (reintegrasi) : Sebelum kita mengetehahui arti kedua kata tersebut kita artikan apakah itu organisasi? Organisasi merupakan artikulasi dari bagian-bagian yang

⁵⁵ Zuldin, Muhammad. 2019. Ketimpangan sebagai Penyebab Konflik : Kajian Atas Teori Sosial Kontemporer. Temali: Jurnal Pembangunan Sosial, Volume 2 Nomor 1 : hal. 161

⁵⁶ Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada : hal 289

merupakan satu kebulatan yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemudian pengertian dari disorganisasi dan reorganisasi yaitu: Disorganisasi adalah proses berputarnya norma-norma dan nilai dalam masyarakat dikarenakan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan. Reorganisasi adalah proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai yang baru agar sesuai dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Reorganisasi dilaksanakan apabila norma-norma dan nilai-nilai yang baru telah melembaga (*institutionalized*) dalam diri warga. Berhasil tidaknya proses pelebagaan tersebut dalam masyarakat.

Perubahan sosial muncul karena adanya sebuah gerakan sosial yang mendesakkan perubahan. Desakan bagi sebuah perubahan tentu saja menimbulkan konflik sosial dikarenakan pihak status quo tidak menginginkan terjadi perubahan. "*Social movements are "those organized efforts, on the part of excluded groups, to promote or resist changes in the structure of society that involve recourse to noninstitutional forms of political participation"*⁵⁷. Gerakan sosial adalah "upaya-upaya terorganisir yang diinisiasi oleh kelompok sosial yang oposisional, untuk mempromosikan atau menolak perubahan dalam struktur masyarakat yang melibatkan sumber daya untuk menciptakan bentuk-bentuk partisipasi politik noninstitusional. Gerakan sosial sendiri menurut bentuknya dibagi kedalam empat tipe gerakan sosial, yakni :⁵⁸

- a. *Revolutionary Movement* (Gerakan Sosial Revolusioner) adalah jenis gerakan sosial yang menginginkan

⁵⁷ McAdam, Doug. 1982. *Political Process and the Development of Black Insurgency 1930-1970*. Chicago. University of Chicago Press : pg.25

⁵⁸ Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. hal.204

perubahan yang menyeluruh pada sendi-sendi kehidupan masyarakat, baik itu sistem sosial, sistem budaya, sistem ekonomi, maupun sistem politiknya. Misalnya, *revolutionary movements* masyarakat Rusia pada tahun 1917 yang berhasil mengubah sistem sosial, budaya, ekonomi, maupun politik Rusia menjadi system komunis. Demikian juga yang terjadi di China pada 1949. Kedua peristiwa ini memenuhi syarat revolusi yang dikemukakan oleh Antony Giddens, bahwa sebuah revolusi itu; (1) melibatkan gerakan sosial secara massal, (2) menghasilkan proses reformasi atau perubahan, dan (3) menggunakan ancaman dan kekerasan.

- b. *Reformative Movement* (Gerakan sosial reformatif) adalah gerakan sosial yang menginginkan perubahan pada segi-segi tertentu kehidupan masyarakat. Misalnya gerakan Boedi Oetomo (1908) atau Syarikat Islam (1912) yang menginginkan terpenuhinya hak-hak memperoleh pendidikan di kalangan pribumi.
- c. *Conservative Movement* (Gerakan sosial Konservatif) adalah gerakan sosial yang mempertahankan suatu keadaan atau institusi yang ada dalam masyarakat. Misalnya gerakan konservatif wanita STOP ERA (*Equal Rights Amendment*). Gerakan ini menentang usaha kaum feminis pada tahun 80-an untuk melakukan perubahan pada konstitusi demi menjamin persamaan hak pria dan wanita.
- d. *Reactionary Movement* (Gerakan Sosial Reaksioner) adalah suatu gerakan sosial yang bertujuan untuk mengganti institusi dan nilai masa kini dengan institusi dan nilai masa lampau. Contoh yang diberikan Kornblum adalah gerakan Ku Klux Klan di Amerika Serikat. Organisasi rahasia ini berusaha mengembalikan keadaan di Amerika Serikat ke masa lampau di kala institusi-

institusi sosial mendukung keunggulan orang kulit putih di atas orang kulit Hitam (*White Supremacy*)

Sudah menjadi kodrat realitas social mengalami perubahan baik sifatnya bertahap maupun tiba-tiba. Adanya konflik bisa menandakan bahwa terjadi persoalan dalam system social. Adanya konflik adalah tanda sistem sosial mengalami krisis. Adanya konflik menunjukkan meluasnya ketidakpuasan terhadap sistem yang ada. Meluasnya ketidakpuasan menandakan bahwa sosialisasi tujuan dan strategi gerakan sosial berhasil. Sosialisasi sendiri dapat digambarkan : *“Socialization has had diverse meanings in the social sciences, partly because a number of disciplines claim it as a central process. In its most common and general usage, the term “socialization” refers to the process of interaction through which an individual (a novice) acquires the norms, values, beliefs, attitudes, and language characteristic of his or her group. In the course of acquiring these cultural elements, the individual self and personality are created and shaped. Socialization therefore addresses two important problems in social life: societal continuity from one generation to the next and human development. Different disciplines have emphasized different aspects of this process”.*⁵⁹

Para ilmuwan sosial masih berbeda pendapat tentang pengertian sosialisasi, sebagiannya disebabkan karena sejumlah disiplin ilmu menganggap konsep ini menjadi pusat analisisnya. Dalam penggunaan umumnya, sosialisasi mengacu pada proses interaksi dimana seseorang mendapatkan norma, nilai, keyakinan, sikap dan karakteristik khusus kelompoknya. Dalam proses mendapatkan norma, nilai, keyakinan, sikap dan karakteristik khusus tersebut diri

⁵⁹ Borgotta, Edgar F&Montgomery, Rhonda J.V., 2000, Encyclopedia of Sociology, Second Edition, USA, Macmillan Reference : pg.2855

dan kepribadian seorang individu diciptakan dan dibentuk. Oleh karena itu, sosialisasi membahas dua masalah utama yakni kesinambungan sistem sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya dan perkembangan masyarakat termasuk didalamnya perubahan sosial. Scruton (2007:647) menyatakan : *“In sociology, the process whereby the individual acquires the characteristic that fit him for membership of society, including, most importantly, the perception of himself as an immovable social being, guided by norm, roles and relation with others.”*⁶⁰. Dalam sosiologi, proses di mana individu memperoleh karakteristik yang cocok untuknya dan untuk keanggotaan masyarakat, termasuk, yang paling penting, persepsi dirinya sebagai makhluk sosial yang tak tergoyahkan, dipandu oleh norma, peran dan hubungan dengan orang lain.

Doda menambahkan pengertian sosialisasi : *“Socialization is a process of making somebody social and fully human. Or more appropriately, it is a process whereby individual persons learn and are trained in the basic norms, values, beliefs, skills, attitudes, way of doing and acting as appropriate to a specific social group or society It is an on-going, never ending process- from cradle to the grave. That means an individual person passes thorough various stages of socialization, from birth to death. Thus, we need socialization as infants, preschool children, schoolboys/girls, pubescents, adolescents, adults and older persons.”*⁶¹

Sosialisasi adalah sebuah proses untuk membuat seseorang menjadi seorang makhluk sosial dan manusia

⁶⁰ Scruton, Roger, 2007, The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought, Third Edition, New York, Palgrave Macmillan : pg 647

⁶¹ Doda, Zerihun. 2005. Introduction to Sociology. Ethiopia. Produced in collaboration with the Ethiopia Public Health Training Initiative, The Carter the Ethiopia Ministry of Health, and the Ethiopia Ministry of Education : pg.101

seutuhnya berdasarkan ekspektasi kelompoknya. Sebuah proses dimana seseorang belajar dan dilatih dengan norma-norma dasar, nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan, keterampilan-keterampilan, perilaku-perilaku, cara bertindak sesuai yang dianggap pantas oleh kelompok atau masyarakatnya. Sosialisasi merupakan sebuah proses yang tak pernah berakhir, dari ayunan hingga ke liang lahat. Hal ini berarti bahwa seorang individu akan melewati seluruh fase sosialisasi, dari lahir hingga mati. Oleh karena itu, kita memerlukan sosialisasi baik sebagai bayi, anak-anak prasekolah, anak sekolah, masa pubertas, remaja, dewasa dan orang tua.

Proses sosialisasi menuju sebuah gerakan social memerlukan agen sosialisasi. *“Agents of socialization are the different groups of people and institutional arrangements which are responsible for training new members of society. Some of them could be formal, while others are informal. They help individual members get into the overall activities of their society. There are three components to socialization process. There is the socializee who could be either a newborn child, a recruit to the army or the police force or a freshman in a college or an intern in medical service. Then again there are the socializers who may be parents, peer groups, community members, teachers or church members. Both the socializee and the socializer interact with one another not in a vacuum but in a social environment which plays an important role in the socialization process. These different socializing environments are called socialization settings. The most socializing agencies are the family, peer relationships, schools, neighborhoods (the community), the mass media, etc”*⁶²

⁶² Ibid : 117-118

Agen sosialisasi adalah berbagai kelompok dan institusi yang bertanggung jawab untuk melatih anggota-anggota baru masyarakat. Sebagian dari mereka dilatih secara formal dan lainnya informal. Mereka membantu seseorang diterima dimasyarakat. Ada 3 komponen dalam proses sosialisasi. Ada bentuk sosialisasi yang dapat diterapkan pada bayi yang baru lahir, rekrutmen tentara atau polisi atau mahasiswa baru di perguruan tinggi atau magang di layanan medis. Kemudian lagi ada sosialisator yang mungkin orang tua, kelompok sebaya, anggota masyarakat, guru atau anggota gereja. Baik sosialisasi maupun sosialisator berinteraksi satu sama lain bukan dalam ruang hampa tetapi dalam lingkungan sosial yang memainkan peran penting dalam proses sosialisasi. Lingkungan sosialisasi yang berbeda ini disebut pengaturan sosialisasi. Lembaga yang paling banyak bersosialisasi adalah keluarga, hubungan teman sebaya, sekolah, lingkungan masyarakat, media massa dan lain-lain.

Sementara itu Zuhri menyebutkan beragam agen-agen sosialisasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :⁶³

- a. Keluarga. Pengaruh kehidupan keluarga baik yang langsung maupun yang tidak langsung yang merupakan struktur sosialisasi pertama yang dialami seseorang sangat kuat dan kekal. Yang paling jelas pengaruh dari keluarga ini adalah dalam hal pembentukan sikap terhadap wewenang kekuasaan (*authority*). Keluarga biasanya membuat keputusan bersama, dan bagi si anak keputusan-keputusan yang di buat itu bisa otoritatif dalam arti, keengganan untuk mematuhi nya dapat mengundang hukuman.

⁶³ Zuhri, Sihabuddin. 2010. Peranan Sekolah dalam Proses Sosialisasi Politik (Studi Penelitian terhadap Siswa SMA Negeri 2 Semarang). Disertasi. Tidak diterbitkan. Semarang : Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang : hal.40

Pengalaman berpartisipasi dalam pembuatan keputusan keluarga dapat meningkatkan perasaan kompetensi politik si anak, memberinya kecakapan-kecakapan untuk melakukan interaksi politik, serta membuatnya lebih mungkin berpartisipasi dengan aktif dalam sistem politik sesudah menjadi dewasa. Keluarga juga membentuk sikap-sikap politik masa depan dengan menempatkan individu dalam dunia kemasyarakatan luas, dengan membentuk ikatan-ikatan etnis, linguisitik, religius dan kelas sosialnya, dengan memperkuat nilai-nilai dan prestasi kultural dan pendidikannya dan dengan mengarahkan aspirasi-aspirasi pekerjaan dan ekonominya.

- b. Sekolah. Orang yang terpelajar lebih sadar akan pengaruh pemerintah terhadap kehidupan mereka, lebih memperhatikan kehidupan politik, memperoleh lebih banyak informasi tentang proses-proses politik dan lebih kompeten dalam tingkah laku politiknya. Sekolah memberi pengetahuan kepada kaum muda tentang dunia politik dan peranan mereka di dalamnya. Sekolah memberikan pandangan yang lebih kongkrit tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan-hubungan politik. Sekolah juga merupakan “saluran pewarisan” nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakatnya. Sekolah dapat memegang peranan penting dalam pembentukan sikap-sikap terhadap “aturan permainan politik ” (*rule of political game*) yang tidak tertulis.
- c. Kelompok Pergaulan. Meskipun sekolah dan keluarga merupakan sarana yang paling jelas terlibat dalam sosialisasi, ada juga beberapa unit sosial lain yang bisa membentuk sikap-sikap politik seseorang. Salah satunya adalah kelompok pergaulan, termasuk

kelompok bermain di masa kanak-kanak, kelompok persahabatan dan kelompok kerja yang kecil, dimana setiap anggota mempunyai kedudukan yang relatif sama dan saling memiliki ikatan-ikatan yang erat. Setiap individu dalam kelompok itu menyesuaikan pendapatnya dengan teman-temannya mungkin karena ia menyukai atau menghormati mereka, atau mungkin pula karena ia ingin sama dengan mereka. Jadi kelompok pergaulan itu mensosialisasikan anggota-anggotanya dengan cara mendorong atau mendesak mereka untuk menyesuaikan diri terhadap sikap-sikap atau tingkah laku yang dianut oleh kelompoknya.

- d. Pekerjaan. Pekerjaan dan organisasi, organisasi formal maupun non formal yang dibentuk berdasarkan lingkungan pekerjaan itu, seperti serikat buruh, klub sosial dan yang semacam itu juga merupakan saluran komunikasi informasi dan keyakinan yang jelas. Individu-individu mengidentifikasi diri dengan suatu kelompok tertentu, seperti serikat buruh, dengan menggunakan kelompok itu sebagai acuan dalam kehidupan politik. Mereka menjadi sensitif terhadap norma-norma kelompok itu dan menilai tindakantindakannya berdasar perhitungan apa yang paling baik bagi kelompok itu.
- e. Media Massa. Masyarakat modern tidak dapat hidup tanpa komunikasi dan informasi yang luas, cepat dan secara umum seragam. Informasi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di mana saja di belahan dunia segera menjadi pengetahuan umum dalam beberapa jam saja. Sebagian besar masyarakat dunia, terutama bagian-bagiannya yang modern telah menjadi satu kelompok penonton tunggal yang tergerak hatinya

oleh peristiwa-peristiwa yang sama dan dirangsang oleh selera yang sama. Kita tahu bahwa media massa, surat kabar, radio, televisi, internet, majalah memegang peran penting dalam menularkan sikap-sikap dan nilai-nilai modern kepada bangsa-bangsa baru merdeka.

- f. Kontak-kontak politik langsung. Tidak peduli betapa positif pandangan terhadap sistem politik yang telah ditanamkan oleh keluarga atau sekolah, tetapi seseorang telah diabaikan oleh partainya, kelaparan tanpa ditolong, dan dipaksa masuk wajib belajar militer, pandangan terhadap dunia politik sangat mungkin berubah. Partai politik, kampanye pemilihan umum, krisis politik dan konflik, dan daya tanggap badan-badan pemerintah terhadap tuntutan-tuntutan individu dan kelompok dapat mempengaruhi kesetiaan dan kesediaan mereka untuk mematuhi hukum.

Eskalasi konflik semakin besar bergantung pada tingkat sosialisasi yang diterima oleh kelompok sasaran. Semakin besar eskalasi konflik semakin besar peluang perubahan sosial akan terjadi. Alasan atau sebab terjadinya konflik dapat berupa memperebutkan sumberdaya material. Konflik bisa juga disebabkan oleh faktor-faktor ideologis atau konflik terjadi karena sebuah proses sosial yang melibatkan sebuah proses interaksi. Hal ini tercermin dari sebab-sebab terjadinya perubahan sosial sebagai hasil dari relasi konfliktual. Sebab-sebab tersebut adalah:⁶⁴

- 1 Perspektif materialis. Perspektif ini menempatkan budaya material sebagai pendorong utama mekanisme perubahan.

⁶⁴ Narwoko, J Dewi&Suyanto, Bagong. 2004. *Sosiologi. Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta. Prenada Media : hal.381

- 2 Perspektif idealis. Perspektif ini menempatkan ide (ideologi) dalam mekanisme perubahan.
- 3 Perspektif mekanisme interaksional. Perspektif ini meyakini bahwa mekanisme perubahan oleh kekuatan material dan ideologi, tetapi bersumber dalam proses sosial itu sendiri.

Perubahan yang fundamental dalam masyarakat dapat memicu ketidakstabilan dalam sistem sosial. Perubahan menjadi sesuatu yang tak terelakkan dan olehnya itu konflik adalah sesuatu yang tak bisa dielakkan. Perubahan yang relative cepat dan fundamental mengakibatkan konflik yang tak terelakkan disbanding perubahan yang relatif lebih lambat. Menurut Sztompka cepat atau tidaknya sesuatu perubahan disebabkan oleh faktor-faktor.⁶⁵

1. Faktor yang mempercepat proses transformasi atau perubahan sosial adalah sebagai berikut:
 - a. Kontak dengan kebudayaan lain.
 - b. Pendidikan formal yang maju.
 - c. Menghargai inovasi.
 - d. Toleransi terhadap penyimpangan.
 - e. Sistem pelapisan sosial yang terbuka.
 - f. Penduduk yang heterogen.
 - g. Orientasi ke masa depan.
 - h. Selalu berusaha yang pantang menyerah guna meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik.
 - i. Tidak cepat puas terhadap keberhasilan.
2. Faktor yang memperlambat proses transformasi atau perubahan sosial yakni:
 - a. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain.
 - b. Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat.

⁶⁵ Sztompka, Piotr . (2007) . Sosiologi Perubahan Sosial.Jakarta: Prenada : hal.13

- c. Sikap masyarakat yang tradisional.
- d. Komposisi penduduk yang homogeny.
- e. Takut terjadi goncangan integrasi sosial.
- f. Prasangka buruk terhadap hal baru/asling.
- g. Sistem sosial tertutup.
- h. Kebiasaan/ adat istiadat yang sudah tertanam kuat dalam diri masyarakat tersebut.

Konflik merupakan suatu keniscayaan yang tak dapat dihindari mengingat masing-masing tujuan pihak yang berseberangan berbeda. Bila mengambil gagasan tentang fungsionalisasi konflik maka konflik tidak hanya dapat dilihat faktor yang menciptakan ketidakstabilan sosial namun juga solidaritas sosial intern kelompok yang berkonflik.

Solidaritas sosial adalah konsep yang diperkenalkan oleh Durkheim. Durkheim menyatakan bahwa : "Solidaritas sosial merupakan suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Solidaritas menekankan pada keadaan hubungan antar individu dan kelompok dan mendasari keterikatan bersama dalam kehidupan dengan didukung nilai-nilai moral dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Wujud nyata dari hubungan bersama akan melahirkan pengalaman emosional, sehingga memperkuat hubungan antar mereka. Menurut Durkheim, berdasarkan hasilnya, solidaritas dapat dibedakan antara solidaritas positif dan solidaritas negatif. Solidaritas negatif tidak menghasilkan integrasi apapun, dan dengan demikian tidak memiliki kekhususan, sedangkan solidaritas positif dapat dibedakan berdasarkan ciri-ciri: a) Yang satu mengikat individu pada masyarakat secara langsung, tanpa perantara. Pada solidaritas positif yang lainnya, individu tergantung dari masyarakat, karena individu tergantung dari bagian-bagian

yang membentuk masyarakat tersebut. b) Solidaritas positif yang kedua adalah suatu sistem fungsi-fungsi yang berbeda dan khusus, yang menyatukan hubungan-hubungan yang tetap, walaupun sebenarnya kedua masyarakat tersebut hanyalah satu saja. Keduanya hanya merupakan dua wajah dari satu kenyataan yang sama, namun perlu dibedakan dan c) Dari perbedaan yang kedua itu muncul perbedaan yang ketiga, yang akan memberi ciri dan nama kepada kedua solidaritas itu. Ciri-ciri tipe kolektif tersebut adalah individu merupakan bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan, tetapi berbeda peranan dan fungsinya dalam masyarakat, namun masih tetap dalam satu kesatuan”.⁶⁶

Fungsionalisasi konflik menegaskan bahwa konflik justru menguatkan solidaritas. Mengokohkan kohesivitas sosial sesama kelompok. Semakin eskalasi konflik meningkat maka semakin kokohlah solidaritas dan kohesivitas kelompok. Kelompok yang memiliki kohesivitas yang tinggi biasanya terdiri dari individu yang termotivasi untuk membangun kebersamaan dan cenderung memiliki aktivitas kelompok yang efektif, anggotanya kooperatif dan akrab serta saling menghargai antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan, namun apabila terjadi penghindaran biasanya karena rendahnya tingkat keakraban. Kelompok yang kohesivitasnya rendah tidak memiliki ketertarikan interpersonal diantara anggotanya. Biasanya ada rasa saling bermusuhan dan agresif dan justru ada perasaan senang ketika anggota lain berbuat kesalahan.⁶⁷

⁶⁶ Saidang & Suparman. Pola Pembentukan Solidaritas Sosial dalam Kelompok Sosial Antara Pelajar. Edumaspul: Jurnal Pendidikan. Vol 3 (2) : hal.123-124

⁶⁷ Purwaningtyastuti & Anna Dian Savitri. Kohesivitas Kelompok Ditinjau dari Interaksi Sosial Dan Jenis Kelamin pada Anak-Anak Panti Asuhan. Philanthropy Journal of Psychology. Volume 4 Nomor 2 : hal.121

Sementara itu dalam perspektif Teori Konstruksi Sosial konflik terjadi melalui 3 tahapan proses yakni internalisasi, obyektivasi dan eksternalisasi. Internalisasi merupakan fase memasukkan pemahaman tentang asal musabab, situasi konflik dan sasaran perubahan. Obyektivasi adalah proses dimana individu atau kelompok menimbang dan menerima/menolak informasi yang diterimanya pada proses sosialisasi. Eksternalisasi adalah proses dimana seorang individu atau kelompok mengekspresikan sikapnya dalam wujud perilaku. Paul Lederach menjelaskan bagaimana konflik dalam perspektif konstruksi sosial terjadi. Ada tujuh asumsi yang ia kemukakan, yaitu: ⁶⁸

1. Konflik sosial dipahami sebagai hal yang alamiah.
2. Konflik sosial dipahami sebagai kejadian konstruktif kebudayaan secara sosial. Konflik tidak hanya terjadi pada seseorang, tetapi orang merupakan peserta aktif dalam menciptakan situasi dan interaksi yang mereka ambil pengalaman sebagai konflik.
3. Konflik muncul melalui proses interaktif yang melandaskan pada pencarian dan penciptaan makna bersama.
4. Proses interaktif disempurnakan melalui persepsi manusia, interpretasi, ekspresi, dan niatan-niatan, yang kesemuanya tumbuh dan kembali pada ke kesadaran umum (*common sense*) mereka.
5. Pemaknaan muncul sebagaimana manusia meletakkan diri mereka sendiri dan sosial seperti situasi, kejadian, dan tindakan di dalam pengetahuan mereka.
6. Kebudayaan berakar di dalam pengetahuan bersama dan skema-skema digunakan oleh sekelompok orang

⁶⁸ Zuldin, Muhamad. 2019. Ketimpangan sebagai Penyebab Konflik. Kajian Atas Teori Sosial Kontemporer. Temali: Jurnal Pembangunan Sosial, Volume 2 Nomor 1 : hal. 171

untuk merasakan, mengekspresikan, dan merespons kenyataan sosial di sekitar mereka.

7. Pemahaman hubungan konflik sosial tidak hanya satu pertanyaan sensitif dari kesadaran, tetapi lebih jauh petualangan yang dalam arti penemuan dan penggalian arkeologis dari pengetahuan umum dari sekelompok orang.

Secara umum, Teori Konstruksi Sosial menekankan proses triadik yang melibatkan dualitas struktur-individu. Proses Triadik itu meliputi :⁶⁹

1. Eksternalisasi ialah penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia. "*Society is a human product*".
2. Objektivasi ialah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami institusionalisasi. "*Society is an objective reality*".
3. Internalisasi ialah individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga- lembaga sosial atau organisasi sosial di mana individu tersebut menjadi anggotanya. "*Man is a social product*".

Dengan kata lain, konflik merupakan produk manusia. Konflik merupakan sesuatu yang bersifat fakta sosial obyektif dan pada saat yang sama dalam situasi konflik, pikiran, sikap dan perilaku manusia adalah produk dari situasi konflik yang dijalaninya.

Teori yang lain yang memiliki pandangan tentang konflik adalah Teori Kritis. Teori Kritis adalah teori yang menekankan bahwa secara ontologis masyarakat bersifat historis dialektik. Realitas sosial pada dasarnya terbentuk

⁶⁹ Basrowi, Sukidin. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya. Insan Cendekian : hal.206

melalui dialektika/kontestasi antar kelompok-kelompok sosial dalam rentang waktu tertentu. Realitas sosial yang mapan adalah produk pemenang dialektika/kontestasi. Oleh karena itu, watak dialektik historis mencerminkan bahwa konflik adalah bagian yang tak terpisahkan dalam terbentuknya realitas sosial.

“Teori kritis mendasarkan kerangka kerjanya pada epistemologi yang bersifat praksis, tidak hanya mengangkat teori-teori saja, melainkan mempraksis teori tersebut untuk melakukan “proyek” pembebasan manusia dari ketidaksadaran atau terutama dari dogma-dogma ideologi positivistik. Emansipasi manusia memberikan penekanan dalam aspek empirik, bukan sekedar pragmatis, agar keberdayaan dan kemandirian manusia dapat secara kritis dibangun. Teori kritis pada dasarnya berkeinginan menjadi gerakan yang berupaya membebaskan akal pikir manusia dari seluruh mitos atau teologi, yang kemudian memunculkan ilmu pengetahuan modern. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, justru teori kritik melakukan kritik atas zaman pencerahan, yang menggiring akal pikir dan perilaku (ke)manusia(an) ke dalam mitos dan ideologi baru yaitu positivisme. Pembongkaran atas kondisi masyarakat yang demikian adalah keinginan yang bersifat epistemologis yang bertujuan untuk melakukan kritik atas ideologi, melalui pembongkaran atas selubung ideologis yang terlembaga dalam masyarakat. Namun pada akhirnya, justru oleh Habermas, semangat Teori Kritik mengalami kemacetan, bahkan ia berkembang menjadi mitos baru yang lebih halus. Rasionalitas kritis tersebut berkembang menjadi sebuah irrasionalitas, dan itulah mitos baru dalam masyarakat. Kemacetan Teori Kritis tersebut dijawab oleh Habermas dengan mendasarkan teori kritis pada epistemologi yang

bersifat praksis dari rasionalitas ilmu. Teori harus memiliki maksud atau dimensi praksis⁷⁰.

Dimensi praktis bermakna pembebasan individu atau kelompok dari penindasan. Kelompok sosial yang termarginalkan harus mendesakkan perubahan. Sebuah Gerakan emansipasi melawan dominasi kelompok dominan. “Habermas berusaha merekonstruksi nalar, sehingga akan terbentuk ruang yang steril dari dominasi, yang akan membawakan sikap emansipatoris. Untuk mewujudkan gagasannya tersebut, ia mengkritisi „macetnya“ teori kritis dengan mendasarkan teorinya pada epistemologi praksis dari rasionalitas ilmu. Dengan tujuan terbentuknya masyarakat komunikatif, yang terbebas dari dominasi berbagai kekuatan melalui berbagai argumentasi, untuk mencapai sebuah klaim kesahihan yang rasional tanpa paksaan”.⁷¹

Salah satu tokoh Teori Kritis adalah Jurgen Habermas. Habermas mempromosikan tindakan rasional komunikatif. Lewat rasionalitas komunikatifnya, Habermas mengurai konstelasi kepentingan-kepentingan dalam masyarakat. Ia menawarkan suatu bentuk masyarakat ideal dalam kritik-kritiknya. Berbeda dari para pendahulunya, Habermas tidak terpaku dalam sorotan terhadap kepentingan teknis (rasionalitas instrumental) semata. Menurut Habermas, masyarakat memiliki tiga jenis kepentingan yang masing-masing memiliki pendekatan dan rasionya masing-masing. *Pertama*, kepentingan teknis, yaitu kepentingan untuk menyediakan sumberdaya natural. Oleh karena sifatnya yang sangat instrumental—dengan tugas yang konkret—kerja, maka pada dasarnya adalah kepentingan yang “teknis”. *Kedua*, kepentingan interaksi. Oleh karena kerjasama sosial

⁷⁰ Ulumuddin. 2006. Jurgen Habermas dan Hermeunetika Kritis (Sebuah Gerkan Evolusi Sosial. Jurnal Hunafa Vol. 3 (1) : hal.79

⁷¹ Ibid. hal.74

amat dibutuhkan untuk bertahan hidup, maka Habermas menamakannya kepentingan “praktis”. Kepentingan kedua ini mencakup kebutuhan-kebutuhan manusia untuk saling berkomunikasi beserta praktik-praktiknya. *Ketiga*, kepentingan kekuasaan. Tatanan sosial, secara alamiah cenderung pada distribusi kekuasaan, namun pada saat yang sama, kita juga memiliki kepentingan untuk membebaskan diri dari dominasi. Kekuasaan mengarah pada distorsi terhadap komunikasi. Dengan menjadi sadar akan adanya ideologi-ideologi yang dominan di masyarakat, suatu kelompok kemudian dapat memberdayakan dirinya untuk mengubah keadaan. Karena itu, kepentingan kekuasaan adalah kepentingan yang “emansipatoris”.⁷²

Habermas mengakui bahwa konflik adalah sesuatu yang inheren dalam sistem masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari hubungan kekuasaan dalam sistem sosial dan sifat kekuasaan yang mendominasi. Sosiologi konflik mazhab kritis Habermas menganalisis kondisi dari dominasi struktural. Kelompok penguasa mengarahkan berbagai bentuk kebijakan pada orang lain di luar wewenang dan kekuasaannya. Kondisi ini merupakan bentuk dominasi. Habermas melihat komunikasi yang dihasilkan dari kondisi ini selalu memuat kepentingan penguasa untuk menundukkan. Inilah yang disebut Habermas dengan komunikasi intrumental. Komunikasi intrumental hanya memberi peluang pada pemilik kekuasaan, dan tidak akan menciptakan kesepahaman (*mutual understanding*).⁷³

Pemikir konflik mutakhir yakni Johan Galtung memiliki gagasan tidak hanya diseputar kejadian konflik tapi juga resolusi konflik. Johan Galtung juga seorang tokoh yang memperkenalkan gagasannya tentang studi perdamaian.

⁷² Ansori. 2009. Rasionalitas Komunikatif Habermas. Jurnal Dakwah dan Komunikasi : Komunika. Vol 3. No.1 : 94

⁷³ Zuldin, Muhamad. Loc.cit. hal.172

Galtung terkenal dalam gagasan segitiga konflik dan resolusi konflik. Galtung mendirikan akademi yang bergerak dibidang penelitian tentang perdamaian yang dikenal dengan nama sebuah akademi, Institut Penelitian Perdamaian Internasional Oslo di tahun 1959. Beragam karya telah dihasilkan Galtung selama melakukan penelitian Penelitiannya di Institut Penelitian Perdamaian Internasional Oslo antara lain : Menginisiasi jurnal tentang perdamaian berjudul *Journal of Peace Research* yang terbit pertama kali tahun 1964. Beragam penelitiannya memosisikan Galtung sebagai tokoh sentral bidang studi perdamaian, resolusi dan transformasi konflik. Karya-karya ilmiah Galtung antara lain : *Gandhi's Political Ethics*, *Essays in Peace Research*, *True Worlds, There are Alternatives*, *Human Rights in Another Key*, *Choose Peace*, dan karya-karya lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam ruang ini. Tidak hanya berposisi teoritikus konflik, Galtung juga terlibat dalam kegiatan resolusi dan transformasi konflik dengan menjadi fasilitator seperti keterlibatan aktif Galtung pada konflik antara Korea Utara versus Korea Selatan, Israel versus Palestina. Salah satu gagasan besar Galtung adalah temuannya dalam bidang studi perdamaian misalnya perbedaan mendasar antara perdamaian positif dan negatif, kekerasan struktural, dan *peace building*.

Galtung membagi 3 jenis kekerasan yang memiliki karakteristik yang berbeda yakni kekerasan langsung, struktural dan kultural. Ketiga Kekerasan dapat dijelaskan sebagai berikut :⁷⁴

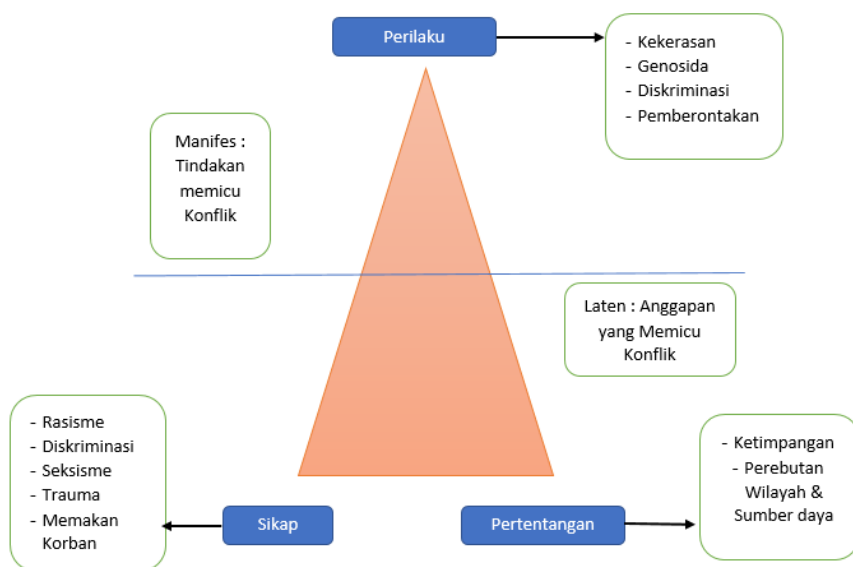
1. Kekerasan langsung mempunyai efek yang langsung terlihat seperti korban yang terbunuh, terluka,

⁷⁴ Khaswara, Fajar & R. Yuli Ahmad Hambali. 2021. Teori Konflik Menurut Johan Galtung. Gunung Djati Conference Series, Volume 4. Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies : hal.654-655

kerusakan materi. Namun efek yang lebih besar yang tidak terlihat adalah kekerasan langsung bisa mempengaruhi kekerasan budaya dan kekerasan struktural. Galtung juga mengklaim bahwa aspek budaya dan struktural konflik tidak terlihat, namun pada faktanya dua hal tadi memainkan peranan penting dalam tahapan pencegahan dan rehabilitasi tahap-tahap konflik.

2. Kekerasan struktural adalah konsep bentuk kekerasan di mana dalam suatu struktur sosial terdapat hal yang merugikan suatu kelompok masyarakat seperti ada mereka yang terhalangi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Galtung memperkenalkan istilah *structural violence* dalam artikelnya yang berjudul *Violence, Peace, and Peace Research*. Bentuk-bentuk kekerasan struktural di antaranya adalah pendiskriminasi suatu ras yang terorganisir dan seksisme. Kaitannya dengan kekerasan langsung, keduanya sangat berhubungan erat seperti kekerasan dalam keluarga, kekerasan gender, kebencian, kekerasan ras, kekerasan polisi, kekerasan negara, terorisme dan perang.
3. Kekerasan kultural mengacu pada aspek budaya atau kebiasaan yang dapat digunakan untuk melegitimasi kekerasan struktural. Bentuk kekerasan ini dapat dicontohkan melalui agama, ideologi, bahasa, seni, dan ilmu empiris (Galtung, 1969). Galtung menjelaskan bahwa cara kerja kekerasan kultural adalah mengubah “warna moral” dari tindakan yang “salah/merah” menjadi “benar/hijau” atau setidaknya menjadi “dapat diterima/kuning”.

Salah satu sumbangan terbesar Galtung adalah gagasannya tentang segitiga konflik yang bisa digambarkan dibawah ini :⁷⁵



Sebuah konflik dapat diungkapkan dengan dalam sebuah segitiga, dengan dengan sikap (*attitude*), perilaku (*behaviour*), kontradiksi (*contradiction*). Kontradiksi mengarah kepada dasar situasi konflik seperti adanya ketidaksepahaman tujuan, termasuk adanya ketimpangan yang dirasakan oleh pihak-pihak yang bertrok, yang diakibatkan oleh bentrokan antara nilai sosial dan struktur sosial. Kontradiksi tersebut diputuskan oleh pihak-pihak yang bertrok, hubungan diantara kelompok, dan benturan kepentingan inheren. Sementara sikap menunjukkan pemahaman pihak yang

⁷⁵ Saragih ,Dina Elina. Soni Akhmad Nulhaqim & Muhammad Fedryansyah. 2022. Analisa Segitiga SPK Pada Kekerasan Langsung Antar Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Forum Betawi Rempug (FBR) dan Pemuda Pancasila (PP). Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. Vol.4 No.2 : hal.138

bentrok antara satu sama lain dan kesalahpahaman di antara pihak-pihak tersebut. Serta pemahaman akan pengakuan atas isu-isu yang berkembang dengan kelompok lain. Dalam konflik dan kekerasan, di antara pihak-pihak yang berkonflik cenderung mengembangkan stereotip seperti saling meremehkan. Sikap ini sering terpengaruh perasaan seperti ketakutan, kemarahan, kepahitan, dan kebencian. Sikap ini termasuk ke dalam unsur perasaan, kepercayaan dan harapan. Perilaku merupakan kerjasama atau pemaksaan, gerak tangan atau tubuh yang menunjukkan persahabatan atau permusuhan. Perilaku konflik dengan kekerasan dicirikan oleh ancaman, pemaksaan, dan serangan yang merusak. Dalam bukunya yang berjudul “Peace by Peaceful Means” Galtung merumuskan bahwa konflik merupakan bangunan triadik yang tersusun atas tiga elemen tersebut. Konsep segitiga ini jika dijelaskan secara sederhana bahwa konflik terjadi ketika terdapat perilaku, sikap, dan asumsi yang kontradiktif terhadap suatu hal di antara pihak-pihak yang sedang bertikai. Pertentangan yang terjadi dapat bersifat manifes atau laten. Sebuah konflik, akan mengalami fase kekerasan berturut-turut, sebelum kekerasan, masa kekerasan berlangsung dan setelah kekerasan. Fase tersebut diantarai oleh terurainya kekerasan ataupun adanya perdamaian. Ketiga elemen (A,B,C) harus dipertimbangkan pada semua fase.



Siklus konflik seperti gambar di atas menjelaskan, bahwa konflik terjadi ketika terdapat sikap, perilaku dan asumsi yang kontradiktif terhadap suatu hal/ kejadian. Pertentangan tersebut dapat bersifat manifes atau laten. Dimana manifes

merupakan tindakan yang dapat diamati dengan perilaku dan laten dapat diamati dengan sikap dan kontradiksi atau anggapan yang dapat memicu konflik

Konflik yang manifes akan menyebabkan kekerasan. Diantara 3 jenis kekerasan, kekerasan kultural adalah sumber segala jenis kekerasan. Galtung menyatakan : “kekerasan kultural merupakan sumber terjadinya jenis kekerasan lainnya, maka untuk memerangi atau menghilangkan kekerasan struktural (ketidakadilan dan diskriminasi) dan kekerasan langsung (pembunuhan maka budaya harus menjadi agenda utama. Selain itu, untuk menghindari atau menghentikan tindak kekerasan membutuhkan sebuah proses transformasi sosio-kultural dalam sebuah masyarakat. Jika kekerasan struktural dan kekerasan langsung dibiarkan terjadi karena adanya kekerasan kultural, maka untuk menghentikan kekerasan langsung dan kekerasan struktural dibutuhkan sebuah transformasi yang menggantikan kekerasan kultural menjadi perdamaian kultural dan budaya non kekerasan. Kekerasan kultural menyebabkan langsung kekerasan struktural dan kekerasan langsung biasanya melalui proses yang lebih panjang yakni berawal dari kekerasan kultural mengakibatkan kekerasan struktural baru menuju ke kekerasan langsung. Dalam kenyataannya, proses semacam ini memang lebih sering terjadi. Mereka yang melakukan kekerasan langsung sebenarnya mencoba mencari penyelesaian atas ketidakadilan yang dirasakannya dalam bidang ekonomi, budaya, sosial dan politik. Mereka meyakini bahwa kondisi ketidakadilan itu telah merusak kehidupannya. Dengan melakukan kekerasan langsung mereka berharap dapat merombak seluruh tata sosial ekonomi yang tidak adil tersebut. kekerasan langsung sebagai peristiwa di puncak strata dan karena itu gampang terlihat. Berikutnya adalah pola-pola perubahan eksploitasi dengan

mekanisme yang dibutuhkannya baik dalam mencegah pembentukan kesadaran maupun menghambat pengorganisasian terhadap eksploitasi dan penindasan. Inilah strata kekerasan struktural yang dilihat sebagai proses perubahan. Ia tidak begitu terlihat dan karenanya lebih berbahaya. Strata dasar adalah yang tetap mengalir sepanjang masa yakni kekerasan struktural, yang menopang kedua strata di atas”.⁷⁶

Galtung tidak hanya memiliki gagasan tentang struktur konflik namun juga gagasan tentang resolusi konflik. Galtung membagi 3 tahap resolusi konflik yakni :⁷⁷

1. *Peace Keeping*

Peace keeping merupakan pendekatan klasik yang dipakai oleh pihak yang berkuasa atau pemerintah. Pendekatan ini pada dasarnya disosiatif yakni pihak yang berkonflik dijauhkan satu sama lain di bawah ancaman hukuman yang cukup jika mereka melanggar, terutama jika mereka melanggar ke wilayah masing-masing. Kekuatan yang diusahakan oleh pemerintah disertai dengan langkah-langkah sosial disosiatif lainnya, seperti pemisahan pihak yang berkonflik dan juga pendekatan klasik seperti penggunaan jarak geografi. Jika dua kekuatan sosial disebutkan - tidak cukup untuk menjaga mereka terpisah atau masih ada ancaman perilaku destruktif dan sikap kebencian dan atau penghinaan, maka pihak ketiga yakni pihak militer dapat dipanggil untuk melakukan operasi *peace keeping*, misalnya berpatroli perbatasan dan penggunaan peralatan teknologi misalnya pagar elektromagnetik, dll. Jadi *peace keeping* merupakan

⁷⁶ Zuldin, Muhammad. Loc.cit. hal. 178

⁷⁷ Hermawan, Yulius. 2007. Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi, Yogyakarta. Graha Ilmu : hal. 93-94

proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral

2. *Peace Making*

Peace making adalah proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama terutama pada level elit atau pimpinan. Pihak-pihak yang bertikai dipertemukan guna mendapat penyelesaian dengan cara damai. Hal ini dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah. Akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak mempunyai hak untuk menentukan keputusan yang diambil. Pihak ketiga hanya menengahi apabila terjadi suasana yang memanas antara pihak bertikai yang sedang berunding

3. *Peace Building*

Konsep membangun perdamaian atau *peacebuilding* didefinisikan sebagai aktifitas yang memiliki ruang gerak luas terutama mencakup rekonsiliasi, transformasi sosial dan peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan *Peace building* berjalan setelah aktivitas *peace keeping* dan *peace making* dilakukan. *Peace building* dilakukan dalam waktu yang relatif panjang. Hal ini tidak terlepas dari beberapa dimensi yang melingkupi *peace building* yakni personal, relasional, kultur dan struktural. Struktur berkaitan dengan bagaimana membangun perdamaian melalui transformasi nilai sekaligus peningkatan kapasitas institusi eksekutif, legislatif, yudikatif, serta militer dan kepolisian. Dua institusi terakhir ini memegang peranan penting dalam mengendalikan masyarakat pasca konflik. Sebab kenyataannya pihak yang

berkonflik rentan terhadap provokasi dan sangat mendambakan penegakan hukum, struktur juga mengacu pada sistem dan struktur sosial yaitu bagaimana hubungan diorganisasikan, siapa yang mempunyai powernya, bisa pada tingkat keluarga dan pada tingkat masyarakat yang lebih luas. *Peace building* juga merupakan strategi atau upaya yang mencoba mengembalikan keadaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dalam konflik dengan cara membangun jembatan komunikasi antar pihak yang terlibat konflik. Tujuan *peace building* sejatinya tidak hanya terbatas pada perhentian konflik dan penjagaan kesepakatan damai. Namun konsep ini mencakup kerja-kerja yang luas dan komprehensif baik pada saat konflik maupun pasca konflik. Selama konflik berlangsung kerja-kerja perdamaian biasanya difokuskan pada intervensi konflik melalui mediasi atau fasilitas dan rekonsiliasi. Tujuannya untuk mengelola melokalisir konflik sehingga tidak meluas kemana-mana, dan sedapat mungkin diredakan. Jadi *peace building* merupakan proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. Melalui proses *peace building* diharapkan perdamaian negatif berubah menjadi damai positif dimana masyarakat merasakan adanya keadilan sosial dan kesejahteraan yang efektif.

Tujuan proses resolusi konflik adalah menciptakan perdamaian. Bagi Galtung perdamaian itu bisa positif atau negatif. Pertama, *negative peace*, yang ditandai dengan ketiadaan konflik antara kedua pihak atau lebih yang berusaha mencapai kepentingan masing-masing, ketiadaan

asimetri ketakutan, dan ketiadaan perbenturan kepentingan. Ciri-ciri lainnya, adalah ketiadaan penunjukkan kekuatan (*show of force*) dan suasana yang terjadi bukan sekedar tanpa perang, tetapi ketidakadilan sosial dan penindasan ekonomi belum terselesaikan. kedua, *positive peace*, yang ditandai dengan keberadaan suatu perangkat penyelesaian konflik yang bersifat non-koersif untuk mencegah timbulnya konflik. Hal ini termasuk tidak adanya kondisi-kondisi yang menekan atau menyengsarakan manusia, yang meliputi spektrum kondisi yang sangat luas, terjaminnya kebutuhan lahiriah (keamanan dari kekerasan dan kelaparan) dan batiniah (keamanan dari rasa takut, jaminan untuk melakukan ibadah, serta kebebasan untuk berpikir dan berpendapat). Adanya perangkat penyelesaian konflik yang demokratis dan non-koersif, situasi ketiadaan perang, terciptanya keadilan sosial, kemakmuran ekonomi, dan pembagian politik yang luas adalah langkah awal terciptanya *positive peace*⁷⁸.

Upaya untuk menciptakan perdamaian merupakan tujuan agar eskalasi konflik bisa diturunkan. Namun penanganan konflik yang terbaik adalah berupaya untuk menjaga kontinuitas perdamaian. Upaya preventif penanganan konflik menurut hemat penulis juga harus menjadi titik perhatian. Pada konteks inilah, modal sosial menjadi patut untuk dipaparkan tingkat signifikansinya.

⁷⁸ Aji, M Prakoso & Jerry Indrawan. 2019. Memahami Studi Perdamaian Sebagai Bagian dari Ilmu Hubungan Internasional. Jurnal Pertahanan & Bela Negara. Volume 9 Nomor 3 : hal.71

BAB III

TINJAUAN TEORITIS MODAL SOSIAL

Modal sosial secara historis merupakan konsep yang telah berkembang dalam karya para sosiolog klasik hingga kontemporer. Dari Emile Durkheim dan Karl Marx hingga ke Robert D. Putnam, Francis Fukuyama dan Nan Lin. Bhandari & Yasunobu menyatakan : “The intellectual history of the concept of social capital can be traced back to Karl Marx (1818–1883), Emile Durkheim (1858–1917), Georg Simmel (1858–1918), John Dewey (1859–1952), and Max Weber (1864–1920); these scholars emphasise the role of culture in economic development—an implicit use of the idea of social capital. According to Smith (2007), the concept of ‘social capital’ was first invoked by Lyda J. Hanifan in 1916 to explain the importance of community participation in enhancing school performance. After long disappearance of the concept, the concept of social capital was reinvented by a team of Canadian sociologists (Seely et al., 1956) while studying urban communities, by Homans (1961) for a theory of social interactions, by Jacobs (1961) while discussing urban life and neighbourliness, and by Loury (1977) for studying income distribution. All of these authors emphasise the value of social networks and need to preserve them. The first systematic exposition of the term and its entry into the academic debates can be attributed to the work of Pierre Bourdieu (1986) and James S. Coleman (1988). However, it was the pioneering work of Robert D. Putnam (1993) that heavily popularised the term among social scientists and attracted the attention of researchers and policymakers. Being a multi-faceted construct, it is hard to expect a single definition of social capital. Different authors defined social capital in different

ways reflecting their own interest. The most prominent names while discussing the definition of social capital include Pierre Bourdieu (1986), James Coleman (1988), Robert D. Putnam (1993), Francis Fukuyama (1995), Nan Lin (2001), OECD (2001), and the World Bank (2007). The commonality of most definitions is that they emphasise social relations that generate productive benefits. The main difference between these definitions is that they treat social capital as either personal resources or social resources".⁷⁹

Wallis dan Killerby (2004: 240) menyatakan bahwa Istilah modal sosial pertama kali muncul pada tulisan L.J Hanifan (1916) dalam konteks peningkatan kondisi hidup masyarakat melalui keterlibatan masyarakat, niat baik serta atribut-atribut sosial lain dalam bertetangga. Dalam karya tersebut, muncul ciri utama dari modal sosial yakni membawa manfaat internal dan eksternal. Setelah karya Hanifan, *The Rural Modal social hool of Community Center*, istilah modal sosial tidak muncul dalam literatur ilmiah selama beberapa dekade. Pada tahun 1956, sekelompok ahli sosiologi perkotaan Kanada menggunakannya dan diperkuat dengan kemunculan teori pertukaran George C.Homans pada tahun 1961. Pada era ini, istilah modal sosial muncul pada pembahasan mengenai ikatan-ikatan komunitas. Penelitian yang dilakukan James S. Coleman (1988) di bidang pendidikan dan Robert Putnam (1993) mengenai partisipasi dan performa institusi telah menginspirasi banyak kajian mengenai modal sosial saat ini.⁸⁰

Modal sosial adalah istilah yang mengacu pada beragam unsur yang memperkuat kohesivitas sosial. Modal sosial

⁷⁹ Bhandari, Humnath and Kumi Yasunobu. 2009. What is Social Capital? A Comprehensive Review of the Concept. *Asian Journal of Social Science*. Volume 37. Number 3 : pp.489

⁸⁰ Wallis, Joe&Killerby, Paul. 2004, Socio economics and social capital. *International Journal of Social Economics* 31 (3) : pp. 239-258

banyak digunakan dalam mencari formulasi yang efektif untuk mengantisipasi konflik sosial yang bersifat laten. Modal sosial adalah bagian dari beberapa modal yang digunakan dalam analisis sosial. Keberadaan modal sosial memiliki peran yang sama penting dengan keberadaan modal ekonomi dan modal budaya dalam proses pembangunan. Fenomena modal sosial ini oleh banyak ahli bahkan Bank Dunia direkomendasikan sebagai faktor penting yang mendukung kesejahteraan warga. Keberadaan modal sosial (*social capital*) harus diperhatikan dalam pengimplementasian suatu kebijakan yang menyangkut pembangunan masyarakat. Perhatian masyarakat dunia terhadap keberadaan modal sosial mulai meningkat sejak 2 (dua) dekade terakhir. Hal ini ditandai dengan adanya anjuran dari Bank Dunia untuk memperhatikan keberadaan modal sosial dalam pembangunan masyarakat, terutama masyarakat yang mengalami keterbelakangan dan kemiskinan.⁸¹

Para ahli ilmu sosial memiliki perbedaan ketika memberikan gambaran atau pengertian tentang konsep ini :

1. Bourdieu dan Wacquant mendefinisikan modal sosial sebagai “*Social capital is the sum of resources, actual or virtual, that accrue to an individual or a group by virtue of possessing a durable network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition*”⁸². Modal sosial merupakan *agregat* sumber daya baik bersifat aktual maupun virtual, yang bisa bertambah bagi individu atau kelompok yang ditentukan oleh sejauh mana seseorang atau kelompok memiliki jaringan yang bertahan lama yang diperkuat

⁸¹ Ketaren, Amiruddin. 2015. Modal Sosial Petani Dalam Pertanian Berkelanjutan Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Daerah : Studi Modal Sosial Petani di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Nangroe Aceh Darussalam. Unimal Press : hal.7

⁸² Field, John. 2008. Social capital. New York. Routledge : pg.17

dengan hubungan kelembagaan dan adanya pengakuan. Pada literatur lain Bourdieu menyatakan : *“Social capital is “the aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession of a durable network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition - or in other words, to membership in a group - which provides each of its members with the backing of the collectivity-owned capital, a credential which entitles them to credit, in the various senses of the word”*⁸³. Modal sosial; merupakan *agregat* sumber daya aktual dan potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan yang bertahan lama melalui hubungan yang kurang lebih terlembagakan dan ditopang dengan pengakuan bersama atau dengan kata lain, untuk keanggotaan dalam suatu kelompok – modal sosial memberi masing-masing anggotanya dukungan dari modal yang dimiliki kolektiva, sebuah mandat yang memberi mereka hak untuk memperoleh penghargaan, dalam berbagai maknanya.

2. Coleman mendefinisikan modal sosial sebagai : *“Social capital is defined by its function. It is not a single entity, but a variety of different entities having two characteristics in common: they all consist of some aspect of a social structure, and they facilitate certain actions of individuals who are within the structure”*⁸⁴. Pengertian Modal sosial didasarkan atas fungsinya. Modal sosial bukanlah entitas tunggal, namun entitas majemuk yang berbeda dan memiliki dua karakteristik yang sama yakni sebagai bagian dari aspek struktur

⁸³ Haubere, Julia. 2011. Social Capital Theory : Towards a Methodological Foundation. Germany. VS Verlag für Sozialwissenschaften : pg. 38

⁸⁴ Op.cit: pg. 29

sosial dan fungsinya untuk memfasilitasi Tindakan individu dalam struktur sosial.

3. Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai : *“Social capital here refers to features of social organisation, such as trust, norms and networks, that can improve the efficiency of society by facilitating coordinated actions”*⁸⁵ . Modal sosial mengacu pada organisasi sosial seperti *trust*, norma dan jaringan yang ketiganya dapat meningkatkan efisiensi bermasyarakat dengan memfasilitasi proses sosial dengan tindakan sosial yang terkoordinasi. Putnam merevisi definisi modal sosialnya dengan menyatakan bahwa : *by ‘social capital’ I mean features of social life – networks, norms and trust – that enable participants to act together more effectively to pursue shared objectives*⁸⁶. Yang saya maksudkan dengan modal sosial adalah fitur kehidupan sosial yang terdiri dari jaringan, norma dan kepercayaan yang memungkinkan aktor sosial bertindak kolektif yang lebih efektif untuk mengejar tujuan bersama. Pada sumber lain Putnam mendefinisikannya: “Sementara modal fisik mengacu pada benda-benda fisik dan modal manusia mengacu pada sifat-sifat individu, sedang modal sosial mengaju pada hubungan antara individu-individu jaringan sosial dan norma-norma resiprositas dan kepercayaan yang muncul dari mereka. Dalam pengertian ini, modal sosial berhubungan erat dengan apa yang disebut *“civic virtues”* (kebaikan moral). Perbedaannya, “modal sosial” memperhatikan fakta bahwa *civic virtue* menjadi paling kuat ketika tertanam dalam jaringan hubungan sosial resiprokal. Sebuah masyarakat yang

⁸⁵ Ibid : pg. 34

⁸⁶ Ibid : pg. 35

terdiri banyak individu yang memiliki kebaikan moral tetapi terasing tidak mesti memiliki modal sosial”.⁸⁷

4. Cohen dan Prusak mendefinisikan modal sosial sebagai : Modal sosial terdiri banyak hubungan aktif di antara orang-orang: kepercayaan, saling pengertian (*mutual understanding*), dan nilai-nilai bersama dan perilaku yang mengikat anggota jaringan manusia dan komunitas dan memungkinkan terjadinya tindakan kooperatif.⁸⁸
5. Bank Dunia mendefinisikan modal sosial sebagai : “sesuatu yang merujuk ke dimensi institusional, hubungan-hubungan yang tercipta, dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat. Modal Sosial bukan sekedar deretan jumlah institusi atau kelompok yang menopang kehidupan sosial, melainkan dengan spektrum yang lebih luas, yaitu sebagai perekat yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama”.⁸⁹
6. Fukuyama mendefinisikan modal sosial sebagai : “Segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, dan di dalamnya diikat nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi”⁹⁰
7. Eva Cox mendefinisikan modal sosial sebagai : “Modal sosial sebagai suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang di topang oleh jaringan, norma-norma dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisiensi

⁸⁷ Santoso, Thomas. 2020. Memahami Modal Sosial. Surabaya. CV Saga Jawadwipa : hal.16

⁸⁸ Ibid

⁸⁹ Mawardi J, M. 2007. Peranan Social Capital Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. *Volume 3 (2)* : hal.6

⁹⁰ Ibid. hal.7

dan efektifitas koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan bersama”⁹¹

8. Dwipayana mendefinisikan modal sosial sebagai :
“modal sosial adalah kumpulan hubungan yang aktif di antara manusia berupa rasa saling percaya, saling pengertian dan kesamaan nilai dan perilaku yang mengikat anggota dalam sebuah jaringan kerja dan komunitas yang memungkinkan adanya kerjasama. Dengan adanya modal sosial (*social capital*) di masyarakat berupa nilai-nilai atau norma bersama diyakini mampu menjaga kestabilan sosial melalui mekanisme tertentu yang bersifat humanis, meskipun kadang-kadang bersifat irasional”.⁹²
9. Humnath Bhandari dan Kumi Yasunobu mendefinisikan modal sosial sebagai: *Social capital is broadly defined to be a multidimensional phenomenon encompassing a stock of social norms, values, beliefs, trusts, obligations, relationships, networks, friends, memberships, civic engagement, information flows, and institutions that foster cooperation and collective actions for mutual benefits and contributes to economic and social development.*⁹³

Dari serangkaian definisi diatas menunjukkan bahwa modal sosial adalah elemen penting yang dibutuhkan masyarakat untuk mencapai tujuannya. Bahkan seluruh tataran kolektiva mulai yang paling terendah hingga yang paling tinggi membutuhkan modal sosial untuk mencapai tujuannya. Modal sosial memiliki beberapa elemen penting

⁹¹ Ibid. hal.7

⁹² Ketaren, Amiruddin. Loc.cit ; hal.10

⁹³ Bhandari, Humnath and Kumi Yasunobu. Loc.cit : pp. 487

yang menjadi unsur penyusunnya. Bourdieu mengemukakan 3 elemen penting modal sosial :⁹⁴

1. *The social relationship that enables actors to gain access to resources possesses by their associates (i.e., it is resources embedded in social connections).* Modal sosial adalah hubungan sosial yang memungkinkan individu mendapatkan akses ke sumber daya yang dimiliki oleh rekan mereka yakni sumber daya yang tertanam dalam jejaring sosial.
2. *The amount of those resources produced by the totality of the relationships between actors, rather than merely a common quality of the group.* Jumlah sumber daya yang dimiliki dan dihasilkan dari totalitas hubungan individu-individu dan bukan hanya ditentukan oleh kualitas umum yang dimiliki kelompok.
3. *The quality of those resources.* Modal sosial juga ditentukan oleh kualitas sumber daya yang dimiliki.

Coleman menyebutkan 3 dimensi dalam modal sosial yang sangat penting untuk menelaah dan mengenali indikator modal sosial di ruang publik :⁹⁵

1. *The obligations and expectations arising from a sense of trust in the social environment. A sense of trust raises expectations and obligations in a social environment.* Kewajiban dan harapan yang timbul dari rasa percaya terhadap lingkungan sosial. Rasa percaya meningkatkan harapan dan kewajiban pada lingkungan sosialnya.
2. *A healthy flow of information in the social structure which is important to encourage the development of*

⁹⁴ Ibid : pp.490

⁹⁵ Jumirah & Heni Wahyuni. 2018. The Effect Of Social Capital on Welfare in Indonesia. Journal of Indonesian Economy and Business. Volume 33, Number 1 : pp.66

community activities. Arus informasi yang sehat dalam struktur sosial sangat penting untuk mendorong perkembangan kegiatan masyarakat.

3. *The norms that must be adhered to by the society, enforced with clear and effective sanctions*. Norma-norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat, ditegakkan dengan sanksi yang jelas dan efektif.

Dengan mengutip berbagai sumber, Rusdi Syahra menjelaskan modal sosial memiliki sepuluh unsur sebagai berikut :⁹⁶

1. Kepercayaan (*trust*) adalah kecenderungan untuk menepati sesuatu yang telah dikatakan baik secara lisan ataupun tulisan. Hubungan yang familiar dan stabil di kalangan pelaku-pelaku sosial dalam organisasi dapat mengurangi keraguan para partisipan struktur sosial mengenai motivasi orang lain dan meredakan kegelisahan akan tindakan-tindakan orang lain yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Agar orang-orang dengan kepentingan berbeda dapat bekerjasama untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah mereka tetapkan, mereka tidak hanya perlu mengetahui satu sama lain tetapi juga mempercayai satu sama lain untuk mencegah adanya eksploitasi maupun kecurangan dalam hubungan mereka.
2. Solidaritas, kesediaan untuk secara sukarela ikut menanggung suatu konsekuensi sebagai wujud adanya rasa kebersamaan dalam menghadapi suatu masalah.
3. Toleransi, kesediaan untuk memberikan konsensi atau kelonggaran baik dalam bentuk materi maupun non

⁹⁶ Andeas & Enni Savitri. 2016. Peranan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial : Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Kabupaten Meranti Dan Rokan Hilir. Universitas Riau : hal. 22-23

materi sepanjang tidak berkenan dengan hal-hal yang bersifat prinsipil.

4. Tanggung jawab adalah kesadaran untuk memenuhi kewajiban sebagai cerminan rasa peduli terhadap masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama.
5. Kerjasama adalah suatu keadaan yang mencerminkan kesediaan dari semua pihak yang terlibat memberikan kontribusi yang seimbang dalam melakukan berbagai hal yang menyangkut kepentingan bersama. Kerjasama juga merupakan upaya penyesuaian dan koordinasi tingkah laku yang diperlukan untuk mengatasi konflik ketika tingkah laku seseorang atau kelompok dianggap menjadi hambatan oleh kelompok lain, sehingga akhirnya tingkah laku mereka bisa cocok satu sama lain.
6. Kebersamaan adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan adanya kesediaan untuk terlibat dalam kegiatan yang menyangkut kepentingan bersama.
7. Kemandirian adalah sikap dan perilaku yang mengutamakan kemampuan sendiri untuk memenuhi berbagai kebutuhan tanpa tergantung kepada atau mengharapkan bantuan orang lain.
8. Keterbukaan adalah kesediaan menyampaikan secara apa adanya segala hal yang orang lain yang berkepentingan menganggap bahwa mereka perlu mengetahuinya.
9. Keterusterangan adalah kesediaan untuk menyampaikan secara apa yang sesungguhnya yang dipikirkan atau dirasakan tanpa dihalangi oleh perasaan ewuh, pekewuh, sungkan atau takut.

10. Empati adalah kemampuan memahami apa yang dirasakan oleh orang lain atau kemampuan untuk menempatkan diri dalam situasi orang lain.

Pada sumber lain disebutkan bahwa komponen atau unsur modal sosial terdiri dari enam unsur yakni :⁹⁷

1. *Participation in a network*. Kemampuan sekelompok orang untuk melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial, melalui berbagai variasi hubungan yang saling berdampingan dan dilakukan atas dasar prinsip kesukarelaan (*voluntary*), kesamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*), dan keadaban (*civility*). Kemampuan anggota kelompok atau anggota masyarakat untuk selalu menyatukan diri dalam suatu pola hubungan yang sinergis akan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kuat tidaknya modal sosial suatu kelompok.
2. *Reciprocity*. Kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Pola pertukaran terjadi dalam suatu kombinasi jangka panjang dan jangka pendek dengan nuansa altruisme tanpa mengharapkan imbalan. Pada masyarakat dan kelompok-kelompok sosial yang terbentuk yang memiliki bobot resiprositas kuat akan melahirkan suatu masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial yang tinggi.
3. *Trust*. Suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling

⁹⁷ Inayah. 2012. Peranan Modal Sosial dalam Pembangunan. Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 12 (1) : hal. 44-45

mendukung. Paling tidak, yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya (Putnam, 1993). Tindakan kolektif yang didasari saling percaya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk dan dimensi terutama dalam konteks kemajuan bersama. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk bersatu dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial.

4. *Social norms*. Sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat dalam suatu entitas sosial tertentu. Aturan-aturan ini biasanya ter-institusionalisasi, tidak tertulis tapi dipahami sebagai penentu pola tingkah laku yang baik dalam konteks hubungan sosial sehingga ada sanksi sosial yang diberikan jika melanggar. Norma sosial akan menentukan kuatnya hubungan antar individu karena merangsang kohesifitas sosial yang berdampak positif bagi perkembangan masyarakat. Oleh karenanya norma sosial disebut sebagai salah satu modal sosial.
5. *Values*. Sesuatu ide yang telah turun temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat. Nilai merupakan hal yang penting dalam kebudayaan, biasanya ia tumbuh dan berkembang dalam mendominasi kehidupan kelompok masyarakat tertentu serta mempengaruhi aturan-aturan bertindak dan berperilaku masyarakat yang pada akhirnya membentuk pola kultural.
6. *Proactive action*. Keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk tidak saja berpartisipasi tetapi senantiasa mencari jalan bagi keterlibatan anggota kelompok dalam suatu kegiatan masyarakat. Anggota kelompok melibatkan diri dan mencari kesempatan yang dapat memperkaya hubungan-hubungan sosial

dan menguntungkan kelompok. Perilaku inisiatif dalam mencari informasi berbagai pengalaman, memperkaya ide, pengetahuan, dan beragam bentuk inisiatif lainnya baik oleh individu maupun kelompok, merupakan wujud modal sosial yang berguna dalam membangun masyarakat.

Sementara dalam Kamus Sosiologi oleh Abercrombie, Hill dan Turner menyebutkan 3 unsur penting dan utama modal sosial, sebagai berikut :⁹⁸

1. Norma adalah harapan tentang perilaku yang pantas yang berfungsi sebagai pedoman umum tindakan sosial. Perilaku manusia menampilkan keteraturan tertentu yang merupakan hasil dari kepatuhan terhadap norma-norma bersama. Dalam pengertian ini tindakan manusia ditata oleh aturan. Sebuah norma sosial tidak selalu berarti perilaku aktual, dan perilaku normatif tidak hanya merupakan pola yang paling sering terjadi. Karena istilah ini mengacu pada harapan masyarakat tentang perilaku yang benar atau pantas, norma menyiratkan adanya legitimasi, persetujuan dan preskripsi
2. Istilah jaringan digunakan untuk menggambarkan pola hubungan sosial yang teramati diantara unit-unit analisis individual. Para sosiolog menurunkan pola-pola ini melalui pemetaan interaksi. Muatan dalam hubungan sosial yang terlibat dalam jaringan beragam dari kasus ke kasus: misalnya para sosiolog mengkaji pola-pola pertemanan, kekerabatan, pengaruh, penguasaan, pertukaran ekonomi dan pendampingan. Tergantung pada fokus penelitian, unit-unit dalam

⁹⁸ Abercrombie, Nicholas. Hill, Stephen & Turner, Bryan S. 2010. Kamus Sosiologi. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

jaringan dapat berupa individu, kelompok maupun entitas korporasi. Para peneliti menunjukkan jaringan sebagai peta yang memuat serangkaian titik-titik, yang mewakili unit dan garis-garis penghubung titik-titik, yang mewakili interaksi diantara unit-unit.

3. *Trust* merupakan sebuah konsep yang menjadi trend penting dalam ilmu-ilmu sosial. *Trust* adalah salah satu fenomena penting yang mendapat perhatian ilmu sosiologi pada sekitar dua dekade sebelum akhir abad 20. Dalam masyarakat tradisional, *trust* adalah dasar transaksi sosial dalam mengikat perjanjian, kerjasama, perserikatan dan lain-lain. Sementara dalam masyarakat modern, *trust* menjadi lebih penting, sekalipun sudah ada perangkat-perangkat hukum yang modern. Sementara itu Worchel dalam Bartkus dan Davis (2009) memiliki definisi yang berbeda tentang *trust* yaitu : "*Trust as a belief, expectancy or feeling deeply rooted in the personality, with origins in the individual's early psayachosocial development*". Worchel menyatakan bahwa *trust* sebagai kepercayaan merupakan suatu pengharapan atau perasaan yang sangat mendalam yang berakar dalam kepribadian manusia, yang kemunculannya berawal dalam perkembangan psikososial seorang individu. *Trust* menjadi pendorong kemajuan masyarakat. Membuat seluruh sistem dalam masyarakat berjalan sebagaimana mestinya. Mendorong kemajuan ekonomi dan menjadi sebab bagi produktivitas masyarakat dalam membangun negaranya. Produktivitas yang tinggi akan memungkinkan suatu bangsa untuk mewujudkan kemakmuran bagi bangsanya. Niklas Luhmann dalam Turner (2006) menjelaskan bahwa ada keterkaitan

trust dengan pertumbuhan kompleksitas masyarakat, ketidakpastian dan resiko yang menjadi ciri khas masyarakat kontemporer. *Trust* bukanlah sumber daya kuno dari tipikal masyarakat tradisional namun *trust* merupakan unsur yang teramat penting bagi pengembangan modernitas. Secara sosiologis, politis bahkan ekonomi *trust* menduduki posisi yang teramat penting. Kohesivitas sosial, demokratisasi dan modernisasi serta kesejahteraan sosial semuanya bergantung sampai sejauh mana masyarakat membangun *trust* diantara mereka. *Trust* merupakan salah satu pilar dari modal sosial merupakan unsur yang mewujudkan sikap saling percaya yang lambat laun akan menyebar di masyarakat bukan hanya antara individu dengan individu namun juga antara kelompok dengan kelompok. Rasa saling percaya yang timbul di masyarakat akan dengan sendirinya membentuk jaringan sosial yang akan dimapankan dalam wujud pranata. Rasa saling percaya adalah sebuah sikap yang didalamnya terkandung sikap-sikap yang mulia antara lain kejujuran, keadilan, egaliter, toleransi yang tinggi dan kemurahhatian. Elemen utama sebuah modal sosial bukanlah sesuatu yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya, melainkan harus merupakan sebuah upaya kreatif dan inovatif serta disosialisasikan atau ditransmisikan melalui mekanisme-mekanisme sosial budaya didalam sebuah unit sosial seperti keluarga, komunitas, asosiasi suka rela, negara, dan sebagainya.

Perspektif lain tentang elemen atau unsur-unsur modal sosial dikemukakan oleh Santoso, sebagai berikut :⁹⁹

1. Kepercayaan (*Trust*)

Menurut Putnam (1993), kepercayaan sosial dalam dunia modern muncul dari dua sumber: norma resiprositas dan jaringan partisipasi warga. Kepercayaan merupakan unsur pokok dalam transaksi ekonomi kendati para ekonom jarang membahas gagasan ini. Kepercayaan adalah sejenis pelumas yang memungkinkan partisipasi volunter dalam produksi dan perdagangan. Bahkan Arrow (1972) pernah mengatakan bahwa “Setiap transaksi ekonomi mempunyai unsur kepercayaan di dalamnya. Dapat dikemukakan secara logis bahwa banyak keterbelakangan ekonomi di dunia dapat dijelaskan dengan kurangnya “*mutual confidence*”. Kepercayaan adalah penting karena keberadaan atau ketiadaannya berpengaruh pada apa yang akan kita lakukan. Selain itu, dengan adanya rasa saling percaya, suatu transaksi yang menguntungkan dapat berjalan dengan lancar. Anda mempercayai seseorang (atau lembaga) untuk mengerjakan sesuatu bukan semata-mata karena dia berjanji mau melakukannya. Anda mempercayai orang ini semata-mata Anda mengenal wataknya, pilihan-pilihan dan akibat dari berbagai tindakannya, dasar pengetahuannya dan kemampuannya. Pendeknya, janjinya harus bisa dipercaya. Kepercayaan antara orang-orang dan lembaga saling berhubungan. Kalau kepercayaan Anda terhadap seseorang goyah, maka Anda tidak akan mempercayai janjinya dan tidak akan

⁹⁹ Santoso, Thomas. Loc.cit : hal.7-10

mengadakan suatu perjanjian dagang atau transaksi ekonomi dengannya. Kepercayaan didasarkan pada reputasi, dan reputasi diperoleh berdasarkan perilaku yang teramati. Reputasi adalah suatu aset, kalau seseorang melakukan investasi dalam bentuk reputasi, dia akan menikmati manfaatnya.

2. Upaya-Upaya Kooperatif Antar Anggota Organisasi

Di antara para anggota organisasi mulai dari pimpinan tertinggi sampai pegawai di level paling bawah, perlu ada kesepakatan-kesepakatan tentang *rule of game* dalam organisasi, tentang sasaran dan tujuan yang harus dicapai dan tentang apa yang harus dilaksanakan dan apa yang tak boleh dilaksanakan dalam organisasi. Ada empat situasi di mana para anggota organisasi bisa memegang teguh kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka buat bersama: (1) para anggota organisasi saling mepedulikan dan memperhatikan satu sama lain; (2) para anggota dihargai, dan mereka tahu bahwa dirinya dihormati; (3) kesepakatan-kesepakatan itu diperkuat dengan mengenakan suatu sanksi kepada anggota yang perilakunya menyimpang; dan (4) ada pihak luar yang menegakkan kesepakatan-kesepakatan itu. Kalau kesepakatan-kesepakatan diimplementasikan secara konsisten, sesuai aturan main dalam organisasi, maka akan tercipta suatu iklim yang kondusif bagi pelaksanaan tugas-tugas dalam organisasi, yang selanjutnya berimplikasi pada produktivitas organisasi.

3. *Mutual Affection*

Banyak sekali transaksi berlangsung hanya karena orang-orang yang terlibat di dalamnya saling mepedulikan satu sama lain, mereka secara rasional

percaya bahwa semua orang saling mempedulikan satu sama lain sehingga mereka saling percaya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka. Para ekonom memodelkan situasi demikian sebagai suatu situasi di mana para anggota organisasi atau kelompok mempunyai *interdependent utilities*. Rumah tangga mencontohkan suatu institusi yang dibangun berdasarkan *care* dan *affection*. Karena biaya pemantauan dalam rumah tangga cukup rendah (sekelompok orang yang tinggal bersama atau yang erat interaksinya dalam kehidupan sehari-hari akan mampu mengamati dan saling mengenal satu sama lain dengan baik), institusi ini mengalami lebih sedikit masalah moral hazard dan masalah-masalah lain dibanding dengan institusi yang lebih kompleks lainnya.

4. Penciptaan Jaringan Sosial

Seseorang mungkin mula-mula menganggap jaringan sebagai sistem saluran komunikasi untuk melindungi dan mempromosikan hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal merupakan gagasan yang lebih tajam, yang mencerminkan kepercayaan bersama. Jaringan mencakup domain yang luas. Jaringan ini berupa jaringan yang terajut dengan erat seperti keluarga inti dan bersifat ekstensif seperti sebuah organisasi voluntar. Kita dilahirkan dalam jaringan tertentu dan memasuki jaringan-jaringan baru. Jadi, jaringan-jaringan itu sendiri saling berhubungan satu sama lain. Hubungan-hubungan jaringan juga dapat diekspresikan dalam bentuk saluran, meski keputusan untuk membentuk saluran yang menghubungkan jaringan-jaringan merupakan keputusan kolektif. Membangun sebuah saluran

melibatkan biaya, yaitu biaya untuk memeliharanya. Dalam sebagian konteks, biaya itu disebut “biaya transaksi”. Keinginan seseorang untuk bergabung dalam sebuah jaringan mungkin disebabkan adanya nilai bersama. Secara umum, seseorang memutuskan untuk berinvestasi dalam sebuah saluran karena saluran itu berkontribusi langsung pada kesejahteraan seseorang (berinvestasi dalam persahabatan) atau karena saluran itu memiliki makna ekonomi (bergabung dalam serikat kerja), atau karena keduanya (memasuki pernikahan). Kadang penciptaan saluran tidak melibatkan biaya sama sekali, karena tindakan untuk menciptakan saluran itu merupakan sesuatu yang menambah berkah bagi kehidupan seseorang itu. Mempersiapkan makan dan makan bersama; memberikan ekspresi personal dan dekoratif (sekadar basa-basi) pada lingkungan seseorang; mampu menceritakan perasaannya kepada orang lain yang dipilihnya, dan semuanya ini dirasakan sebagai kebutuhan.

Pandangan lain yang berbeda menyebutkan dimensi modal sosial ada dua yakni dimensi kognitif dan struktural. Penjelasannya sebagai berikut :¹⁰⁰

1. Dimensi Kognitif

Dimensi kognitif, berkaitan dengan nilai-nilai, sikap dan keyakinan yang mempengaruhi kepercayaan, solidaritas dan resiprositas yang mendorong ke arah terciptanya kerjasama dalam masyarakat guna mencapai tujuan bersama. Setiap kelompok etnik sebenarnya memiliki dimensi kognitif – atau bisa juga disebut sebagai dimensi kultural – ini, sekalipun

¹⁰⁰ Syahra, Rusydi. Loc.cit : hal.9

dalam kadar yang berbeda. Ada yang kaya dengan nilai-nilai budaya sebagai modal sosial yang memungkinkan terpeliharanya hubungan yang harmonis, baik sesama warga masyarakat secara internal maupun dengan orang-orang dari kelompok suku bangsa atau etnik yang berbeda. Sementara kelompok etnik tertentu lebih menekankan nilai-nilai solidaritas dan kerjasama dalam kelompok sendiri dan secara tradisional tidak memiliki pedoman untuk berinteraksi secara baik dengan kelompok lain. Pada nilai-nilai budaya yang dimiliki kelompok masyarakat yang pertama secara tradisional terdapat keseimbangan antara modal sosial yang mengatur keharmonisan dan solidaritas hubungan internal sesama anggota kelompok, yang disebut dengan istilah *bonding social capital* atau modal sosial pengikat, dengan modal sosial yang memungkinkan terciptanya kerjasama dan hubungan yang saling menguntungkan dengan warga dari kelompok etnik lain, yang disebut dengan istilah *bridging social capital* atau modal sosial jembatan. Disebut modal sosial jembatan karena menjembatani perbedaan-perbedaan yang terdapat antara kelompok masyarakat yang memiliki nilai-nilai budaya yang berbeda, dengan lebih mengutamakan persamaan yang terdapat pada kedua pihak. Kelompok masyarakat yang secara tradisional kurang memiliki nilai-nilai budaya yang merupakan modal sosial jembatan ini cenderung lebih mementingkan kelompok sendiri, bersifat eksploitatif dan mudah terlibat dalam konflik dengan kelompok lain. Konflik akan lebih mudah lagi terjadi kedua pihak sama-sama tidak memiliki modal sosial jembatan.

2. Dimensi Struktural

Dimensi struktural, yang berupa susunan, ruang lingkup organisasi dan lembaga-lembaga masyarakat pada tingkat lokal, yang mewadahi dan mendorong terjadinya kegiatan-kegiatan kolektif yang bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat. Dimensi struktural ini sangat penting karena berbagai upaya pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan lebih berhasil bila dilakukan melalui kelembagaan sosial pada tingkat lokal. Dimensi struktural modal sosial yang secara umum adalah berupa jaringan hubungan dalam kelembagaan mendapat perhatian penting di dalam menelaah pentingnya modal sosial dalam pembangunan ekonomi.

Keseluruhan perspektif tentang dimensi atau unsur-unsur modal sosial menunjukkan bahwa modal sosial adalah penopang stabilitas sosial. Stabilitas sosial adalah prasyarat bagi kemajuan masyarakat. Stabilitas sosial memungkinkan setiap kelompok sosial dapat mentransformasikan dirinya kearah yang lebih baik dengan kontestasi yang sehat.

Proses sosial yang ditopang oleh modal sosial akan menghasilkan pola interaksi sosial yang transformatif diberbagai bidang. Migheli menyatakan *“Any commercial transaction and most of human relationships are based on trust. The buyer trusts that the seller is delivering a good or a service in conformity with the contract. On the other hand, the seller trusts that the buyer will pay the agreed upon price on time. Trust also enhances the efficiency and the effectiveness of*

large scale organizations”¹⁰¹. Setiap transaksi komersial dan sebagian besar hubungan manusia didasarkan pada kepercayaan. Pembeli percaya bahwa penjual memberikan barang atau layanan sesuai dengan kontrak. Di sisi lain, penjual percaya bahwa pembeli akan membayar harga yang disepakati tepat waktu. Kepercayaan juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dalam skala besar.

Fukuyama dan Putnam menyatakan bahwa “*Previous researches show that trust and honesty could reduce transaction cost, create more efficient reciprocal relationship, and diminish frictions within social life*”¹⁰²

Dalam fenomena politik, *trust/kepercayaan* dipercaya dapat meningkatkan relasi antar pemerintah dengan warga negara. Warga yang mempercayai pemerintahnya adalah modal dasar terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Putnam dalam Inayah menyatakan “Modal sosial yang tinggi membawa dampak pada tingginya partisipasi masyarakat sipil dalam berbagai bentuknya. Akibat positif yang dihasilkan adalah pemerintah akan memiliki akuntabilitas yang lebih kuat. Tingginya modal sosial akan mendorong efektifitas pemerintahan, beragam determinan memungkinkan negara berfungsi secara lebih efektif dan memiliki legitimasi. Modal sosial tinggi yang dimiliki masyarakat lebih dapat memfasilitasi hubungan antara negara dan rakyat. Hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat akan menjamin stabilitas politik negara. Di tingkat lokal, modal sosial dapat menjembatani hubungan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyebarkan

¹⁰¹ Migheli, Matteo. 2012. Assessing Trust Through Social Capital? A Possible Experimental Answer. *American Journal of Economics and Sociology*, Vol. 71 (2) : pp.299

¹⁰² Harjanti, Dhyah & Noerchoidah. 2017. The Effect of Social Capital and Knowledge Sharing On Innovation Capability. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol.19. No. 2 : hal.73

informasi dan mengimplementasikan program-program pembangunan. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, keterbukaan pemerintah pada masyarakat, adanya komitmen dan keinginan yang kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk membangun, serta adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan akan mendorong terciptanya pembangunan sistem pemerintahan yang baik dimana akuntabilitas dan transparansi pemerintahan berimbang dengan akses dan kontrol masyarakat terhadap pemerintahan. Hal ini juga dapat mendorong demokrasi tumbuh dari bawah dan memungkinkan pembangunan politik tidak hanya pada arus pusat tapi juga lokal. Di samping itu, negara melalui sistem pemerintahan yang baik dapat mendorong menguatnya modal sosial yang mendukung berkembangnya kepercayaan, nilai-nilai, dan norma yang baik dengan menciptakan situasi yang kondusif dalam mempererat jaring-jaring sosial di dalam masyarakat dan merangsang tumbuhnya sikap proaktif masyarakat dalam pembangunan”¹⁰³

Dalam kehidupan agama, studi yang dilakukan Martin van Bruinessen (2004) tentang modal sosial di Surabaya merupakan contoh yang baik. Sekurang-kurangnya sejak awal 1980-an, kajian Alkitab berskala kecil dan kelompok doa yang disebut persekutuan doa menjadi semakin populer di kalangan orang Kristen Protestan. Para penganut Katolik (pada akhir 1980-an) kemudian melakukan hal yang sama dalam kelompok-kelompok kecil yang disebut kelompok doa karismatik. Persekutuan doa terdiri 10 sampai 25 orang, sebagian besar merupakan pasangan suami-istri, yang menghadiri gereja yang sama, yang bertemu secara rutin (biasanya sekali dalam seminggu) di rumah anggota untuk

¹⁰³ Inayah. Loc.cit : hal.48

membaca Alkitab dan berdoa bersama. Para anggota kelompok pada umumnya tinggal di lingkungan yang sama dan umumnya mempunyai status sosial-ekonomi yang kurang lebih sama. Hal ini mempermudah berkembangnya ikatan emosional yang lebih erat dan lebih akrab di antara para anggota. Masalah pribadi anggota atau masalah keluarga sering kali didiskusikan di dalam kelompok itu; para anggota saling membantu satu sama lain dan berdoa bersama, meminta pertolongan Ilahi, untuk memecahkan masalah mereka. Bagi sebagian orang, persekutuan doa merupakan suatu jaringan yang menghubungkan para anggota dengan orang lain; bagi banyak orang, persekutuan doa itu merupakan jaringan terpenting dan satu-satunya jaringan yang bermuatan emosionalitas (persekutuan doa lebih penting daripada keluarga seseorang). Para anggota juga cenderung melakukan kontak di luar pertemuan mingguan tersebut.¹⁰⁴

Beberapa contoh diatas menunjukkan kegunaan modal sosial dari berbagai segmen kehidupan. Secara teoritis, modal sosial memiliki kegunaan dan fungsi yang sangat penting bagi perkembangan masyarakat. Godwin menyatakan bahwa “Pembangunan jangka panjang membutuhkan peningkatan modal-modal secara produktif, baik berupa modal finansial (*financial capital*), modal alam (*natural capital*), modal fisik (*produce capital*), modal manusia (*human capital*), serta modal sosial (*social capital*). Modal-modal tersebut memberikan pengaruh pada pola produksi, distribusi dan konsumsi. *Social capital* sendiri digambarkan sebagai kepercayaan, kesepahaman bersama, norma, serta pengetahuan yang mampu mendorong kegiatan dan koordinasi ekonomi. *Social capital* juga menjadi perekat bagi

¹⁰⁴ Santoso. Loc.cit : hal.12

modal- modal lain dalam mengakselerasi proses ekonomi, sehingga mampu menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan. Menurutnya, yang membedakan modal sosial dengan modal-modal yang lainnya, adalah keempat modal lainnya digunakan secara langsung dalam proses produksi, sehingga mengurangi jumlah, nilai, dan/atau kapasitas modal tersebut, sementara modal sosial tidak digunakan secara langsung dalam produksi dan tidak mengalami penurunan manfaat”¹⁰⁵.

Modal sosial menjadi pengikat modal-modal lainnya yang dengan kata lain tanpa modal sosial modal lainnya akan bermasalah. Oleh karena itu modal sosial harus dikelola secara baik. Seluruh komponen atau unsur-unsurnya harus dijaga agar tetap bertahan. Karena bagaimanapun juga modal sosial dapat berubah sejalan dengan dinamika kemasyarakatan yang semakin kompleks.

Modal sosial sendiri memiliki dua tipologi yakni modal sosial terikat (*bonding social capital*) dan modal sosial yang menjembatangi (*bridging social capital*), penjelasannya sebagai berikut :¹⁰⁶

1. Ciri khas dari modal sosial terikat yakni anggota kelompok maupun kelompok dalam konteks ide, relasi dan perhatian lebih berorientasi kedalam (*inward looking*), dengan ragam masyarakat yang homogenius. Fokus perhatiannya adalah menjaga nilai-nilai yang turun temurun telah diakui dan dijalankan sebagai bagian dari tata perilaku dan perilaku moral dari entitas sosial tersebut, umumnya mereka konservatif.

¹⁰⁵ Dollu, Emanuel Bate Satria. 2020. Modal Sosial : Studi tentang Kumpo Kampo sebagai Strategi Melestarikan Kohesivitas Pada Masyarakat Larantuka di Kabupaten Flores Timur. Jurnal Warta Governare Vol.1 .No. 1 : hal. 62-63

¹⁰⁶ Supono, Boedyo. 2011. Peranan Modal Sosial dalam Implementasi Manajemen dan Bisnis. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 11, No. 1 : hal.12

2. Sedangkan modal sosial yang menjembatani menggunakan prinsip-prinsip yang universal mengenai (a) persamaan, yakni bahwa setiap anggota kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama, (b) kebebasan, yakni setiap anggota kelompok bebas berbicara, bebas mengemukakan pendapat atau ide-ide, sehingga memberikan kontribusi terhadap perkembangan organisasi, (c) kemajemukan dan humanitarian yakni nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap hak asasi setiap anggota dan orang lain merupakan prinsip dasar dalam mengembangkan kelompok atau group. Kemajemukan disini membangun kesadaran bahwa hidup dengan beragam suku, ras, budaya dan cara berfikir yang berbeda adalah hal yang logis, biasanya kelompok ini memiliki sikap dan pandangan terbuka dan mengikuti perkembangan dunia diluar kelompoknya (*outward looking*).

Modal sosial terikat memberikan arahan bagi penguatan internal suatu kolektiva sementara modal sosial yang menjembatangi memiliki peran menguatkan hubungan antar kelompok sosial. Modal sosial yang menjembatangi memiliki prinsip-prinsip yang menguatkan interaksi dan interkoneksi antar kelompok untuk mentransformasi sistem sosial yang lebih besar.

Secara filosofis, modal sosial pada prinsipnya ditegaskan dengan prinsip interkoneksi. Friedson menyatakan : *"The theory of social capital is, at heart, most straightforward. Its central thesis can be summed up in two words: relationships matter. By making connections with with one another, and keeping them going over time, people are able to work together to achieve things they either could not achieve by themselves, or*

could only achieve with great difficulty. People connect through a series of networks and they tend to share common values with other members of these networks; to the extent that these networks constitute a resource, they may be seen as forming a kind of capital. As well as being useful in its immediate context, this stock of capital can often be drawn on in other settings. In general, then, it follows that the more people you know, and the more you share a common outlook with them, the richer you are in social capital.”¹⁰⁷

Teori modal sosial, pada dasarnya, adalah teori yang paling lugas. Tesis sentralnya dapat diringkas dalam dua kata: hubungan sosial itu penting dan utama. Dengan membuat koneksi satu sama lain, dan menjaga hubungan sosial atau interkoneksi itu maka masyarakat akan tetap eksis dan berkembang dari waktu ke waktu, orang dapat bekerja sama untuk mencapai hal-hal yang tidak dapat mereka capai sendiri, atau hanya dapat dicapai dengan susah payah. Orang-orang terhubung melalui serangkaian jaringan dan mereka cenderung berbagi nilai-nilai yang sama dengan anggota lain dalam jaringan tersebut. Sejauh jaringan ini merupakan sumber daya, mereka dapat dilihat sebagai semacam modal. Selain berguna dalam konteks langsungnya, stok modal ini sering dapat ditarik dalam pengaturan lain. Secara umum, maka, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak orang yang Anda kenal, dan semakin Anda berbagi pandangan yang sama dengan mereka, semakin kaya Anda dalam modal sosial.

Menjaga dan memperkuat modal sosial seharusnya menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat. Dalam penelitiannya Hardini & Wasiaturrahma menyatakan bahwa : *“Social capital is proven to be used in influencing the level of individual and social happiness. Therefore,*

¹⁰⁷ Field, John. Loc.cit : pp.1

*polymakers need to explore how public policies can support social capital formation to increase happiness. Concerning our results, efforts may need to encourage primarily informal social interactions, interpersonal trust, and trust in the institutional system by optimizing each layer's instruments, from the sub-district, urban village, and hamlet, neighborhood, and family. It is essential to strengthening informal social interactions that lead to increased community participation because this is closely related to aspects of trust, including creating a safe and secure atmosphere. Furthermore, when community participation has increased, the government facilitates community economic acceleration by fostering home industries, village-owned enterprises, and micro, small, and medium enterprises to increase community happiness"*¹⁰⁸. Modal sosial terbukti dapat digunakan dalam mempengaruhi tingkat kebahagiaan individu dan sosial. Oleh karena itu, pembuat kebijakan perlu menggali bagaimana kebijakan publik dapat mendukung pembentukan modal sosial untuk meningkatkan kebahagiaan. Suatu usaha mungkin perlu dilakukan untuk mendorong, terutama, interaksi sosial informal, kepercayaan interpersonal, dan kepercayaan pada sistem kelembagaan dengan mengoptimalkan instrumen masing-masing lapisan, dari kecamatan, kelurahan, dan dusun, lingkungan, dan keluarga. Hal ini penting untuk memperkuat interaksi sosial informal yang mengarah pada peningkatan partisipasi masyarakat karena hal ini erat kaitannya dengan aspek kepercayaan, termasuk menciptakan suasana yang aman dan terjamin. Selanjutnya, ketika partisipasi masyarakat meningkat, pemerintah memfasilitasi percepatan ekonomi

¹⁰⁸ Hardini, Mimi & Wasiaturrahma. 2020. Social capital dimensions and individual happiness in Indonesia: The micro-level study. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 18(2): pp.156

masyarakat dengan membina industri rumah tangga, badan usaha milik desa, dan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan kebahagiaan masyarakat.

Menjaga modal sosial dengan menggalakkan dan menciptakan partisipasi sosial masyarakat memungkinkan setiap aktor sosial terlibat penuh untuk membentengi modal sosial mereka. Keterlibatan semua komponen akan menjamin kehancuran modal sosial. Modal sosial memiliki signifikansi baik di tingkat level mikro maupun makro. ¹⁰⁹

Kegunaan modal sosial di level mikro dan makro, jika diperkuat, dapat mengantisipasi setiap problem sosial yang bisa memberikan efek destruktif pada ikatan sosial baik ditingkat modal sosial terikat maupun modal sosial yang menjembatangi. Modal sosial pada prinsipnya dapat menguatkan kohesivitas sosial. Tingginya tingkat kohesivitas sosial dengan sendirinya dapat mencegah masyarakat dari konflik sosial yang tidak perlu. Suatu konflik sosial yang justru merusak tatanan sosial yang konstruktif dan transformatif.

¹⁰⁹ Tanjung, Fahmi & Muryani. 2019. The Influence of Social Capital in Economic Development in Indonesia: Macro Data Analysis of 2012 and 2014. *International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering (ijasre)*, Vol 5 (3) : pp.129

BAB IV

Modal Sosial sebagai Antisipator Konflik Sosial

Masyarakat adalah suatu kolektiva yang senantiasa berkembang dan dinamis. Perkembangan dan dinamisasi pada prinsipnya diharapkan menciptakan kemajuan dan kesejahteraan sosial. Namun terkadang proses perkembangan masyarakat bertentangan dengan azas-azas kesejahteraan sosial. Alih-alih menciptakan kesejahteraan, konflik bisa sangat destruktif bagi masyarakat. Fenomena Arab Spring yang meluluhlantakkan semenanjung Arab dengan konflik yang tak berkesudahan dapat membuat negara seperti Libya dan Yaman menjadi negara yang gagal.

Konflik dan modal sosial memiliki perbedaan mendasar. Jika konflik mengoyak ikatan sosial maka modal sosial sebaliknya. Perbedaan ini menimbulkan relasi yang kontradiktif. Bila modal sosial rendah potensi konflik menjadi manifes sangat memungkinkan. Begitupula, jika modal sosial tinggi maka konflik bisa dicegah setidaknya-tidaknya tetap berada ditingkat konflik laten. Status konflik sosial masih problematik. Apakah konflik sosial menyebabkan koyaknya modal sosial atau semakin memperkuatnya? Aghajanian menyatakan *"The relationship between conflict and social capital can go both ways. On the one hand, we would expect that conflict increases tension and decreases trust. As reports of violence are spread, individuals will be wary of others, cooperation is likely to decrease, and community members become divided. On the other hand, we could expect conflict and violence to force individuals to rely and depend on each other. Social ties and capital might be formed on the basis of solidarity in the face of an external threat. For this reason,*

while bridging social capital might decrease, bonding social capital will increase. I.e. members of the same neighbourhood, village, ethnic group or religion might show more inter-group social capital but less out-group social capital. The literature on social capital is quite new and the debate is still ongoing, with studies reaching contradictory results. Some research has showed that the experience of violence and conflict increases forms of social capital, while others have suggested negative causal links between conflict and social capital. These contradictions are due to the different measures of social capital under study, as well as various challenges to the independence of the conflict variable".¹¹⁰

Hubungan antara konflik dan modal sosial bisa berjalan dua arah. Di satu sisi, kita akan berharap bahwa konflik meningkatkan ketegangan dan mengurangi kepercayaan. Ketika laporan kekerasan menyebar, individu akan waspada terhadap orang lain, kerja sama cenderung berkurang, dan anggota masyarakat menjadi terpecah belah. Di sisi lain, kita bisa mengharapkan konflik dan kekerasan untuk memaksa individu untuk bergantung dan bergantung satu sama lain. Ikatan sosial dan modal dapat dibentuk atas dasar solidaritas dalam menghadapi ancaman eksternal. Untuk alasan ini, sementara menjembatani modal sosial mungkin menurun, ikatan modal sosial akan meningkat. Yaitu anggota dari lingkungan, desa, kelompok etnis atau agama yang sama mungkin menunjukkan lebih banyak modal sosial antar-kelompok tetapi lebih sedikit modal sosial di luar kelompok. Literatur tentang modal sosial cukup baru dan perdebatan masih berlangsung, dengan studi mencapai hasil yang kontradiktif. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa

¹¹⁰ Aghajanian, Alia. 2012. Social Capital and Conflict. HiCN Working Paper 134. H i C N Households in Conflict Network. The Institute of Development Studies - at the University of Sussex - Falmer – Brighton : pp. 8

pengalaman kekerasan dan konflik meningkatkan bentuk modal sosial, sementara yang lain menyarankan hubungan sebab akibat negatif antara konflik dan modal sosial. Kontradiksi-kontradiksi ini disebabkan oleh ukuran modal sosial yang berbeda yang diteliti, serta berbagai tantangan terhadap independensi variabel konflik.

Sebagaimana telah disinggung dalam uraian teoritis tentang konflik khususnya yang berkaitan dengan fungsionalisasi konflik maka konflik memiliki peran kohesivitas dan penguatan modal sosial ditataran kelompok. Namun fungsi destruktif konflik justru terletak ditataran relasi antar kelompok. Namun pada prinsipnya adanya konflik mencerminkan hilangnya kepercayaan (*trust*). Hilangnya kepercayaan (*trust*) memberi dampak pada koyaknya jaringan sosial. Koyaknya jaringan pada akhirnya medelegitimasi norma yang hidup ditengah masyarakat.

Bagi penulis, modal sosial sangatlah penting bagi transformasi masyarakat. Meskipun secara teoritik, konflik juga adalah salah satu modus transformatif. Namun modal sosial memiliki kekuatan tersendiri. Laser menyatakan bahwa modal sosial memiliki peran, antara lain :¹¹¹

1. Mempermudah akses informasi bagi anggota komunitas.
2. Menjadi media power sharing atau pembagian kekuasaan dalam komunitas.
3. Mengembangkan solidaritas.
4. Memungkinkan mobilisasi sumber daya komunitas.
5. Memungkinkan pencapaian bersama, serta

¹¹¹ Widaningsih, Lilis. 2006. Konflik Ruang Publik dan Penguatan Modal Sosial (Social Capital) Masyarakat Kampung Kota (Studi Kasus Konflik Jalan Lingkungan di Kelurahan Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung). Prosiding Seminar Nasional PIPS 2006 SPS Universitas Pendidikan Indonesia : hal.4

6. Membentuk perilaku kebersamaan dan berorganisasi komunitas.

Konflik tentu saja dapat mendorong beberapa komponen fungsi modal sosial dalam tataran internal kelompok misalnya pengembangan solidaritas. Modal sosial akan memperkuat kohesi sosial. *It refers not only to the absence of latent conflict whether in the form of inequalities, or political or ethnic polarization, but also to the presence of strong social bonds measured by levels of trust and norms of reciprocity, and the abundance of associations that bridge social divisions*¹¹². Kohesi sosial tidak hanya mengacu pada tidak adanya konflik laten baik dalam bentuk ketidaksetaraan, atau polarisasi politik atau etnis, tetapi juga pada adanya ikatan sosial yang kuat yang diukur dengan tingkat kepercayaan dan norma timbal balik, dan banyaknya asosiasi yang menjembatani perpecahan sosial.

Kohesi sosial tentu saja sesuatu yang memiliki peluang untuk pecah. Konflik antar kekuatan masyarakat sipil dapat mengoyakkan kohesi sosial. *Civil conflict weakens the social cohesion. It deepens social cleavages between communities, undermines interpersonal and communal group trust, and destroys norms and values that underlie cooperation and collective action for the common good. Civil conflict also transforms social capital in favour of bonding relationships. Different works have analyzed the connection between social relation and conflict experiences. Alesina and La Ferrara (2002) investigated the factors that can determine the propensity to trust. They found that trust can be reduced by a recent history of traumatic experiences. In a case study from Rwanda, Colletta and Cullen (2002) showed that the conflict*

¹¹² Keho, Yaya. 2009. Social Capital in Situations of Conflict: A Case Study from Côte d'Ivoire. An International Multi-Disciplinary Journal, Ethiopia Vol. 3 (3) : pp.164

*negatively affected most manifestations of horizontal social capital, such as exchange, mutual assistance and trust. It also has affected vertical relationships between the communities.*¹¹³

Konflik sipil melemahkan kohesi sosial. Konflik sipil memperdalam pembelahan sosial antara komunitas, merusak kepercayaan kelompok dan komunal, dan menghancurkan norma dan nilai yang mendasari kerja sama antar kelompok dan tindakan kolektif demi kebaikan bersama. Konflik sipil juga mentransformasi modal sosial kearah penguatan ikatan internal kelompok. Beberapa penelitian berbeda dalam menganalisis hubungan antara hubungan sosial dan pengalaman konflik. Alesina dan La Ferrara tahun 2002 melakukan penelitian untuk menyelidiki faktor-faktor yang dapat menentukan kecenderungan untuk percaya. Mereka menemukan bahwa kepercayaan dapat dikurangi dengan sejarah pengalaman traumatis. Dalam sebuah studi kasus dari Rwanda, penelitian Colletta dan Cullen pada tahun 2002, menunjukkan bahwa konflik, secara negatif, mempengaruhi sebagian besar manifestasi modal sosial horizontal, seperti hubungan pertukaran, bantuan timbal balik, dan kepercayaan. Hal ini juga telah mempengaruhi hubungan vertikal antara masyarakat.

Modal sosial relatif dapat berjalan jika setiap stakeholder khususnya pemegang kekuasaan dapat menjaga modal sosial tersebut. Keberadaan modal sosial dalam masyarakat dapat dioptimalkan dalam penyelesaian konflik sudah dapat dimulai dari upaya pencegahan terjadinya konflik melalui upaya penciptaan kondisi yang damai, aman dan tenteram dalam masyarakat dengan melakukan stimulasi terhadap unsur-unsur modal sosial yang berkembang dalam masyarakat. Merupakan tugas pemerintah dan warga

¹¹³ Ibid : pp.165

masyarakat untuk mengembangkan ide untuk menjalin kemitraan antara warga, pemerintah dan pelaku usaha setempat, selain untuk menjaga stabilitas keamanan dalam berusaha tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga sekitar.¹¹⁴

Upaya preventif mencegah konflik adalah menjaga modal sosial agar tidak koyak. Menjaga modal sosial akan semakin mengakumulasi modal lainnya. Mawardi menyatakan “Modal sosial adalah sumberdaya yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru. Seperti diketahui bahwa sesuatu yang disebut sumber daya (*resources*) adalah sesuatu yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi, disimpan dan diinvestasikan. Sumberdaya yang digunakan untuk investasi disebut sebagai modal. Dimensi modal sosial cukup luas dan kompleks. Modal sosial berbeda dengan istilah populer lainnya yaitu modal manusia (*human capital*). Pada modal manusia segala sesuatunya lebih merujuk ke dimensi individu yaitu daya dan keahlian yang dimiliki oleh seorang individu. Pada modal sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan antar kelompok dengan ruang perhatian pada jaringan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan antar sesama yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok”¹¹⁵

Bagi Sebagian sosiolog seperti Fukuyama meyakini bahwa *trust* merupakan unsur paling dasar modal sosial. Tidak terbentuknya *trust* menyebabkan unsur lain kehilangan aksentuasinya. *Trust* yang hilang akan menyebabkan

¹¹⁴ Chikmawati, Nurul Fajri.Evie Rachmawati Nur Ariyanti & Nelly Ulfah A.R. 2015. Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Ekonomi Guna Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif (Studi tentang Penguatan Kerangka Hukum dalam Penyelesaian Konflik Sosial Ekonomi di Era Komunitas ASEAN). Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka UTCC : 258-274

¹¹⁵ Mawardi. J.M. loc.cit : hal.6

koyaknya jaringan sosial dan pudarnya norma-norma. Fukuyama menyatakan bahwa “Tatanan sosial seperti ikatan-ikatan primordial, kekerabatan, kekeluargaan, moralitas, kepercayaan, norma-norma kooperatif serta nilai-nilai sosial lokal yang menjadi modal sosial (*social capital*) masyarakat banyak mengalami kehancuran besar (*the great disruption*). Hancurnya tatanan sosial adalah hancurnya sebuah modal social. Modal sosial merupakan sumber daya diharapkan bersifat memulihkan tatanan sosial yang telah hancur pasca konflik, terutama modal sosial *trust* (kepercayaan) yang diyakini mampu menghidupkan dan membangun kembali sistem kekerabatan dan rasa kekeluargaan dalam menemukan kembali bagian-bagiannya yang telah terpisah dan hancur akibat konflik”.¹¹⁶

Ketidakpercayaan membuat norma kehilangan legitimasinya. Norma yang kehilangan legitimasinya dapat menyebabkan tindakan anarkis di tengah masyarakat. Ritzer dan Goodman menjelaskan makna norma dari Coleman yang menurutnya kebanyakan sosiolog menganggap norma dapat digunakan untuk menerangkan perilaku individu, namun tidak menerangkan mengapa dan bagaimana cara norma itu terwujud. Atau cara norma muncul dan dipertahankan dalam sekelompok aktor yang rasional. Menurutnya, norma diprakarsai dan dipertahankan oleh beberapa orang yang melihat keuntungan yang dihasilkan dari pengalaman terhadap norma dan kerugian yang berasal dari pelanggaran norma itu. Orang ingin melepaskan pengendalian terhadap perilaku mereka sendiri, tetapi dalam proses, mereka memperoleh pengendalian (melalui norma) terhadap

¹¹⁶ Laha, M. Saleh. Fatmawada Sudarman & Moh. Nutfa. 2021. Kehidupan Pasca Konflik dan Ketegangan Relasi Sosial : Suatu ancaman Kehancuran Social Capital Trust. Jurnal Predestination: jurnal of Society and Culture. Vol .1 No.2 : hal.116

perilaku orang lain. Sebagaimana dinyatakan lebih lanjut bahwa, unsur sentral dari norma adalah melepaskan sebagian hak untuk mengendalikan tindakan diri sendiri seseorang dan menerima sebagian hak untuk mengendalikan tindakan orang lain dan itulah yang memunculkan norma. Hasil akhirnya adalah bahwa pengendalian yang dipertahankan setiap orang sendirian akan terdistribusikan secara luas ke seluruh kumpulan aktor yang melaksanakan kontrol itu.¹¹⁷

Norma seperti alat perekat yang mengikat tindakan sosial individu agar selalu sesuai dengan ekspektasi kelompok. Mengikuti norma sosial menjadi jaminan bahwa kohesi sosial masih terjaga. Norma sosial yang masih kokoh menunjukkan bahwa masyarakat masih mempercayai norma yang memayungi mereka. Norma sosial yang kokoh menunjukkan tingkat integrasi sosial masih baik. Iqbal menyebutkan 3 alasan proses terjadinya integrasi sosial :¹¹⁸

1. Adanya nilai sosial fundamental yang disepakati sebagai acuan normatif dan praktis dalam berinteraksi dengan anggota masyarakat.
2. Kesadaran untuk memelihara kesetiaan ganda kepada masing-masing unit sosial sebagai wadah menjalin hubungan sosial dan tetap menjaga kesetiaan kepada unit-unit sosial.
3. Tuntutan bekerjasama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan sebagai konsekuensi sebagai makhluk sosial.

¹¹⁷ Ritzer, George & Goodman, Douglas J. 2008. Teori Sosiologi Modern. Jakarta. Prenada Media Group: hal. 396

¹¹⁸ Halim K, Abd & Mahyuddin. 2019. Modal Sosial Dan Integrasi Sosial: Asimilasi Dan Akulturasi Budaya Masyarakat Multikultural Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* Vol. 12 No.2 : hal.116

Integrasi sosial merupakan faktor yang menentukan keberhasilan penguatan modal sosial di masyarakat. Para sosiolog berbeda dalam menentukan tolak ukur memandang modal sosial. Ancok menyatakan bahwa pandangan para pakar dalam mendefinisikan konsep modal sosial dapat dikategorikan dalam dua kelompok. Kelompok pertama menekankan pada jaringan hubungan sosial (*social network*), sedangkan kelompok kedua lebih menekankan pada karakteristik (*traits*) yang melekat pada diri individu yang terlibat dalam sebuah interaksi sosial dan menyebutkan 2 tolak ukur para ahli untuk melihat dan menganalisa modal sosial :¹¹⁹

1. Pendapat kelompok pertama ini diwakili oleh antara lain para pakar berikut ini. Brehmdan Rahn (1997) berpendapat bahwa modal sosial adalah jaringan kerjasama di antara warga masyarakat yang memfasilitasi pencarian solusi dari permasalahan yang dihadapi. Definisi lain dikemukakan oleh Pennar (1997) yang mengemukakan bahwa modal sosial adalah jaringan hubungan sosial yang mempengaruhi perilaku individual yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Woolcock mendefinisikan modal sosial sebagai kumpulan dari hubungan yang aktif di antara manusia yang berupa saling percaya, saling pengertian dan kesamaan nilai serta perilaku yang mengikat anggota dalam sebuah jaringan kerja dan komunitas yang memungkinkan adanya kerjasama. Jadi menurut kelompok pertama ini modal sosial akan semakin kuat apabila sebuah komunitas atau organisasi memiliki jaringan hubungan kerjasama baik secara internal komunitas atau organisasi, atau hubungan antar

¹¹⁹ Ancok, Djameludin. 2003. Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat. PSIKOLOGIKA Nomer 15 Volume VIII : hal.6-7

komunitas atau organisasi. Jaringan kerjasama yang sinergetik akan banyak memberikan manfaat bagi kehidupan bersama. Menurut sudut pandang Psikologi, kelompok ini diwakili oleh ahli yang mengemukakan teori dinamika kelompok yang melihat modal sosial sebagai suatu kelompok yang memiliki ciri kohesivitas yang tinggi.

2. Pendapat kelompok kedua diwakili oleh antara lain para pakar berikut ini. Fukuyama (1997) menjelaskan bahwa modal sosial merupakan serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalannya kerjasama. Definisi yang dikemukakan Fukuyama ini mengandung beberapa aspek nilai yang dikemukakan oleh Schwartz (1994). Nilai-nilai tersebut adalah: (1) *universalism*, nilai tentang pemahaman terhadap orang lain. Apresiasi, toleransi, serta proteksi terhadap manusia dan makhluk ciptaan Tuhan lainnya; (2) *benevolence*, nilai tentang pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan orang lain; (3) *tradition*, nilai yang mengandung penghargaan, komitmen dan penerimaan terhadap tradisi dan gagasan budaya tradisional; (4) *conformity*, nilai yang terkait dengan pengekangan diri terhadap dorongan dan tindakan yang merugikan orang lain; (5) *security*, nilai yang mengandung keselamatan, keharmonisan, kestabilan masyarakat dalam berhubungan dengan orang lain dan memperlakukan diri sendiri. Sejalan dengan pendapat Fukuyama, Bowles dan Gintis (2000) mendefinisikan modal sosial sebagai kapital sosial yang pada umumnya merujuk pada kepercayaan, perhatian pada suatu kelompok, kemauan untuk hidup dengan norma dari satu

komunitas. Menurut sudut pandang Psikologi, kelompok ini diwakili oleh ahli yang mengemukakan teori kepribadian yang melihat bahwa munculnya suatu kelompok kerja yang kohesif baru akan terjadi kalau individu memiliki sifat kepribadian tertentu.

Kedua tolak ukur baik secara struktural dan individual pada prinsipnya bisa dipadukan untuk menciptakan upaya bukan hanya mencegah konflik tapi juga menangani konflik. Konflik memiliki bentuk-bentuk yang memiliki karakteristik khusus. Robbins membedakan 3 pandangan tentang konflik :

120

1. Pandangan Tradisional (*The Traditional View*)

Pandangan ini menyatakan bahwa semua konflik itu buruk. Konflik dilihat sebagai sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari. Untuk memperkuat konotasi negatif ini, konflik disinonimkan dengan istilah *violence, destruction, dan irrationality*. Pandangan ini konsisten dengan sikap-sikap yang dominan mengenai perilaku kelompok dalam dasawarsa 1930-an dan 1940-an. konflik di lihat sebagai hasil disfungsional akibat komunikasi yang buruk, kurangnya kepercayaan dan keterbukaan di antara orang-orang, dan kegagalan manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi karyawan.

2. Pandangan Hubungan Manusia (*The Human Relations View*)

Pandangan ini menyatakan bahwa konflik merupakan peristiwa yang wajar terjadi dalam semua kelompok dan organisasi. Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari karena itu keberadaan konflik harus

¹²⁰ Mutakin, Ali. 2018. Resolusi Konflik melalui Nilai-nilai Kultur Pesantren. An-Nidzam. Vol.5. No.2 : hal.96

diterima dan dirasionalisasikan sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi peningkatan kinerja organisasi. Pandangan ini mendominasi teori konflik dari akhir dasawarsa 1940-an sampai pertengahan 1970-an.

3. Pandangan Interaksionis (*The Interactionist View*)

Pandangan ini cenderung mendorong terjadinya konflik, atas asumsi bahwa kelompok yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi, cenderung menjadi statis, apatis, tidak aspiratif, dan tidak inovatif. Oleh karena itu, menurut aliran pemikiran ini, konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum secara berkelanjutan, sehingga kelompok tetap bersemangat (*viable*), kritis-diri (*self-critical*), dan kreatif.

Ketiga pandangan diatas menunjukkan bahwa konflik adalah terobosan yang dianggap mengubah tatanan. Pandangan tradisional menganggapnya sebuah anomali namun pendekatan interaksionis justru menganggap konflik sesuatu yang mesti terjadi bahkan harus didorong demi alasan dinamika, namun pandangan hubungan manusia menganggap konflik adalah sesuatu yang tak dapat dihindari. Mengubah tatanan adalah esensi konflik. Perubahan tatanan dimungkinkan jika modal sosial koyak.

Pada saat yang sama, modal sosial akan selalu dipertahankan oleh mereka yang tidak ingin tatanan berubah. Modal sosial dipertahankan dengan mengeksplorasi unsur-unsur informal dalam struktur sosial misalnya nilai-nilai kearifan lokal. Diem menyatakan "Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang eksplisit yang muncul dari periode panjang yang berevolusi bersama-sama masyarakat dan lingkungannya dalam sistem lokal yang sudah dialami

bersama-sama. Proses evolusi yang begitu panjang dan melekat dalam masyarakat dapat menjadikan kearifan lokal sebagai sumber energi potensial dari sistem pengetahuan kolektif masyarakat untuk hidup bersama secara dinamis dan damai. Pengertian ini melihat kearifan lokal tidak sekadar sebagai acuan tingkah-laku seseorang, tetapi lebih jauh, yaitu mampu mendinamisasi kehidupan masyarakat yang penuh keadaban. Secara substansial, kearifan lokal itu adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah-laku sehari-hari masyarakat setempat. Oleh karena itu, sangat beralasan jika dikatakan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Hal itu berarti kearifan lokal yang di dalamnya berisi unsur kecerdasan kreativitas dan pengetahuan lokal dari para elit dan masyarakatnya adalah yang menentukan dalam pembangunan peradaban masyarakatnya".¹²¹

Kearifan lokal adalah energi bagi modal sosial. Kearifan lokal berisi nilai-nilai yang perekat masyarakat. Kearifan lokal memiliki kemiripan dengan modal sosial. *Local wisdom is a form of knowledge, belief, understanding or perception along with customary habits or ethics that guide human behavior in ecological and systemic life. Values that are rooted in a culture are clearly not concrete material objects, but tend to serve as a kind of guide for human behavior. In that sense, to learn about them we must give attention to how humans act in local contexts. In normal circumstances, people's behavior unfolds within the boundaries of norms, etiquette, and law tied to particular locality. However, in certain situations where*

¹²¹ Diem, Anson Ferdiant. 2012. *Wisdom of The Locality (Sebuah Kajian: Kearifan Lokal dalam Arsitektur Tradisional Palembang)*. Berkala Teknik Vol.2 No.4 : hal.300-301

*cultures face challenges from within or from outside, responses in the form of reactions can occur. Responses and challenges are normal ways to see how change happens in culture*¹²². Kearifan lokal adalah sebetuk pengetahuan, kepercayaan, pemahaman atau persepsi beserta kebiasaan atau etika adat yang memandu perilaku manusia dalam kehidupan ekologis dan sistemik. Nilai-nilai yang berakar pada suatu budaya jelas bukan objek material yang konkret, tetapi cenderung berfungsi sebagai semacam panduan bagi perilaku manusia. Dalam pengertian itu, untuk mempelajarinya kita harus memberikan perhatian pada bagaimana manusia bertindak dalam konteks lokal. Dalam keadaan normal, perilaku orang terungkap dalam batas-batas norma, etiket, dan hukum yang terkait dengan lokalitas tertentu. Namun, dalam situasi tertentu di mana budaya menghadapi tantangan dari dalam atau dari luar, respons dalam bentuk reaksi dapat terjadi. Tanggapan dan tantangan adalah cara normal untuk melihat bagaimana perubahan terjadi dalam budaya.

Bila nilai-nilai kearifan lokal gagal menopang sistem sosial dari tantangan maka potensi konflik memungkinkan menjadi manifest. Fisher menyebutkan tahapan konflik sebagai berikut :¹²³

1. Pra-Konflik: merupakan periode dimana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran diantara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun salah satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadi konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan

¹²² Pesurnay, Althien John. 2018. Local Wisdom in a New Paradigm: Applying System Theory to the Study of Local Culture in Indonesia. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 175 : pp.4

¹²³ Zainuddin, Sulthan. Soetarto, Endriatmo. Adiwibowo, Soeryo& Pandjaitan, Nurmala K. 2012. Kontestasi dan Konflik Memperebutkan Emas di Poboya. Sodality: Jurnal Sosiologi Peesaan Vol. 6 (2) : hal.148

diantara beberapa pihak dan/atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain. Pra-Konflik: merupakan periode dimana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran diantara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun salah satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadi konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan diantara beberapa pihak dan/atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain.

2. Konfrontasi: pada saat ini konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya.
3. Krisis: ini merupakan puncak konflik, ketika ketegangan dan atau kekerasan terjadi paling hebat. Dalam konflik skala besar, ini merupakan periode perang, ketika orang-orang dari kedua pihak terbunuh. Komunikasi normal diantara dua pihak kemungkinan putus, pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduh dan menentang pihak lainnya.
4. Akibat: kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi dengan atau tanpa perantara. Suatu pihak yang mempunyai otoritas atau pihak ketiga yang lebih berkuasa mungkin akan memaksa kedua pihak untuk menghentikan pertikaian.
5. Pasca-Konflik: akhirnya situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah lebih normal diantara kedua pihak. Namun jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka

saling bertentangan tidak diatasi dengan baik, tahap ini sering kembali lagi menjadi situasi pra-konflik.

Tentu saja tahapan konflik diatas menunjukkan bahwa upaya pengenalan setiap indikator agar penanganan konflik bisa mengantisipasi membesarnya eskalasi konflik. Kontestasi kekuatan-kekuatan sosial dalam masyarakat seringkali dianggap berpotensi meledakkan konflik. Meski tak terhindarkan namun kontestasi selalu menghasilkan pemenang. Klinken menunjukkan lima proses dalam berkontestasi : “Kontestasi dipahami sebagai upaya penggambaran adanya persaingan dan perjuangan dalam hubungan-hubungan atau interaksi di mana nantinya akan muncul ‘pemenang’ yang tetap bertahan”. Ada 5 proses kunci kontestasi khususnya dalam bidang politik, sebagai berikut: “Pertama, *identity formation* (pembentukan identitas), yaitu bagaimana suatu identitas bersama dapat terbentuk pada sebuah kelompok sehingga menciptakan tindakan kolektif? Kedua, *scale shift* (eskalasi), yaitu bagaimana sebuah konflik yang mulanya kecil mengalami eskalasi sehingga melibatkan aktor-aktor yang jauh lebih banyak? Ketiga, *polarization* (Polarisasi), yaitu bagaimana ruang politis antar pihak yang saling berseteru meluas ketika mereka saling menjauh menuju kedua titik ekstrim dan tidak ada pihak yang berada pada posisi moderat? Keempat, *mobilization* (Mobilisasi), yaitu bagaimana orang yang biasanya apatis (acuh-tak acuh) dapat digerakkan untuk ikut serta dalam gerakan? Kelima, *aktor Constitution* (pembentukan aktor), yaitu bagaimana sebuah kelompok yang sebelumnya tidak terorganisasi atau apolitis berubah menjadi sebuah aktor politik tunggal?”¹²⁴

¹²⁴ Hidayat, Rakhmat. 2008. Kurikulum sebagai Arena Kontestasi Kekuasaan: Konseptualisasi Gagasan Michael Apple hingga Pierre Bourdieu. Komunitas Vol 3 (2) : hal.25

Kontestasi yang terjadi tentu saja memiliki potensi untuk mentransformasi konflik dari posisinya yang laten ke manifes. Upaya untuk menjembatangi antara fenomena kontestasi yang merupakan salah satu watak masyarakat dengan penguatan modal sosial tentu menjadi salah satu kunci untuk mendamaikan antara kebebasan dengan ketertiban sosial. Ruang sosial menjadi sarat akan kontestasi yang diharapkan tidak merusak modal sosial.

Capriati menyatakan Kehidupan sosial terjadi dalam sebuah ranah sosial yang merupakan suatu arena perjuangan yang mencoba untuk membedakan dirinya dengan yang lain dan mendapatkan modal yang berguna dan berharga di arena tersebut. Hal yang terpenting adalah mendapatkan rejeki yang halal yang dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan. Praktek-praktek yang digunakan para aktor dalam berusaha menjajakan dagangannya pada umumnya merasa sedikit malu. Oleh karena tuntutan kehidupan dan telah merasakan nikmatnya memperoleh keuntungan, maka pelan-pelan rasa malu itu hilang. Para aktor itu bahkan bertekad untuk terus mengembangkan usahanya. Dalam kehidupan sosial praktik-praktik yang dilakukan setiap aktor memang sangat beragam. Bagi mereka yang hanya memiliki sedikit keterampilan dalam sebuah ranah perjuangan yang dinamis menjadi suatu tolak ukur untuk mereka berkembang dan mengembangkan keterampilan mereka yang sangat minim di sektor informal. Kehidupan sosial untuk para aktor di sektor informal memberikan suatu kesempatan yang sangat berarti bagi mereka untuk dapat mandiri dan tidak bergantung pada orang lain dan mandiri untuk lepas dari orang tua dengan cara mengadu nasib. Suatu ranah menjadi tempat perjuangan dan persaingan dimana para aktor bisa memberikan pengaruh ataupun dipengaruhi. Aktor yang memiliki modal lebih besar cenderung akan menjadi aktor

yang menguasai dalam tempa-tempat perjuangan. Aktor pemilik modal memiliki aturan sendiri untuk mencapai tujuannya. Aktor pemilik modal menjadi aktor yang mendominasi bagi para marginalisasi. Kekuasaan pemilik modal dapat menentukan jalan keuntungan-keuntungan tertentu pada ranah perjuangan. Pertaruhannya terletak pada modal yang diinvestasikan dan dapat memungkinkan menjadi sebuah aktor yang mendominasi. Modal yang dimiliki merupakan suatu sarana untuk mendapatkan tujuan.¹²⁵

Capriati menyinggung bagaimana Bourdieu menjelaskan bahwa di ranah proses persaingan untuk mendapatkan modal menjadi panduan agar satu kelompok mendapatkan posisi yang kuat. Modal sosial menjadi salah satu modal yang memungkinkan satu kelompok memiliki daya tahan terhadap perubahan di ranah. Ranah atau ruang publik sosial adalah tempat aktor dan kelompok sosial saling bersinggungan. Tentu saja persinggungan tersebut bisa menciptakan persaingan yang berujung konflik sosial.

Marx, Dahrendorf, Simmel, dan Coser mengatakan bahwa secara sederhana, konflik adalah pertentangan antara satu individu dengan individu lainnya, atau antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Sebetulnya, konflik dapat dilihat dari dua segi. Dari segi positif, konflik dapat mendinamisasikan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Konflik dapat memacu bagi terjadinya kompetisi yang sehat, orang berupaya untuk menjadi lebih baik dari yang lainnya. Konflik bisa menjadi tahap awal perubahan sosial. Dari segi negatif, konflik merupakan salah satu masalah yang perlu diatasi. Konflik yang sengit dapat memicu perselisihan dan permusuhan yang tajam, yang mengganggu suasana antar

¹²⁵ Capriati, Rossy. 2013. Strategi dan Perjuangan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Pasar Pagi Kota Samarinda. eJournal Sosiatri-Sosiologi. Vol 1(2): hal.39

kelompok dalam masyarakat.¹²⁶ Pernyataan ini menunjukkan bahwa terjadinya konflik tidak bermakna meniadakan secara total modal sosial. Modal sosial yang mengikat kelompok dengan kelompok lain mungkin terdelegitimasi namun modal sosial masih berperan dalam tataran internal kelompok.

Modal sosial memiliki peranan signifikan dalam tiap jenis konflik sosial. Apapun jenis konfliknya, nilai-nilai modal sosial sangat penting untuk menjaga kohesi sosial di tiap tingkatan. Soekanto menyebutkan tingkatan konflik sebagai berikut :¹²⁷

1. Konflik Pribadi

Konflik terjadi dalam diri seseorang terhadap orang lain. Umumnya konflik pribadi diawali perasaan tidak suka terhadap orang lain, yang pada akhirnya melahirkan perasaan benci yang mendalam. Perasaan ini mendorong tersebut untuk memaki, menghina, bahkan memusnahkan pihak lawan. Pada dasarnya konflik pribadi sering terjadi dalam masyarakat.

2. Konflik Rasial

Konflik rasial umumnya terjadi di suatu negara yang memiliki keragaman suku dan ras. Ras merupakan pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri biologisnya, seperti bentuk muka, bentuk hidung, warna kulit dan warna rambut. Secara umum ras di dunia dikelompokkan menjadi lima ras, yaitu Australoid, Mongoloid, Kaukasoid Negroid, dan ras-ras khusus. Hal ini berarti kehidupan dunia berpotensi munculnya konflik juga jika perbedaan antar ras dipertajam

¹²⁶ Sumartias, Suwandi & Agus Rahmat. 2013. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Konflik Sosial. *Jurnal Penelitian Komunikasi* Vol. 16 No. 1 : hal.15

¹²⁷ Astri, Herlina. 2011. Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penguatan Kearifan Lokal. *Aspirasi* Vol. 2. No. 2 : hal. 153-154

3. Konflik Antar Kelas Sosial

Terjadinya kelas-kelas di masyarakat karena adanya sesuatu yang dihargai, seperti kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan. Kesemua itu menjadi dasar penempatan seseorang dalam kelas-kelas sosial, yaitu kelas sosial atas, menengah, dan bawah. Seseorang yang memiliki kekayaan dan kekuasaan yang besar menempati posisi atas, sedangkan orang yang tidak memiliki kekayaan dan kekuasaan berada pada posisi bawah. Dari setiap kelas mengandung hak dan kewajiban serta kepentingan yang berbeda-beda. Jika perbedaan ini tidak dapat terjembatani, maka situasi kondisi tersebut mampu memicu munculnya konflik rasial

4. Konflik Politik Antar golongan dalam Satu Masyarakat Maupun antara Negara-Negara yang Berdaulat.

Dunia perpolitikan pun tidak lepas dari munculnya konflik sosial. Politik adalah cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. Konflik politik terjadi karena setiap golongan di masyarakat melakukan politik yang berbeda-beda pada saat menghadapi suatu masalah yang sama. Perbedaan ini memunculkan peluang terjadinya konflik antar golongan terbuka lebar. Contoh rencana undang-undang pornoaksi dan pornografi sedang diulas, masyarakat Indonesia terbelah menjadi dua pemikiran, sehingga terjadi pertentangan antara kelompok masyarakat yang setuju dengan kelompok yang tidak menyetujuinya.

5. Konflik Bersifat Internasional

Konflik internasional biasanya terjadi karena perbedaan-perbedaan kepentingan di mana menyangkut kedaulatan negara yang saling

berkonflik. Karena mencakup suatu negara, maka akibat konflik ini dirasakan oleh seluruh rakyat dalam suatu negara.

Semakin tinggi tingkat kolektiva maka semakin kompleks konflik yang akan terjadi. Semakin tinggi kolektiva maka semakin membutuhkan kestabilan modal sosial. Menguatkan modal sosial membutuhkan kontrol sosial. Taneko menyatakan bahwa “Pengendalian sosial (*social control*) sama artinya dengan pengawasan sosial yaitu suatu sistem yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat agar berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial. Karena itu pengawasan sosial itu dapat bersifat preventif maupun represif, atau bahkan kedua-duanya. Dalam kasus-kasus serius pengawasan sosial dilakukan dengan paksaan, kekerasan atau penghukuman. Biasanya masyarakat itu sendiri telah menyediakan sanksi-sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang berkisar mulai dari ekspresi tidak senang hingga pada pengasingan dari masyarakat”.¹²⁸

Menjaga modal sosial agar tetap kuat ditengah kompleksitas dinamika sosial merupakan tanggung jawab bersama. Penguatan modal sosial dapat dipahami Ketika bentuk-bentuk interaksi sosial bersifat asosiatif. Dalam sosiologi, bentuk-bentuk interaksi sosial dapat dijabarkan kedalam 2 bentuk yakni interaksi atau hubungan sosial bersifat asosiatif dan disosiatif. Soekanto menguraikan secara detail dua bentuk hubungan sosial tersebut :¹²⁹

¹²⁸ Asriati, Nuraeni & Bahari, Yohanes. 2010. Pengendalian Sosial Berbasis Modal Sosial Lokal pada Masyarakat di Kalimantan Barat. MIMBAR, Vol. XXVI, No. 2 : hal.149

¹²⁹ Soekanto, Soerjono. Loc.cit : hal. 65-72

1. Hubungan Asosiatif

Hubungan sosial asosiatif terdiri dari bentuk-bentuk interaksi sosial yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk kerja sama tersebut berkembang apabila orang dapat digerakan untuk mencapai suatu tujuan bersama dan harus ada kesadaran bahwa tujuan tersebut di kemudian hari mempunyai manfaat bagi semua. Juga harus ada iklim yang menyenangkan dalam pembagian kerja serta balas jasa yang akan diterima. Dalam perkembangan selanjutnya, keahlian-keahlian tertentu diperlukan bagi mereka yang bekerja sama supaya rencana kerja samanya dapat terlaksana dengan baik. Kerja sama timbul karena orientasi orang-perorangan terhadap kelompoknya (yaitu *in-group-nya*) dan kelompok lainnya (yang merupakan *out-group-nya*). Kerja sama akan bertambah kuat jika ada hal-hal yang menyinggung anggota/perorangan lainnya. Jenis-jenis kerjasama adalah sebagai berikut:

- 1) Kerjasama Spontan (*Spontaneous Cooperation*) :
Kerjasama yang serta merta.
- 2) Kerjasama Langsung (*Directed Cooperation*) :
Kerjasama yang merupakan hasil perintah atasan atau penguasa.
- 3) Kerjasama Kontrak (*Contractual Cooperation*) :
Kerjasama atas dasar tertentu.
- 4) Kerjasama Tradisional (*Traditional Cooperation*) :
Kerjasama sebagai bagian atau unsur dari sistem sosial.

Bentuk lain Kerjasama adalah :

- 1) Kerukunan yang mencakup gotong-royong dan tolong menolong.
 - 2) *Bargaining*, Yaitu pelaksana perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa-jasa antara 2 organisasi atau lebih
 - 3) *Kooptasi (cooptation)*, yakni suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan.
 - 4) *Koalisi (coalition)*, yakni kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Koalisi dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil untuk sementara waktu karena dua organisasi atau lebih tersebut kemungkinan mempunyai struktur yang tidak sama antara satu dengan lainnya. Akan tetapi, karena maksud utama adalah untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama, maka sifatnya adalah kooperatif.
 - 5) *Joint venture*, yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu, misalnya pengeboran minyak, pertambangan batubara, perfilman, perhotelan dan seterusnya.
- b. Akomodasi. Akomodasi adalah suatu keadaan dan untuk menuju pada suatu proses. akomodasi sebagai suatu keseimbangan dalam interaksi antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Sebagai suatu

proses akomodasi menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan yaitu usaha-usaha manusia untuk mencapai kestabilan. Menurut Gillin dan Gillin, akomodasi adalah suatu pengertian yang digunakan oleh para sosiolog untuk menggambarkan suatu proses dalam hubungan-hubungan sosial yang sama artinya dengan adaptasi dalam biologi. Maksudnya, sebagai suatu proses dimana orang atau kelompok manusia yang mulanya saling bertentangan, mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan-ketegangan. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Akomodasi memiliki tujuan-tujuan, antara lain :

- 1) Untuk mengurangi pertentangan antara orang atau kelompok manusia sebagai akibat perbedaan paham.
- 2) Mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu atau secara temporer.
- 3) Memungkinkan terjadinya kerjasama antara kelompok sosial yang hidupnya terpisah akibat faktor-faktor sosial psikologis dan kebudayaan, seperti yang dijumpai pada masyarakat yang mengenal sistem berkasta.
- 4) Mengusahakan peleburan antara kelompok sosial yang terpisah.

Akomodasi secara teoritik terdiri dari beragam jenis bentuk akomodasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) *Coercion*, suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan karena adanya paksaan.

- 2) *Compromise*, bentuk akomodasi dimana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutan agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada.
- 3) *Arbitration*, Suatu cara untuk mencapai compromise apabila pihak-pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainya sendiri.
- 4) *Conciliation*, suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama.
- 5) *Toleration*, merupakan bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formal bentuknya
- 6) *Stalemate*, suatu akomodasi dimana pihak-pihak yang bertentangan karena mempunyai kekuatan yang seimbang berhenti pada satu titik tertentu dalam melakukan pertentangannya.
- 7) *Adjudication*, Penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan.

Hasil-hasil akomodasi adalah sebagai berikut :

- 1) Akomodasi, dan integrasi masyarakat, telah berbuat banyak untuk menghindari masyarakat dari benih-benih pertentangan latent yang akan melahirkan pertentangan baru
- 2) Menekan oposisi. Seringkali suatu persaingan dilaksanakan demi keuntungan suatu kelompok tertentu demi kerugian pihak lain.
- 3) Koordinasi berbagai kepribadian yang berbeda.
- 4) Perubahan lembaga-lembaga kemasyarakatan agar sesuai dengan keadaan baru atau keadaan yang berubah.

- 5) Perubahan-perubahan dalam kedudukan.
- 6) Akomodasi membuka jalan ke arah asimilasi.

c. Asimilasi

Asimilasi merupakan proses sosial dalam taraf lanjut, ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Secara singkat, proses asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama, walau kadangkala bersifat emosional, dengan tujuan untuk mencapai kesatuan, atau paling sedikit mencapai integrasi dalam organisasi, pikiran, dan tindakan. Proses asimilasi timbul bila ada:

- 1) Kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya.
- 2) Orang perorangan sebagai warga kelompok tadi saling bergaul secara langsung dan intensif untuk waktu yang lama.
- 3) Kebudayaan-kebudayaan dari kelompok-kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri.

Faktor-faktor yang dapat mempermudah terjadinya suatu asimilasi adalah:

- 1) Toleransi
- 2) Kesempatan-kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi
- 3) Sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya
- 4) Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat

- 5) Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan
- 6) Perkawinan Campur (Amalgamasi)
- 7) Adanya musuh bersama di luar

Faktor-faktor umum yang dapat menjadi penghalang terjadinya asimilasi adalah sebagai berikut :

- 1) Terisolasi kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat
- 2) Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi
- 3) Perasaan takut terhadap kekuatan suatu kebudayaan yang dihadapi
- 4) Perasaan bahwa suatu kebudayaan golongan atau kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan golongan atau kelompok lainnya
- 5) Perbedaan warna kulit atau perbedaan ciri-ciri badaniah
- 6) *In-group feeling* yang kuat
- 7) Golongan minoritas mengalami gangguan-gangguan dari golongan yang berkuasa
- 8) Perbedaan kepentingan dan pertentangan-pertentangan pribadi

2. Hubungan Disasosiatif

Hubungan sosial disasosiatif terdiri dari bentuk-bentuk interaksi sosial yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Persaingan

Suatu proses sosial dimana individu atau kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum (baik perseorangan maupun kelompok manusia) dengan cara menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka

yang telah ada tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan. Persiangan mempunyai 2 tipe yaitu :

- 1) Bersifat Pribadi : Individu, perorangan, bersaing dalam memperoleh kedudukan. Tipe ini dinamakan *rivalry*.
- 2) Bersifat Tidak Pribadi : Misalnya terjadi antara dua perusahaan besar yang bersaing untuk mendapatkan monopoli di suatu wilayah tertentu. Sementara itu persaingan disebabkan oleh beberapa faktor yang sangat mempengaruhi asal-muasal persiangan :
 - 1) Kepribadian seseorang
 - 2) Kemajuan : Persaingan akan mendorong seseorang untuk bekerja keras dan memberikan sahamnya untuk pembangunan masyarakat
 - 3) Solidaritas kelompok : Persaingan yang jujur akan menyebabkan para individu akan saling menyesuaikan diri dalam hubungan-hubungan sosialnya hingga tercapai keserasian.

Persaingan juga memiliki beragam jenis tipe persaingan yang dapat diuraikan, sebagai berikut:

- 1) Persaingan ekonomi : timbul karena terbatasnya persediaan dibandingkan dengan jumlah konsumen.
- 2) Persaingan kebudayaan : dapat menyangkut persaingan bidang keagamaan, pendidikan, dan seterusnya.
- 3) Persaingan kedudukan dan peranan : di dalam diri seseorang maupun di dalam kelompok terdapat keinginan untuk diakui sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kedudukan serta peranan terpandang.

- 4) Persaingan ras : merupakan persaingan di bidang kebudayaan. Hal ini disebabkan karena ciri-ciri badaniah terlihat dibanding unsur-unsur kebudayaan lainnya.

b. Pertentangan

Dalam kehidupan sosial pribadi maupun kelompok menyadari adanya perbedaan-perbedaan misalnya dalam ciri-ciri badaniah, emosi, unsur-unsur kebudayaan, pola-pola perilaku, dan seterusnya dengan pihak lain. Ciri tersebut dapat mempertajam perbedaan yang ada hingga menjadi suatu pertentangan atau pertikaian. Sebab musabab pertentangan ada beragam penyebab yakni : Perbedaan antara individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan dan perubahan sosial. Persaingan menghasilkan beragam konsekuensi, antara lain :

- 1) Tambahnya solidaritas *in-group*.
- 2) Apabila pertentangan antara golongan-golongan terjadi dalam satu kelompok tertentu, akibatnya adalah sebaliknya, yaitu goyah dan retaknya persatuan kelompok tersebut.
- 3) Perubahan kepribadian para individu.
- 4) Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban.

Model hubungan diasosiatif merupakan hubungan yang dapat menyebabkan konflik. Sebuah hubungan yang didasari atas melunturnya modal sosial. Ralf Dahrendorf menyatakan bahwa konflik mestilah diatur secara efektif. Efektivitas pengaturan konflik bergantung pada tiga faktor :¹³⁰

1. Kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik yang terjadi di antara mereka.
2. Kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisasi secara rapi, tidak tercerai berai dan

¹³⁰ Rosana, Ellya. Loc.cit : hal. 227-228

terkotak-kotak sehingga masing-masing pihak memahami dengan jelas lingkup tuntutan pihak lain.

3. Kedua pihak menyepakati aturan main yang menjadi landasan dan pegangan dalam hubungan dan interaksi diantara mereka.

Dahrendorf juga menyebutkan 3 bentuk pengaturan konflik yaitu :

1. Konsiliasi; Parlemen dalam mana semua pihak berdiskusi dan berdebat secara terbuka dan mendalam untuk mencapai kesepakatan tanpa ada pihak-pihak yang memonopoli pembicaraan dan memaksakan kehendak. Kebanyakan konflik politik disalurkan dan diatur dengan bentuk konsiliasi.
2. Mediasi; kedua pihak sepakat mencari nasihat dari pihak ketiga (seorang mediator berupa tokoh, ahli, atau lembaga tertentu yang dipandang mempunyai pengetahuan dan keahlian yang mendalam mengenai hal yang dipertentangkan) tetapi nasihat yang diberikan oleh mediator ini tidak mengikat mereka.
3. Arbitrasi; Kedua pihak sepakat untuk mendapatkan keputusan akhir (yang bersifat legal) sebagai jalan keluar konflik pada pihak ketiga sebagai arbitrator. Contoh pengadilan.

Meskipun demikian, masyarakat sebagai entitas kolektif akan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan bisa terjadi secara perlahan tanpa menimbulkan konflik yang besar. Namun terkadang perubahan yang tiba-tiba terjadi dan melibatkan konflik dengan eskalasi besar seperti yang terjadi pada revolusi-revolusi besar dunia.

Oleh karena itu, modal sosial mestilah mengantisipasi proses itu dan menyediakan norma agar perubahan tidak

menghancurkan suatu sistem sosial yang telah terbangun. Soekanto menyatakan Sebuah proses perubahan sosial dan kebudayaan dapat terjadi melalui beberapa tahap yang harus dilalui :¹³¹

1. Penyesuaian masyarakat terhadap perubahan: Keserasian atau harmoni dalam masyarakat (*sosial equilibrium*) merupakan keadaan yang diidam-idamkan setiap masyarakat. Keserasian masyarakat dimaksudkan sebagai suatu keadaan suatu lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pokok benar-benar berfungsi dan saling mengisi. Dalam keadaan demikian, individu secara psikologis merasakan akan adanya ketentraman karena tidak adanya pertentangan dalam norma-norma dan nilai-nilai.
2. Saluran-saluran perubahan sosial dan kebudayaan : Saluran saluran perubahan sosial dan kebudayaan (*averue or channel of change*) merupakan saluran-saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan. Umumnya saluran-saluran tersebut adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, rekreasi, dan seterusnya. Lembaga kemasyarakatan tersebut menjadi titik tolak, tergantung pada *cultural focus* masyarakat pada suatu masa tertentu.
3. Disorganisasi (disintegrasi) dan reorganisasi (reintegrasi) : Sebelum kita mengetahui arti kedua kata tersebut kita artikan apakah itu organisasi? Organisasi merupakan artikulasi dari bagian-bagian yang merupakan satu kebulatan yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemudian pengertian dari disorganisasi dan reorganisasi yaitu: Disorganisasi

¹³¹ Soekanto. Soejono. Loc.cit : hal.289

adalah proses berputarnya norma-norma dan nilai dalam masyarakat dikarenakan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan. Reorganisasi adalah proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai yang baru agar sesuai dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Reorganisasi dilaksanakan apabila norma-norma dan nilai-nilai yang baru telah melembaga (*institutionalized*) dalam diri warga. Berhasil tidaknya proses pelebagaan tersebut dalam masyarakat.

Perubahan adalah sesuatu yang pasti terjadi. Masyarakat beserta sistem sosialnya pasti akan mengalami perkembangan dan perubahan. Ketahanan masyarakat terhadap perubahan yang terjadi bergantung pada daya adaptasi terhadap perubahan. Daya tahan tersebut ditopang oleh modal sosial yang dimilikinya. Apapun perubahan yang terjadi haruslah ditopang oleh saluran-saluran perubahan sosial baik berupa kelembagaan sosial atau pranatanya yang mampu beradaptasi. Pada awalnya perubahan sosial yang tak terelakkan akan membuat norma dan nilai di masyarakat terdelegitimasi namun pada akhirnya dengan daya adaptasi tinggi maka masyarakat akan mereorganisasikan dirinya dengan membuat norma dan nilai yang berupaya dipadukan dengan norma dan nilai-nilai lama.

BAB V

Transformasi Modal Sosial Mewujudkan Masyarakat Terbuka (Open Society)

Open society adalah istilah yang digagas oleh Karl Popper. *Open society* atau masyarakat terbuka merupakan masyarakat yang terlepas dari totalitarianism politik yang mengutamakan kebebasan namun tetap dalam jalur etika dan hukum. Sebuah model bermasyarakat yang menghargai kebebasan individu namun kebebasan tersebut harus dikontrol agar tidak menciptakan anarki.

Karl Raimund Popper lahir dari keluarga Yahudi pada 28 Juli 1902 di Himmelhof, Vienna, Austria. Ia tumbuh dalam atmosfer keluarga yang *decidedly bookish*, dekat dengan buku-buku dan orang tua yang begitu mendukung bakat intelejensinya. Masa muda Popper tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial lingkungannya, seperti peristiwa Perang Dunia I dan runtuhnya Kekaisaran Austria-Hongaria. Peristiwa tersebut membawa dampak besar bagi perekonomian, juga menimbulkan pertentangan antar kelas yang membawa Popper pada titik balik pandangan politiknya. Pada tahun 1928, Popper memperoleh gelar doktor dalam bidang psikologi dari University of Vienna. Sebelumnya, pada tahun 1919, Popper telah terlibat dalam Asosiasi Sosialis, bahkan melabeli dirinya sebagai seorang komunis. Namun, konflik antara para demonstran dan polisi terjadi di Horlgasse membuatnya berpikir ulang tentang Marxisme yang seolah menghalalkan pertumpahan darah demi kepentingan revolusinya melawan ide kapitalis. Setelah itu, ia memandang sosialisme negara sebagai suatu opresi yang tidak akan menemukan titik temu dengan ide kebebasan. Ia juga berpendapat bahwa kebebasan lebih penting daripada

persamaan, karena persamaan sejatinya tidak akan pernah terwujud tanpa kebebasan itu sendiri. Dari situ, Popper mulai terlihat menentang segala bentuk penindasan dan tidak lagi setuju dengan sosialisme yang ia anggap akan selalu lekat dengan konflik demi mewujudkan keberadaan masyarakat tanpa kelas. Kekecewaan Popper terhadap ide sosialis-komunis bukan merupakan satu-satunya alasan untuknya menentang opresi dan totalitarianisme. Menurut Corvi (2005), Popper awalnya lebih tertarik pada matematika, fisika, dan ilmu filsafat. Ia bahkan sukses menerbitkan buku pertamanya, *The Logic of Scientific Discovery* dan menyangkal positivisme yang kala itu berkembang di Vienna Circle. Tidak hanya itu, Popper juga mengkritik ide-ide politik Plato, Hobbes, dan Machiavelli yang cenderung menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan dan menceminkan politik penuh dengan retorika. Kritiknya terhadap ide para filsuf besar tersebut juga menggambarkan bagaimana Popper dengan konsisten menentang pemikiran-pemikiran yang mengandung ide totalitarian. Hal itu pula yang menjadi cikal bakal bentuk gagasannya terkait masyarakat terbuka. Pada sekitar tahun 1935, berbagai negara di Benua Eropa, termasuk juga Austria, berada di bawah rezim-rezim totaliter. Austria kala itu didominasi oleh pengaruh Hitler dan mempunyai banyak simpatisan Nazi. Mayoritas anggota Vienna Circle mulai berpindah ke Inggris dan Amerika Serikat, bahkan salah satu tokohnya terbunuh oleh seorang Nazi pada tahun 1936. Popper, sebagai salah satu di antara sekian banyak keturunan Yahudi di wilayah Austria kemudian mencoba menyelamatkan diri serta keluarganya dengan pindah mengajar ke University of Canterbury di New Zealand. Dalam pelariannya di New Zealand itu lah Popper kemudian berhasil menuntaskan dua buku yang berkaitan dengan ilmu sosial dan politik. *The Open Society and Its*

Enemies yang terdiri dari dua jilid dan *The Poverty of Historicism* yang mengkritisi historisisme, suatu ide yang dianggapnya menginspirasi ide marxis dan fasis. Popper telah menjadikan *The Open Society and Its Enemies* sebagai sebuah karya fenomenal. Buku yang mengkritisi pemikiran Plato, Hegel, dan Marx tersebut bahkan juga disebut sebagai karya paling berpengaruh di New Zealand, meski Popper sendiri sempat mengatakan bahwa negeri itu adalah tempat paling jauh di dunia karena kala itu, New Zealand tidak memiliki kontak apapun dengan dunia, kecuali dengan Inggris. *The Open Society and Its Enemies* awalnya masih berkaitan dengan historisisme. Namun, seiring berjalannya waktu, gagasan tentang masyarakat terbuka dalam buku tersebut kemudian menjadi satu dimensi tersendiri. *The Open Society and Its Enemies* mencoba untuk menjelaskan bagaimana peradaban dikhianati oleh para pemimpin dan membentuk suatu masyarakat tribal atau *closed society*. Suatu realitas yang menjadi penghalang bagi terwujudnya peradaban yang bertumpu pada kebebasan dan kesetaraan. Popper juga memandang bahwa musuh dalam gagasannya terkait masyarakat terbuka ini adalah kecenderungan manusia untuk hidup dalam masyarakat tribal atau tertutup. Oleh karena itu, ia kemudian menawarkan gagasan *open society* atau masyarakat terbuka yang rasional dan kritis. Popper mungkin tidak akan melahirkan karya-karyanya tentang filsafat politik jika sistem perpolitikan Eropa tidak didominasi oleh totalitarian Nazi dan komunis, mengingat studi awalnya lebih terpusat pada teori pengetahuan dan ilmu fisika. Puncaknya adalah ketika Austria berada di bawah kendali Hitler sampai berakhirnya Perang Dunia II, Popper kemudian menulis *The Open Society and Its Enemies* dan menyebutnya sebagai “his war effort”. Buku tersebut resmi diterbitkan beberapa bulan

setelah berakhirnya Perang Dunia II tahun 1945, dan Popper pindah ke London School of Economics, Inggris.¹³²

Open society memiliki relevansi pada penataan masyarakat multikulturalis. Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat kemajemukan yang tinggi. Mengelola negara dengan tingkat kemajemukan tinggi memerlukan Langkah-langkah khusus agar diperoleh titik keseimbangan ekspresi kebebasan dengan kontrol sosial. Totalitarianisme dalam sejarah politik Indonesia pernah terjadi setidaknya di akhir Era-Orde Lama dan Orde Baru. Ekspresi hak demokratis warga negara dihambat pada tingkat tertentu. Azifambayunasti menyatakan bahwa *open society* menurut Popper mengutamakan hak-hak individu dan kebebasan, humanisme, rasionalisme, serta demokrasi. Menurut Popper, kebebasan dan penghargaan atas hak-hak individu adalah jalan utama untuk mencapai sebuah kesetaraan. Setiap perbedaan di antara individu harus dihargai dan mendapatkan tempat yang sama, sehingga kesetaraan baginya adalah ketika masing-masing dari individu tersebut dihargai kebebasannya.¹³³

Totalitarianisme politik adalah musuh demokrasi. Totalitarianisme menciptakan tirani. *Democracy as the best way to avoid tyranny rather than majority rules, therefore people under a democracy may accept the majority rule but should always feel free to combat it by democratic means and try to improve it*¹³⁴. Demokrasi sebagai cara terbaik untuk menghindari tirani daripada aturan mayoritas, oleh karena

¹³² Azifambayunasti, Azril.2022. Relevansi Ide The Open Society Karl Popper dan Multikulturalisme dalam Pembelajaran Sejarah. Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia, Vol 5, No. 1 : hal.39-40

¹³³ Ibid. hal.42

¹³⁴ Waluyo, Bagus. Fabiola Dharmawanti Kurnia, Ali Mustofa & Endang Setyorini. 2020. An Analysis on the Open Society to the Main Characters of Charles Dickens' A Christmas Carol: A Perspective of Socrates. Journal of Development Research, 4 (1) : pp 72

itu, orang-orang di bawah sistem demokrasi dapat menerima aturan mayoritas tetapi harus selalu merasa bebas untuk memerangnya dengan cara demokratis dan mencoba memperbaikinya.

Open society memiliki karakteristik yang membedakannya dengan *Totalitarian Society*. According to Popper, an open society is characterised by:¹³⁵

1. Personal and individual responsibility.
2. Critical rationalism
3. The recognition of human fallibility
4. Falsification as the core of scientific reasoning
5. The recognition that institutions are man made
6. Piecemeal social engineering

Tanggung jawab individu merupakan unsur azasi atas fondasi bermasyarakat. Setiap tindakan sosial yang memiliki dampak pada masyarakat haruslah didasari tanggung jawab. Kebebasan harus selalu dibarengi dengan unsur tanggung jawab individu. Tanggung jawab adalah syarat filosofis kebebasan. Kebebasan tanpa tanggung jawab akan menjerumuskan masyarakat dalam anarki dan konflik sosial. Hasan menyatakan bahwa “tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dilakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa”¹³⁶

Rasionalisme kritis sangat diperlukan dalam iklim demokrasi. Mengontrol kekuasaan adalah unsur azasi

¹³⁵ Bovens, Mark. 2020. The Open Society and Its Future : Think Paper Series #1 in Mark Bovens & Marcus Düwell eds. Institutions for Open Societies, Utrecht University : pp.7

¹³⁶ Juwita, Rika . Asep Munajat & Elnawati. 2019. Mengembangkan Sikap Tanggung Jawab Melaksanakan Tugas Sekolah Melalui Metode Bercerita Pada Anak Usia 5-6 Tahun Di TK Aisyiah Bustanul Athfal 2 Kota Sukabumi. Jurnal Utile. Volume V, Nomor 2 : Hal 145

kehidupan demokratis. Bila rasio dibungkam maka dengan sendirinya kekuasaan dijalankan secara totalitarian. Kritik dari warga dibutuhkan dalam masyarakat terbuka untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Rasionalisme kritis diperkenalkan oleh Karl Popper. Habibah menyatakan bahwa "Rasionalisme kritis Popper berbeda dengan rasionalisme konvensional Descartes yang berpandangan ilmu pengetahuan bersumber pada rasio dan apa saja yang tidak didukung oleh rasio harus ditinggalkan. Rasionalisme Popper merupakan suatu pandangan bahwa rasio dapat menemukan kebenaran, tetapi rasio juga harus mempunyai kesediaan untuk mengakui bahwa rasio juga bisa salah dalam mendekati kebenaran. Kemungkinan salah itu dianggap sebagai ruang dinamika bagi suatu evaluasi-kritis dalam tarap yang lebih tinggi. Popper menggunakan kata rasionalisme untuk menunjukkan secara garis besar, suatu sikap yang berusaha memecahkan sebanyak mungkin masalah dengan bersandar pada akal, yaitu pikiran jernih dan pengalaman lebih dari pada bersandar pada perasaan dan nafsu. Sebagai istilah yang menyangkut tingkah laku dan sikap praktis, rasionalisme merupakan suatu sikap sedia mendengarkan penalaran kritis dan belajar dari pengalaman. Rasionalisme Popper melibatkan sikap terbuka untuk diskusi kritis, sedia untuk belajar dari kesalahan dan terbuka untuk kerjasama mendekati kebenaran. Rasionalisme yang mencakup intelektualisme maupun empirisme. Dalam diskusi kritis atas suatu teori, menurut Popper, pengamatan dan percobaan selalu diimbau sebagai ujian terhadap teori. Ini sesuai dengan prinsip empirisme yang menyatakan bahwa dalam ilmu hanya pengamatan dan pengalaman boleh memutuskan

diterima atau ditolaknya pernyataan-pernyataan ilmiah, termasuk hukum dan teori”.¹³⁷

Masyarakat terbuka ditandai oleh karakter yang merupakan implikasi dari rasa tanggung jawab yakni pengakuan terhadap kekeliruan yang dilakukan. Pada masyarakat terbuka, pejabat publik, bila keliru dalam menjalankan kebijakan apalagi menimbulkan dampak yang buruk akan segera mengakui kesalahannya dan mengundurkan diri serta menyerahkan dirinya pada hukum. Fenomena pengunduran diri pejabat misalnya di Jepang mencerminkan salah satu sikap yang bertanggung jawab dari pejabat publik. Fenomena di Jepang terjadi karena masyarakat Jepang sangat menjunjung tinggi sikap budayanya. Widarahesty dan Ayu menyatakan bahwa “Sikap mundur yang biasa dilakukan oleh kalangan pejabat publik Jepang di era modern saat ini memiliki cerita panjang yang terhubung dengan sejarah ratusan tahun berdirinya bangsa Jepang. Nilai-nilai konfusius sampai masuknya Budha telah menjadi landasan awal pembentukan etika dan moral bangsa Jepang yang kemudian mengatur seluruh aspek kehidupan bangsa Jepang dari zaman monarki sampai zaman feodal. Nilai-nilai tersebut disinkretiskan atau dipadukan dan dijadikan falsafah bangsa untuk melanggengkan kepentingan penguasa pada waktu itu. Nilai-nilai yang diambil dari berbagai ajaran seperti Konfusius dan Budha tersebut dapat terlihat dalam undang-undang pertama Jepang yang disebut dengan 17 Pasal atau disebut *Jyuu nana Kenpou* yang isinya mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Jepang dari apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, seperti; Bersahabatlah dengan sesama manusia, dan saling bekerja

¹³⁷ Habibah, Sulhatul. 2019. Paradigma Popperian : Meninjau Rasionalisme Kritis Karl Raimund Popper. *Dar El-Ilmi : Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora*, 6(2) : hal.307-308

sama adalah hal yang utama percayalah terhadap isi dari ajaran Buddha Janganlah memerintah (menyuruh) Tenno Para pekerja negara haruslah memiliki jiwa hormat dan rasa terima kasih. Kalau rasa hormat itu dipelihara maka alam akan seimbang. Apabila para pekerja negara menerima gugatan yang dikeluhkan dari masyarakat, maka janganlah menyelesaikannya dengan menerima suap dan sebagainya. Apabila melihat dari isi tujuh belas Pasal tersebut terlihat banyak sekali hal-hal yang mengatur mengenai tanggung jawab, seperti tanggung jawab dalam pekerjaan, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jyuu nana kenpou yang awalnya dibuat pada zaman Yamato (zaman periode awal kemonarkian Jepang) untuk melanggengkan pemerintahan Jepang pada waktu itu, kemudian berlanjut dipertahankan sampai zaman feudal. Di zaman feudal itulah kemudian isi pasal dikembangkan dan dibuat sesuai dengan kepemimpinan Jepang di zaman feudal. artinya karena zaman feudal ditandai dengan kelahiran dan kebangkitan militer Jepang atau dikenal dengan istilah samurai, maka nilai-nilai yang berlaku juga bersifat militer. Nilai-nilai yang bersifat militer itu disebut dengan Bushido atau kode etik samurai. nilai-nilai bushido inilah yang kemudian dijadikan landasan dan falsafah bangsa Jepang".¹³⁸

Iklim kehidupan ilmiah pada masyarakat terbuka menganut prinsip falsifikasi. Sebuah cara ilmiah menentukan kebenaran dimana metode ini merupakan cara menentukan teori ilmiah melalui pembuktian kesalahan dan bukannya mengafirmasi atau meneguhkan kebenarannya. Kehidupan intelektual publik akan lebih dinamis dan implikasinya akan

¹³⁸ Widarahesty, Yusy & Rindu Ayu. Fenomena Pengunduran Diri Di Kalangan Pejabat Publik Jepang (Studi Tentang Budaya Politik Masyarakat Jepang Tahun 2007-2011). Jurnal AL-AZHAR Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 2, No. 1 : hal. 62-62

meningkatkan daya kritis publik. Riski menyatakan bahwa “Falsifikasi Popper adalah teori penyangkalan atas pembenaran dari suatu verifikasi terhadap sebuah keilmuan atau teori. Singkatnya falsifikasi merupakan kebalikan dari verifikasi. Popper menyatakan bahwa suatu teori tidak mutlak kebenarannya hanya jika dapat di verifikasi saja, namun akan semakin kuat dan kokoh sebuah teori jika mampu bertahan dari penyangkalan (falsifikasi). Popper berpendapat bahwa tidak ada yang namanya verifikasi, yang dapat diakui keabsahannya hanyalah falsifikasi, artinya pencarian fakta yang memastikan bahwa sebuah hipotesis tidak dapat dipertahankan. Pendekatan ini menyangkal bahwa pernyataan-pernyataan tentang realitas alami lebih rasional dari pada pernyataan-pernyataan lain”.¹³⁹

Salah satu persoalan dalam masyarakat totaliter adalah menganggap bahwa institusi bersifat sakral sehingga kebal dikritik. Pada masyarakat terbuka ada pengakuan bahwa institusi adalah murni produk manusia dan menyejarah. Institusi bukanlah sesuatu yang bersifat alamiah. Institusi sosial dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat manusia. Menganggap institusi sebagai sesuatu yang sakral dan anti kritik secara langsung mencederai demokrasi.

Pada masyarakat terbuka, perubahan sosial adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Namun perubahan sosial tersebut haruslah berjalan secara evolutive. Begitupun rekayasa sosial yang dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan hendaknya di buat dan diimplementasikan secara bertahap dan memperhatikan respon dari masyarakat. Kebijakan haruslah bersesuaian dengan daya dukung sosial. Rekayasa sosial sendiri didefinisikan sebagai : “Sebuah jalan untuk

¹³⁹ Riski, Maydi Aula. 2021. Teori Falsifikasi Karl Raimund Popper: Urgensi Pemikirannya dalam Dunia Akademik. Jurnal Filsafat Indonesia, Vol 4 No 3 : hal.265

melakukan sebuah perubahan sosial secara terencana. Konsep rekayasa sosial pada dasarnya berupa *planned social change* (perubahan sosial yang terencana). Sebuah rekayasa sosial berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan tertentu. Proses ke arah perubahan sosial harus diawali dengan ide tentang ketiga hal tersebut”.¹⁴⁰

Bagi Popper masyarakat totaliter (*totalitarian society*) adalah : “*For Popper, the opposite of an open society was a totalitarian society, in which laws, institutions and scientific principles are beyond criticism because they are God-given, based on a natural order or derived from universal truths*”¹⁴¹. Pada sisi lain, para filsuf liberalis berpandangan bahwa *open society* memiliki karakteristik, sebagai berikut :

1. Individual autonomy
2. Popular sovereignty
3. Civil liberties as inalienable rights
4. Equal opportunity
5. Open enquiry and free conscience.

Otonomi individual merupakan salah satu aspek yang mencerminkan perhormatan pada kebebasan manusia. Otonomi individu adalah hal yang paling dijunjung tinggi dalam kehidupan demokrasi. Otonomi individu yang tidak dihargai menandakan bahwa kekuasaan sudah mengarah pada totalitarianism. Kebebasan dalam ruang publik hanya bisa diukur melalui penghormatan negara pada otonomi individu. Masyarakat sipil yang kuat mencerminkan otonomi individu tidak dalam ancaman.

¹⁴⁰ Wulandari, Taat. 2016. Rekayasa Sosial Kolaborasi Pendidikan Karakter dan Pendidikan Multikultural : Praxis di Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi Volume 4, No 2 : hal.189

¹⁴¹ Ibid : hal.7

Kedaulatan sipil (Popular sovereignty) merupakan prinsip dasar demokrasi. Kedaulatan sipil atau rakyat oleh Suryawati dipaparkan sebagai berikut : “Negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat, berarti semua kegiatan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan undang-undang ini adalah penjelmaan kehendak sebagian besar rakyat, dan pemerintahan dikatakan : 'dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, (*from the people, of the people, for the people*); dan negara ini disebut negara demokrasi; nilai demokrasi ini untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan melembaga, sehingga apabila terjadi perubahan, dilakukan secara damai, melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat dalam suatu lembaga, dengan memperhatikan kehendak sebagian besar rakyat, dengan mengakui keberagaman serta menjamin tewujudnya keadilan yang merata. Kedaulatan rakyat atau demokrasi inilah yang menjadi dasar pemikiran para pendiri negara Indonesia dahulu, bahwa demokrasi Indonesia adalah berbeda dengan demokrasi negara-negara barat, karena demokrasi Indonesia berdasarkan pada permusyawaratan yang mendatangkan kesejahteraan sosial, dan rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, dalam arti seluas-luasnya, terutama dalam menyusun pemerintahan sendiri dan mengatur ekonominya sendiri, untuk mensejahterakan dirinya sendiri. Demokrasi sebenarnya merupakan suatu gagasan atau ide dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dalam pemerintahan pada suatu negara. Seluruh kegiatan dalam pemerintahan berdasarkan peraturan atau hukum yang berlaku yang dikuasakan kepada pimpinan pemerintahan (lembaga eksekutif) oleh rakyat, dan juga semua peraturan di buat oleh rakyat melalui wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif, dan ada perlindungan

terhadap hak-hak rakyat baik hak-hak kebebasan sipil, maupun hak-hak politiknya. Kebebasan hak-hak rakyat ini tidak tanpa batas tapi dibatasi oleh peraturan yang berlaku dan telah ditetapkan dalam konstitusi negara. Pelaksanaan kedaulatan rakyat ini dilakukan secara arif dan bijaksana, melalui kekuasaan rakyat tersebut, akan tetapi rakyat dapat merubah atau menarik kembali mandatnya itu, sehingga ajaran Rousseau ini berdasarkan kehendak rakyat dan penerima mandat menjalankan kekuasaan itu harus sejalan dengan kehendak rakyat, " baik keseluruhan (*volente de Tous*), maupun kehendak sebagian dari rakyat (*volente generale*) ". Kehendak rakyat seluruhnya (*volente de tous*) ini, hanya digunakan sekali saja, pada saat pembentukan negara, melalui perjanjian masyarakat; sedangkan kehendak sebagian dari rakyat (*volente generale*), melalui keputusan suara terbanyak yang diberlakukan setelah negara berdiri, supaya negara bisa berjalan dalam arti negara dapat menjalankan pemerintahannya dan memperlakukan rakyatnya sesuai dengan kehendak sebagian besar rakyatnya itu. Ajaran Rousseau inilah yang menjadi dasar dari asas demokrasi di negara-negara barat dan diikuti juga oleh negara-negara lainnya di dunia ini, termasuk negara Indonesia¹⁴².

Salah satu indikator *open society* adalah membuka ruang bagi kebebasan sipil. Kebebasan sipil memberikan pada setiap warga untuk mengekspresikan hak-haknya di ruang publik tanpa intimidasi. Fauzi & Mujani menyatakan "Kebebasan sipil mencakup kebebasan untuk berbicara, berkumpul atau berserikat, beragama atau berkeyakinan, terlepas dari berbagai perbedaan primordial yang ada pada

¹⁴² Suryawati, Nany. 2018. Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi. Simposium Nasional dan Call of Paper : Rekonstruksi, Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang : hal. 118

warga negara, seperti perbedaan gender, suku, dan agama. Dan lebih khusus lagi, karena keyakinan dan paham keagamaan di antara warga negara yang berbeda-beda, termasuk di antara para pemeluk agama tertentu yang sama, maka sejatinya pemerintah tidak boleh mengeluarkan peraturan atau kebijakan-kebijakan publik apa pun yang mengatur bagaimana keyakinan atau paham keagamaan harus dijalankan oleh seorang warganegara, karena setiap peraturan atau kebijakan publik yang dikeluarkan seharusnya berlaku bagi semua warganegara".¹⁴³

Karakteristik lain dari *open society* adalah memberikan kesempatan yang sama (*equal opportunity*) pada setiap warga untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. *Equal opportunity* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keadilan sosial yang mesti diwujudkan dalam *open society*. John Rawls mendeskripsikan tiga prinsip-prinsip keadilan yang mesti ditegakkan :¹⁴⁴

1. Setiap warga masyarakat yang bersangkutan menerima konsep umum yang sama tentang keadilan, dan konsep tersebut di mengerti secara luas.
2. Masyarakat tersebut secara konsisten merealisasikan konsep umum tersebut di dalam lembaga-lembaga kemasyarakatannya
3. Setiap warga memiliki rasa keadilan yang efektif, yang menuntun mereka kepada kehendak untuk menyelenggarakan keadilan yang mereka perlukan itu.

¹⁴³ Fauzi, Ihsan Ali & Saiful Mujani. 2009. Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Kritis atas Perda Syari'ah. Jakarta. Penerbit Nalar : hal.3

¹⁴⁴ Indriani Suri & Hadi Rianto. 2019. Analisis Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Untuk Mengembangkan Sikap Keadilan Di Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 : hal.172

Open enquiry and free conscience adalah sebuah karakteristik yang memberikan kepada warga hak untuk bertanya secara terbuka tanpa intimidasi. Kebebasan untuk mempertanyakan hal yang berkenaan dengan apapun dalam urusan publik dengan prinsip hati nurani yang bebas. Karakteristik ini merupakan cerminan dari kualitas penataan negara yang berdiri pada prinsip universal kemanusiaan dan pengelolaan negara.

Mencermati pemaparan diatas maka modal sosial memiliki relevansi dalam mengembangkan masyarakat totaliter menuju masyarakat terbuka. Modal sosial memiliki manfaat pada pengembangan masyarakat sipil. Modal sosial memberikan daya adaptasi dan daya tahan yang tinggi terhadap berbagai tantangan. Terdapat beberapa faktor kunci dalam mengukur modal sosial di masyarakat yakni :¹⁴⁵

1. Memiliki Perasaan identitas
2. Perasaan memiliki atau sebaliknya, perasaan alienasi
3. Sistem kepercayaan dan ideologi
4. Nilai-nilai dan tujuan-tujuan
5. Ketakutan-ketakutan
6. Sikap-sikap terhadap anggota lain dalam masyarakat
7. Persepsi mengenai akses terhadap pelayanan, sumber dan fasilitas (misalnya pekerjaan, pendapatan, pendidikan, perumahan, kesehatan, transportasi, jaminan sosial)
8. Opini mengenai kinerja pemerintah yang telah dilakukan terdahulu
9. Keyakinan dalam lembaga-lembaga masyarakat dan orang-orang pada umumnya
10. Tingkat kepercayaan

¹⁴⁵ Kurniawan, Itok Dwi. 2018. Bekerjanya Demokrasi Melalui Modal Sosial. Jurnal Integralistik. No.1. Th. XXIX : hal.44

11. kepuasan dalam hidup dan bidang-bidang kemasyarakatan lainnya
12. harapan-harapan yang ingin dicapai di masa depan

Dapat dikatakan bahwa modal sosial dilahirkan dari bawah (*bottom-up*), tidak hierarkis dan berdasar pada interaksi yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, modal sosial bukan merupakan produk dari inisiatif dan kebijakan pemerintah. Namun, modal sosial dapat ditingkatkan atau dihancurkan oleh negara melalui kebijakan publik.

Dalam demokrasi serangkaian norma harus ditegakkan seperti kebebasan, akuntabilitas, transparansi publik dan sebagainya. Modal sosial dapat menguatkan norma tersebut agar masyarakat dapat memahami dan melaksanakannya. Norma dalam modal sosial memiliki kemampuan dalam memberi dasar tindakan dan interaksi sosial. Elemen modal sosial yakni norma, jaringan dan *trust* memiliki signifikansi dalam kehidupan demokrasi :¹⁴⁶

1. Norma sebagai elemen konstitutif modal sosial menyiratkan hubungan timbal balik antara orang-orang, berdasarkan timbal balik dan asumsi bahwa apa yang kita berikan akan dikembalikan di masa depan. Putnam mendefinisikan dua jenis norma bersama: “seimbang” (*spesifik*) dan “general” (*difusif*). Norma timbal balik yang seimbang tampaknya kurang relevan menguntungkan dan didasarkan pada pertukaran layanan yang berumur pendek. Norma-norma umum jauh lebih penting bagi pengembangan modal sosial; norma-norma itu berarti terus menerus tidak seimbang, pertukaran antara individu yang didasarkan pada timbal balik dan asumsi bahwa apa yang kita

¹⁴⁶ Prastyo, Eko. 2021. Dampak Modal Sosial Dalam Pembangunan Demokrasi. Jurnal Modal Sosial Edisi 1 : hal. 2-3

berikan hari ini akan dikembalikan di masa depan. Beginilah kepercayaan jangka panjang di antara warga dibangun. Kepercayaan ini tidak bertujuan untuk menyenangkan aspirasi yang setara saat ini terkait dengan tepat waktu. Dalam jangka panjang, norma umum timbal balik menghasilkan manfaat yang lebih besar dan bertindak lebih produktif pada modal sosial. “Masyarakat di mana norma ini dipatuhi, dapat melawan oportunisme secara lebih efisien dan menyelesaikan masalah tindakan kolektif”. Efisiensi norma bersama secara positif terkait dengan organisasi masyarakat sipil, memungkinkan mereka untuk berkolaborasi dan mendekatkan kepentingan mereka dan tujuan.

2. Elemen kedua dari modal sosial adalah jaringan asesmen sipil dan politik. sosial, di mana yang lebih penting adalah jaringan asosiasi sipil (atau jaringan horizontal). pekerjaan) yang mencakup persamaan hak, status dan kekuasaan terhadap asosiasi politik yang secara eksklusif bersifat hierarkis, yaitu vertikal, yang didominasi oleh distribusi yang tidak merata kekuasaan yang berdampak negatif terhadap perkembangan modal sosial. Oleh karena itu modal sosial berakar pada jaringan sosial dan hubungan serta direncanakan sebagai sumber daya yang kuat dalam struktur sosial, yang digunakan secara sengaja untuk berbagai kebutuhan dan kepentingan warga negara. Mempertimbangkan fakta bahwa modal sosial dianggap sebagai sumber daya yang dapat digunakan, Nan Lin menegaskan tiga komponen modal sosial: struktur (*embeddedness*), kesempatan (aksesibilitas melalui jejaring sosial), dan tindakan (penggunaan).

3. Unsur ketiga dan paling relevan dari modal sosial adalah kepercayaan yang dibangun sebagai konsekuensi alami dari dua elemen bernama. Dimana norma didasarkan pada timbal balik dan terhubung dengan jaringan horizontal masyarakat sipil, rasa saling percaya ditiru. Kepercayaan timbal balik sangat penting untuk memfasilitasi kolaborasi dan tindakan yang mengarah pada pencapaian kepentingan dan tujuan timbal balik. "Pengendara bebas" sangat sering muncul dalam pengaturan seperti itu. "Pengendara bebas" tidak ingin mengambil bagian dalam tindakan timbal balik, tetapi berkomitmen untuk mengambil keuntungan penuh dari kebaikan bersama. Munculnya "penunggang bebas" berkembang partikularisme dan memutuskan hubungan timbal balik di antara individu-individu dalam masyarakat. Putnam menegaskan bahwa dalam situasi seperti itu, negara tidak dapat bertindak sebagai arbiter yang netral dalam menyelesaikan perselisihan rakyat. Yakni, demi stabilitas masyarakat, solusi terbaik adalah dengan adanya hubungan timbal balik yang dibangun atas dasar kerjasama dan kepercayaan. "Tingkat perkembangan dan jenis modal sosial adalah jawaban terakhir atas pertanyaan mengapa beberapa komunitas memiliki mengembangkan kapasitas lembaga-lembaga demokrasi yang mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial, dan yang lain belum?"

Tercapainya *open society* menandakan bahwa tingkat demokratisasi semakin baik kualitasnya. Kehidupan demokrasi yang semakin baik menandakan bahwa modal sosial yang dimiliki masyarakat mampu memberikan fondasi

bagi bertahannya sistem *open society*. Terwujudnya *open society* mencerminkan kuatnya kekuatan sipil dari dominasi totalitarianism negara.

Modal sosial adalah fondasi yang kokoh dan dasar yang berkontribusi terhadap pertumbuhan dan penguatan masyarakat sipil sehingga meningkatkan kesadaran partisipasi politik yang diperlukan untuk pembangunan demokrasi. Kepercayaan pada institusi tidak dapat dibangun tanpa kepercayaan timbal balik yang kuat dan norma timbal balik. Modal sosial menjadi relevan karena mempengaruhi memelihara kebajikan sipil yang sangat penting untuk stabilitas sosial, kohesi dan interaksi. Demikian juga modal sosial, khususnya modal bridging, berkontribusi terhadap inklusi sosial. Kita dapat mengklaim bahwa "pengecualian sosial dan modal sosial adalah dua sisi mata uang" sisi baik dan sisi lain buruk karena modal sosial adalah satu-satunya sarana dalam perjuangan terhadap pengucilan dan diskriminasi sosial". Selain efeknya dalam konteks sosial budaya, modal sosial secara langsung dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi; ini juga bisa transfer ke modal fisik atau material sedangkan sudah menjadi rahasia umum bahwa demokrasi tidak dapat berfungsi tanpa tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu. Modal sosial yang kuat dapat mempengaruhi pengembangan partisipasi politik dengan cara sebagai berikut:¹⁴⁷

1. Kepercayaan interpersonal dan norma timbal balik sebagai bagian konstituen dari kapabilitas sosial dapat berubah menjadi sikap kepercayaan sosial umum.
2. Modal sosial dapat secara positif mempengaruhi partisipasi politik dengan meningkatkan kepercayaan pada lembaga demokrasi; itu juga dapat

¹⁴⁷ Ibid : hal. 11

mempengaruhi proses transformasi antar kepercayaan pribadi dalam kepercayaan institusional.

3. Modal sosial dapat meningkatkan partisipasi politik dengan memperkuat sosial norma partisipasi dalam jaringan.
4. Modal sosial dapat mempengaruhi pemungutan suara dengan merangsang aliran informasi politik dalam jaringan.

Modal sosial merupakan sumber daya sosial yang berfungsi seperti lem yang mengikat masyarakat yang merupakan jaminan bahwa ikatan akan menciptakan sistem yang membuat masyarakat tersebut akan terus bertumbuh dan berkembang. Karena fungsi modal sosial seperti lem atau perekat maka kesatuan dalam kebersamaan dapat diwujudkan. Meskipun demikian sebagai sumber daya informal, modal sosial dapat mengalami peningkatan tapi juga penurunan.

Trust sangat penting dalam membangun ikatan sosial diantara kelompok-kelompok sosial. Membangun trust harus dilalui dengan dialog untuk memahami kepentingan tiap kelompok dan pada akhirnya membangun hal-hal yang menjadi kepentingan Bersama. Denhardt menyatakan bahwa *"The public interest is the result of a dialogue about shared values rather than the aggregation of individual self-interests. Therefore, public servants do not merely respond to the demands of "customers," but rather focus on building relationships of trust and collaboration with and among citizens"*¹⁴⁸. Kepentingan publik adalah hasil dari dialog tentang nilai-nilai bersama dibanding persoalan agregasi kepentingan pribadi individu. Oleh karena itu, pelayan publik

¹⁴⁸ Ningtyas, Trimurti. 2018. Kepercayaan Masyarakat (Citizen Trust) Di Badan Pertanahan Nasional (BPN) II Surabaya. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial - Vol. 2 No. 1 : hal.196

tidak hanya menanggapi tuntutan "pelanggan," melainkan fokus pada membangun hubungan kepercayaan dan kolaborasi dengan dan di antara warga negara.

Trust yang terbentuk antar masyarakat sipil dengan pemerintah akan menguatkan demokrasi. Penguatan demokrasi diukur dari tingkat partisipasi politik masyarakat. Tingkat partisipasi politik yang tinggi adalah salah satu indikator *open society*. Tarigan menyatakan “*Syarat utama warga negara disebut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan yaitu: ada rasa kesukarelaan (tanpa paksaan), ada keterlibatan secara emosional, dan memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya*”¹⁴⁹.

Partisipasi politik sendiri memiliki beragam pengertian yang berbeda dikalangan ahli ilmu sosial, sebagai berikut :¹⁵⁰

Tabel 5.1
Beberapa Definisi Partisipasi Politik

Sarjana	Defenisi	Indikator
Samuel P. Huntington & Joan M. Nelson (1984:5)	Partisipasi politik...kegiatan warga khusus (<i>private citizen</i>) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berupa kegiatan bukan sikap-sikap dan kepercayaan ▪ Memiliki tujuan mempengaruhi kebijakan publik ▪ Dilakukan warga negara (biasa)
Michael Rush & Philip Althoff (2003: 23)	Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai macam-macam tingkatan di dalam sistem politik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik ▪ memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi

¹⁴⁹Tarigan, M. 2009. Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Temanggung dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2008. Semarang: Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro Semarang : hal.27

¹⁵⁰ Ibid : hal.28

<p>Herbert Mc Closky (dalam Miriam, 1994: 183-184)</p>	<p>Miriam, 1994: 183-184) Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela (<i>voluntary</i>) dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan atau pembentukan kebijakan umum.</p>	<p>warga negara terlibat dalam proses-proses politik</p>
<p>Kevin R. Hardwic (dalam Frank N. Magill, 1996)</p>	<p>Partisipasi politik memberi perhatian cara-cara warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat interaksi antara warga negara dengan pemerintah ▪ Terdapat usaha warga negara untuk mempengaruhi pejabat publik
<p>Miriam Budiarjo (1994: 183)</p>	<p>Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan cara memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (<i>public policy</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berupa kegiatan individu atau kelompok ▪ Bertujuan ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, memilih pimpinan publik atau mempengaruhi kebijakan publik.

<p>Ramlan Surbakti (1992: 140-141)</p>	<p>Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. sesuai dengan istilah partisipasi, (politik) berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public ▪ Dilakukan oleh warga negara biasa
--	--	--

Mikkelsen menjabarkan makna partisipasi sebagai konsep kunci pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :¹⁵¹

1. Partisipasi diartikan sebagai pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
2. Partisipasi diartikan sebagai kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Pemaknaan ini hampir sama dengan pemaknaan yang pertama, yang membedakan adalah kontribusi sukarela masyarakat kepada proyek.
3. Partisipasi adalah suatu proses keterlibatan secara aktif dalam pengambilan keputusan bersama dengan pemerintah. Pemaknaan seperti ini memberikan keterlibatan yang luas dalam tiap proses pembangunan.

¹⁵¹ Muslim, Azis. 2007. Pendekatan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Aplikasi : Jurnal Ilmu-Ilmu Agama. Vol VIII (2) : hal.93-94

4. Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri. Inti dari partisipasi ini adalah sikap sukarela masyarakat untuk membantu keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan sendiri.
5. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka. Partisipasi dalam pengertian ini sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakat secara bersama-sama mengidentifikasi kebutuhan dan masalahnya, bersama-sama mengupayakan jalan keluarnya dengan jalan memobilisasikan segala sumber daya yang diperlukan serta secara bersama-sama merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Keseluruhan definisi diatas mengandung unsur-unsur yang ada dalam modal sosial. Warga negara tidak akan ikut serta dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jika *trust* tidak terjalin antara warga dengan negara. Keterlibatan warga dalam, mengawasi jalannya kekuasaan negara tidak lain ditopang pada norma demokrasi dimana warga negara memiliki ruang besar untuk mempengaruhi keputusan negara. Partisipasi politik tidak hanya menjadi ciri utama *open society* namun juga berakar pada aktualnya unsur-unsur modal sosial.

Secara empiris modal sosial agak sulit diukur. Fukuyama menyebutkan tiga alasan mengapa modal sosial sulit diukur¹⁵²

¹⁵² Prayitno, Ujianto Singgih. Loc.cit : hal.137-138

1. Modal sosial memiliki dimensi kuantitatif yang penting dan tidak dapat diabaikan, sehingga untuk memahami modal sosial perlu diperhatikan tingkat aksi kohesif yang mampu dilakukan sebuah kelompok.
2. Berkaitan dengan eksternal-eksternal positif dari keanggotaan kelompok, atau dalam bahasa Fukuyama "Radius Kepercayaan positif." Semua kelompok memerlukan tingkat modal sosial tertentu untuk dapat bergerak, beberapa diantaranya menjalin ikatan kepercayaan diluar keanggotaan mereka sendiri.
3. Mengenai adanya eksternal negatif, yaitu adanya beberapa kelompok secara aktif mendukung tindakan yang memusuhi, bahkan melakukan tindakan kejahatan terhadap mereka yang tidak menjadi anggotanya.

Kesulitan diatas membuat perhitungan dan analisis modal sosial dalam beragam penelitian cenderung memperlihatkan variasi. Namun satu hal yang pasti bahwa tak ada yang menyangkal betapa pentingnya modal sosial bagi pengembangan masyarakat.

Modal sosial juga merupakan sejenis proses. Meningkatkan kualitas modal sosial memerlukan perhatian atas tiga konsep yakni *bonding social capital*, *bridging social capital* dan *linking social capital* :¹⁵³

1. *Bonding social capital, which denotes ties between like people in similar situations, such as immediate family, close friends and neighbours.*
2. *Bridging social capital, which encompasses more distant ties of like persons, such as loose friendships and workmates; and*

¹⁵³ Field, John. Loc.cit : hal. 46

3. *Linking social capital, which reaches out to unlike people in dissimilar situations, such as those who are entirely outside the community, thus enabling members to leverage a far wider range of resources than are available within the community*

Bonding social capital dimaknai sebagai modal sosial yang mengikat yang menunjukkan ikatan antara individu dalam situasi yang mirip seperti ikatan dalam keluarga dekat, teman dekat dan tetangga.

Bridging social capital dimaknai sebuah relasi yang dijembatangi oleh modal sosial yang mencakup ikatan yang lebih jauh dibanding *bonding social capital* persahabatan yang longgar dan teman kerja.

Linking social capital bermakna menghubungkan modal sosial yang menjangkau individu diluar kelompok sehingga memungkinkan anggota kelompok memanfaatkan sumber daya yang jauh lebih luas daripada yang tersedia dalam kelompok.

Penguatan modal sosial haruslah mencapai tahap *linking social capital* melalui terbentuknya *trust* diantara kelompok sosial, terbentuknya jejaring sosial dan pada akhirnya dikuatkan dengan norma bersama. Perluasan jaringan sosial melampaui kelompok memiliki dampak yang sangat baik bagi penguatan masyarakat sipil. Perluasan jaringan tentu saja melibatkan interaksi komunikatif antar kelompok.

Jensen mengemukakan bahwa istilah jaringan merujuk pada tiga istilah yang berbeda: (1) *Total Network Sistem*, yang terdiri dari pola komunikasi di antara semua individu dalam sistem seperti sebuah organisasi. Jaringan ini dapat terdiri dari ribuan individu dalam organisasi yang besar. (2) *Klik*, didefinisikan sebagai sebuah elemen sistem yang saling berinteraksi satu sama lain. Pada umumnya, *klik* terdiri dari

5-25 anggota (beberapa bisa lebih besar). Karena itu, *klik* menjadi salah satu komponen utama dari jaringan komunikasi dalam suatu organisasi. Dalam beberapa literatur, penulis juga menyebut unit ini sebagai sebuah jaringan atau kelompok. (3) Personal Network/Jaringan pribadi, didefinisikan sebagai orang-orang yang saling berhubungan yang dihubungkan oleh komunikasi berpola yang mengalir ke setiap individu tertentu. Sehubungan dengan itu, setiap individu memiliki jaringan pribadi mengenai dengan siapa ia berinteraksi secara konsisten dan mengomunikasikan topik tertentu. Dengan demikian, setiap individu memiliki lingkungan komunikasinya dimana jaringan pribadi ini sebagian dapat menjelaskan perilaku individu¹⁵⁴.

Kekuatan sebuah jaringan sosial terletak pada sinergitas antar kelompok sosial dalam mewujudkan dan menguatkan norma bersama untuk mencapai tujuan bersama. Jaringan sebagai unsur dalam modal sosial berfungsi dalam perluasan dan penguatan suatu sistem sosial. Dimulai dari pembentukan jejaring individu, kelompok, komunitas hingga masyarakat. Memperluas jangkauan modal sosial mensyaratkan sebuah gerakan sosial yang diinisiasi oleh kelompok-kelompok sipil.

Gerakan sosial sendiri adalah sebuah konsep yang memiliki pengertian yang beragam dari para sosiolog. Dibawah ini akan diketengahkan beragam definisi tersebut :

1. Bill Moyer dalam Zainuddin (2011:6) menyatakan bahwa “Suatu kelompok gerakan dapat disebut sebagai gerakan sosial apabila mereka melakukan pergerakan kolektif di mana massa disiagakan, dididik dan dikerahkan selama bertahun-tahun, untuk

¹⁵⁴ Sulistiawati, Asri. Juara P Lubis & Eko Sri Mulyani. 2014. Analisis Jaringan Sosial dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tani Berkah. *Sodality : Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Vol. 02, No. 02 : hal. 77

menghadapi tantangan pemegang kekuasaan dan masyarakat untuk mengatasi masalah sosial dan menata kembali nilai-nilai sosial yang kritis. Gerakan sosial juga sebagai suatu kegiatan bersama untuk menentukan suatu tatanan baru dalam kehidupan”¹⁵⁵

2. Porta & Diani menyatakan : “Gerakan sosial merupakan bentuk aktivisme yang khas dari masyarakat sipil. Sebagai bentuk aktivisme yang khas, didefinisikan sebagai ‘bentuk aksi kolektif’ dengan orientasi konfliktual yang jelas terhadap lawan sosial dan politik tertentu, dilakukan dalam konteks jejaring lintas kelembagaan yang erat oleh aktor-aktor yang diikat oleh rasa solidaritas dan identitas kolektif yang kuat melebihi bentuk-bentuk ikatan dalam koalisi dan kampanye bersama. Ciri lain dalam gerakan sosial adalah tujuannya yang bukan untuk mencapai kekuasaan, sekalipun dalam beberapa hal gerakan sosial ditujukan untuk mengganti rezim-rezim yang berkuasa. Ini berbeda dengan gerakan politik yang umumnya ditujukan untuk merebut kekuasaan baik yang dilakukan dengan cara damai atau lewat kekerasan”¹⁵⁶
3. Abercrombie, Hill & Turner menyatakan bahwa “*social movement* adalah istilah yang mencakup beraneka ragam bentuk aksi bersama yang bertujuan pada reorganisasi sosial. Tujuan gerakan sosial mungkin begitu luas, seperti pemakzulan pemerintahan yang berkuasa, atau mungkin sempit saja seperti

¹⁵⁵ Zainuddin M, 2011. *Inisiasi Gerakan Sosial : Studi Kasus tentang Strategi Hizbut tahrir Indonesia Membangun Gerakan Sosial di Yogyakarta (1998-2010)*. Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Univeritas Gadjah Mada. Yogyakarta : hal.6

¹⁵⁶ Porta, Donatella Della and Diani Mario, 2006. *Social Movements and Introduction (second editions)*, Blackwell Publishing, USA : pp.6

pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalanan kota. Bentuk-bentuk pengorganisasiannya juga beragam. Beberapa gerakan sosial diatur secara sangat baik dengan kepemimpinan dan birokrasi yang tertata rapi, sebagian yang lain secara cair dan informal”¹⁵⁷

4. Zald & McCarthy menyatakan bahwa : “gerakan sosial sebagai seperangkat opini dan kepercayaan (*opinion and belief*) dalam suatu kelompok masyarakat yang mencerminkan preferensi bagi perubahan pada sebagian elemen struktur sosial dan atau distribusi kemanfaatan dalam tatanan masyarakat yang lebih luas”¹⁵⁸
5. McAdam menyatakan : “*Social movements are "those organized efforts, on the part of excluded groups, to promote or resist changes in the structure of society that involve recourse to noninstitutional forms of political participation"*. Sebuah gerakan sosial diciptakan untuk menciptakan upaya perlawanan agar terjadi perubahan dalam masyarakat dengan melibatkan bentuk-bentuk perlawanan non-institusional yang merupakan bentuk partisipasi politik masyarakat yang dirugikan”¹⁵⁹
6. Giddens mendefinisikan :” gerakan sosial sebagai upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama; atau gerakan mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*collective action*) di luar lingkup lembaga-lembaga yang sudah mapan. Pengertian yang sama diutarakan Tarrow yang menempatkan gerakan sosial sebagai politik

¹⁵⁷ Abercrombie, Hill & Turner. Loc.cit : pp.521

¹⁵⁸ Zald, Mayer N & Carthy, John D Mc, 2003. *Social Movement in an Organizational Society*, Transaction Publishers, New Jersey : pp.1219

¹⁵⁹ McAdam, Doug. 1982. *Political Process and the Development of Black Insurgency 1930-1970*. Chicago. University of Chicago Press : pp.25

penolakan yang terjadi ketika rakyat biasa yang bergabung dalam kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh menggalang kekuatan untuk melawan elit, pemegang otoritas, dan pihak-pihak lawan lainnya”¹⁶⁰

7. Canel mendefinisikan : “gerakan sosial sebagai ”ruang antara” yang menjembatani masyarakat sipil dan negara. Gerakan sosial adalah ruang antara pasifisme publik dengan penyalagunaan kekuasaan negara (*abuse of power*). Dengan sendirinya gerakan sosial mengambil tanggung jawab publik atas peran-peran yang seharusnya dijalankan oleh negara seperti jaminan keamanan, jaminan kesejahteraan, partisipasi yang lebih luas dan lain sebagainya. Melalui ruang tersebut gerakan sosial mampu mempolitikasi *civil society* tanpa harus mereproduksi kontrol, regulasi, dan intervensi seperti yang dilakukan oleh negara”¹⁶¹

Modal sosial perlu dikuatkan dengan gerakan sosial yang sangat berguna untuk menjamin kelangsungan kohesi sosial. Kohesi sosial adalah cita-cita kolektif dimana konflik sosial sedemikian rupa harus ditekan atau diantisipasi demi kebaikan bersama. Aksi kolektif untuk menguatkan modal sosial adalah salah satu cara agar kehidupan sosial berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun konflik adalah sebuah keniscayaan proses sosial namun jangan sampai eskalasi konflik menghancurkan modal sosial yang telah dibangun.

¹⁶⁰ Tarrow Sidney, 1998. *Power in Movement: Social Movements, Collective Action, and Politics*, 2nd ed.: Cambridge University Press , Cambridge, UK : pp.23

¹⁶¹ Canel E., *New Social Movement Theory and Resource Mobilization Theory: The Need Integrati*, dalam M Kauffman dan HD Alfonso (Ed) [1997] , *Community Power and Grassroots Democracy; The Transformation of Social Life*, Zed Book : pp.1

BAB VI

Kesimpulan

Modal sosial memiliki relevansi dalam memajukan kehidupan sosial. Modal sosial merupakan modal yang dapat melindungi masyarakat dari goncangan yang dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan sosial. Meskipun konflik adalah proses yang tak bisa dielakkan dan merupakan respon dari perubahan lingkungan sosial disekitar namun konflik sedapat mungkin bisa dikelola agar tak menghancurkan modal sosial yang telah dibangun. Hubungan modal sosial dengan konflik tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Bentuknya ada dua yakni apakah konflik menumbuhkan modal sosial atau menghancurkannya. Fungsionalisasi konflik seharusnya bisa dikelola dengan cermat sehingga keniscayaan konflik sosial berjalan beriringan dengan ketahanan modal sosial. Meski terjadi goncangan dan pembaharuan namun modal sosial yang mengatur kehidupan bersama secara konstruktif jangan ikut porak-poranda.

Fungsi modal sosial dalam memajukan masyarakat bisa diukur dari penjaminan azas-azas hak asasi manusia. Upaya untuk membungkam kebebasan pada tingkat yang paling rendah adalah upaya sistematis menghancurkan modal sosial. Modal sosial sangat cocok dengan ide masyarakat terbuka (*open society*). Masyarakat terbuka adalah bentuk sempurna aktualisasi modal sosial yang menyeimbangkan kebebasan individu dan tanggung jawab disatu sisi dan etika dan hukum disisi yang lain.

Dalam masyarakat terbuka, nilai utama modal sosial seperti kepercayaan (*trust*), jaringan (*network*) dan norma (*norm*) teraktualisasi secara informal sehingga masyarakat

sipil memiliki tingkat independensi dan daya adaptasi berhadapan dengan negara. Disisi lain, negara dalam *open society* mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi dan terhindar dari kekuasaan yang totaliter. Secara sosiologis, masyarakat terbuka menyeimbangkan dimensi kebebasan individu dan constrain struktur sosial. Modal sosial yang bersumber dari masyarakat selaras dan harmonis dengan kekuasaan negara. Kebijakan sosial yang diproduksi negara bersifat aspiratif. Negara aktif dalam menjaga dan mengembangkan modal sosial yang berasal dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abustam, Idrus, H.M.; Irwansyah, Idham, Komunitas Pedesaan. Budaya Kemiskinan dan Pendidikan Orang Dewasa, Badan Penerbit UNM, Makassar.
- Adib, Muhammad. 2012. Agen dan Struktur dalam Pandangan Piere Bourdieu. *BioKultur*. Vol.I.No.2 :91-110.
- Aghajanian, Alia. 2012. Social Capital and Conflict. HiCN Working Paper 134. H i C N Households in Conflict Network. The Institute of Development Studies - at the University of Sussex - Falmer – Brighton : 1-15.
- Aji, M Prakoso & Jerry Indrawan. 2019. Memahami Studi Perdamaian Sebagai Bagian dari Ilmu Hubungan Internasional. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*. Volume 9 Nomor 3 : 65-83.
- Ali, Zezen Zainuddin. 2017. Pemikiran Hegemoni Antonio Gramsci (1891-1937) di Italia. *Yaqzhan*. Vol.3. No.2 : 63-81.
- Ancok, Djamaludin. 2003. Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat. *PSIKOLOGIKA Nomer 15 Volume VIII* : 4-14.
- Ansori. 2009. Rasionalitas Komunikatif Habermas. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi : Komunika*. Vol 3. No.1 : 90-100.
- Asriati, Nuraeni & Bahari, Yohanes. 2010. Pengendalian Sosial Berbasis Modal Sosial Lokal pada Masyarakat di Kalimantan Barat. *MIMBAR*, Vol. XXVI, No. 2 : 147-158.

Astri, Herlina. 2011. Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penguatan Kearifan Lokal. *Aspirasi* Vol. 2. No. 2 : 151-162.

Azifambayunasti, Azril.2022. Relevansi Ide The Open Society Karl Popper dan Multikulturalisme dalam Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*, Vol 5, No. 1 : 37-48.

Badan Pusat Statistik. 2012. *Statistik Kriminal 2021*. Jakarta. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Kota Makassar. 2022. *Kota Makassar dalam Angka 2022*. Makassar. Badan Pusat Statistik Kota Makassar.

Barnard, A. 2000. *History and Theory in Anthropology*. Cambridge.

Basrowi, Sukidin. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya. Insan Cendekian.

Bhandari, Humnath and Kumi Yasunobu. 2009. What is Social Capital? A Comprehensive Review of the Concept. *Asian Journal of Social Science*. Volume 37. Number 3 : pp. 480-510.

Borgotta, Edgar F&Montgomery, Rhonda J.V., 2000, *Encyclopedia of Sociology*, Second Edition, USA ,Macmillan Reference.

Bourdieu, Pierre. 2010. *Arena Produksi Kultural; Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. Jogjakarta: Kreasi Wacana.

Bovens, Mark. 2020. *The Open Society and Its Future : Think Paper Series #1* in Mark Bovens & Marcus Düwell eds. *Institutions for Open Societies*, Utrecht University.

Canel E., *New Social Movement Theory and Resource Mobilization Theory: The Need Integrati*, dalam M Kauffman dan HD Alfonso (Ed) [1997] , *Community Power and Grassroots Democracy; The Transformation of Social Life*, Zed Book.

Capriati, Rossy. 2013. *Strategi dan Perjuangan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Pasar Pagi Kota Samarinda*. eJournal Sosiatri-Sosiologi. Vol 1(2): 36-50.

Chikmawati, Nurul Fajri.Evie Rachmawati Nur Ariyanti & Nelly Ulfah A.R. 2015. *Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Ekonomi Guna Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif (Studi tentang Penguatan Kerangka Hukum dalam Penyelesaian Konflik Sosial Ekonomi di Era Komunitas ASEAN)*. Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka UTCC : 258-274.

Diem, Anson Ferdiant. 2012. *Wisdom of The Locality (Sebuah Kajian: Kearifan Lokal dalam Arsitektur Tradisional Palembang)*. Berkala Teknik Vol.2 No.4 : 299-305.

Doda, Zerihun. 2005. *Introduction to Sociology*. Ethiopia. Produced in collaboration with the Ethiopia Public Health Training Initiative, The Carter the Ethiopia Ministry of Health, and the Ethiopia Ministry of Education.

Dollu, Emanuel Bate Satria. 2020. *Modal Sosial : Studi tentang Kumpo Kampo sebagai Strategi Melestarikan Kohesivitas*

Pada Masyarakat Larantuka di Kabupaten Flores Timur.
Jurnal Warta Governare Vol.1 .No. 1 : 59-72.

Field, John. 2008. Social capital. New York. Routledge.

Garna, Judistira K. 1994. *Materi Kuliah Teori-teori Ilmu Sosial*. Bandung. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

Gamin. 2014. Resolusi Konflik Dalam Pengelolaan Hutan Untuk Mendukung Implementasi REDD+. Disertasi. Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Fauzi, Ihsan Ali & Saiful Mujani. 2009. Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Kritis atas Perda Syari'ah. Jakarta. Penerbit Nalar.

Habibah, Sulhatul. 2019. Paradigma Popperian : Meninjau Rasionalisme Kritis Karl Raimund Popper. *Dar El-Ilmi : Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora*, 6(2) : 303-318.

Halim K, Abd & Mahyuddin. 2019. Modal Sosial Dan Integrasi Sosial: Asimilasi Dan Akulturasi Budaya Masyarakat Multikultural Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* Vol. 12 No.2 : 111-122.

Hardini, Mimi & Wasiaturrahma. 2020. Social capital dimensions and individual happiness in Indonesia: The micro-level study. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 18(2): 147-162.

Harjanti, Dhyah & Noerchoidah. 2017. The Effect of Social Capital and Knowledge Sharing On Innovation Capability.

Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Vol.19. No. 2 : 72–78.

Haerussaleh & Nurid Huda. 2021. Modal Sosial, Kultural dan Simbolik sebagai Representasi Pelanggengan Kekuasaan Dalam Novel *The President* Karya Mohammad Sobari (Kajian Pierre Bourdieu). *Metalingua : Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. Vol.6. No 1 : 19-28.

Haubere, Julia. 2011. *Social Capital Theory : Towards a Methodological Foundation*. Germany. VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Herbert, Maud & Isabelle Collin-Lachaud. 2016. Collaborative practices and consumerist habitus: An analysis of the transformative mechanisms of collaborative consumption. *Recherche et Applications en Marketing (English Edition)* : Pg. 1–21.

Hermawan, Yulius. 2007. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*, Yogyakarta. Graha Ilmu.

Hidayat, Rakhmat. 2008. Kurikulum sebagai Arena Kontestasi Kekuasaan: Konseptualisasi Gagasan Michael Apple hingga Pierre Bourdieu. *Komunitas* Vol 3 (2) : 25-44.

Hidayati, Wahyu. Abdul Basit & Abdul Muntaqim al Anshori. 2017. Hegemoni Taliban dalam Film *The Kite Runner* Berdasarkan Perspektif Teori Hegemoni Antonio Gramsci. *Prosiding Seminar Nasional Bahasa & Sastra IX*. Universitas Trunojoyo Madura : 491-505.

- Hurtardo, Pedro.S. 2010. Assessing the use of Bourdieu's key concepts in the strategy-as-practice field. *Competitiveness Review An International Business Journal incorporating Journal of Global Competitiveness* 20(1):52-61.
- Inayah. 2012. Peranan Modal Sosial dalam Pembangunan. *Jurnal Pengembangan Humaniora* Vol. 12 (1) :43-49.
- Indriani Suri & Hadi Rianto. 2019. Analisis Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Untuk Mengembangkan Sikap Keadilan Di Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 3 No. 2 : 166-174.
- Jumirah & Heni Wahyuni. 2018. The Effect Of Social Capital on Welfare in Indonesia. *Journal of Indonesian Economy and Business*. Volume 33, Number 1 : 65 – 76.
- Juwita, Rika . Asep Munajat & Elnawati. 2019. Mengembangkan Sikap Tanggung Jawab Melaksanakan Tugas Sekolah Melalui Metode Bercerita Pada Anak Usia 5-6 Tahun Di TK Aisyiah Bustanul Athfal 2 Kota Sukabumi. *Jurnal Utile*. Volume V, Nomor 2 : Hal 144-152.
- Keho, Yaya. 2009. Social Capital in Situations of Conflict: A Case Study from Côte d'Ivoire. *An International Multi-Disciplinary Journal, Ethiopia* Vol. 3 (3) : pp.158-180.
- Ketaren, Amiruddin. 2015. Modal Sosial Petani Dalam Pertanian Berkelanjutan Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Daerah : Studi Modal Sosial Petani di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Nanggroe Aceh Darussalam. Unimal Press.

- Koentjaraningrat, 1979. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta. Penerbit Aksara Baru.
- Kurniawan, Itok Dwi. 2018. Bekerjanya Demokrasi Melalui Modal Sosial. *Jurnal Integralistik*. No.1. Th. XXIX : 40-51.
- Kusmanto, Thohir Yuli & Misbah Zulfa Elizabeth. 2018. Struktur dan Sistem Sosial pada Aras Wacana dan Praxis. *JSW : Jurnal Sosiologi Walisongo*. Vol. 2. No 1 : hal. 39-50.
- Laha, M. Saleh. Fatmawada Sudarman & Moh. Nutfa. 2021. Kehidupan Pasca Konflik dan Ketegangan Relasi Sosial : Suatu ancaman Kehancuran Social Capital Trust. *Jurnal Predestination: jurnal of Society and Culture*. Vol .1 No.2: 109-118.
- Mawardi J, M. 2007. Peranan Social Capital Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. *Volume 3 (2) : 5-14*.
- McAdam, Doug. 1982. *Political Process and the Development of Black Insurgency 1930-1970*. Chicago. University of Chicago Press.
- Migheli, Matteo. 2012. Assessing Trust Through Social Capital? A Possible Experimental Answer. *American Journal of Economics and Sociology*, Vol. 71 (2) : 298-327.
- Minkler, M., Wallerstein, N., Wilson, N. 2009. *Improving Health Through Community organization and Community Building*. Glanz, K. *Health Behavior and Health Education: Theory, Research, and Practice*. San Francisco. John Wiley & Sons.

- Muslim, Azis. 2007. Pendekatan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Aplikasia : Jurnal Ilmu-Ilmu Agama*. Vol VIII (2) : 89-103.
- Mutakin, Ali. 2018. Resolusi Konflik melalui Nilai-nilai Kultur Pesantren. *An-Nidzam*. Vol.5. No.2 : 91-120.
- Narwoko, J Dewi&Suyanto, Bagong. 2004. *Sosiologi. Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta. Prenada Media.
- Nasrullah, Nazsir. 2009, *Teori-Teori Sosiologi*. Bandung. Widya Padjadjaran.
- Navarro, Zander. 2006. In Search of a Cultural Interpretation of Power: The Contribution of Pierre Bourdieu. *IDS Bulletin Volume 37 Number 6* : 11-22.
- Ningtyas, Trimurti. 2018. Kepercayaan Masyarakat (Citizen Trust) Di Badan Pertanahan Nasional (BPN) II Surabaya. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial - Vol. 2 No. 1* : 195-211.
- Nugroho, Ari Cahyo. 2021. Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksionisme Simbolik). *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*. Vol. 2 No. 2 : hal 185 – 194.
- Panggabean, Samsu Rizal. 2012. *Conflict Studies in Indonesia: A Preliminary Survey of Indonesian Publications*. *PCD Journal Vol. IV No. 1* : 147-180.
- Permana, Yogi Setya. 2010. Kontestasi Abangan-Santri Pasca Orde Baru di Pedesaan Jawa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol 14 (1) : 63-82.

- Pesurnay, Althien John. 2018. Local Wisdom in a New Paradigm: Applying System Theory to the Study of Local Culture in Indonesia. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 175 : 1-9.
- Porta, Donatella Della and Diani Mario, 2006. *Social Movements and Introduction (second editions)*, Blackwell Publishing, USA.
- Prastyo, Eko. 2021. Dampak Modal Sosial Dalam Pembangunan Demokrasi. Jurnal Modal Sosial Edisi 1 : 1-13.
- Prayitno, Ujianto Singgih. 2015. Etnisitas dan Agama di Kota Surabaya : Interaksi Masyarakat Kota dalam Perspektif Interaksionisme Simbolik. Aspirasi. Vol 6. No.2 : 119-130.
- Purwaningtyastuti & Anna Dian Savitri. Kohesivitas Kelompok Ditinjau dari Interaksi Sosial Dan Jenis Kelamin pada Anak-Anak Panti Asuhan. Philanthropy Journal of Psychology. Volume 4 Nomor 2 : 118-127.
- Puspitawati, Herien. 2009. *Teori Konflik Sosial dan Aplikasinya dalam Kehidupan Keluarga*. Bogor. IPB.
- Raho, Bernard. 2007, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta. Prestasi Pustaka.
- Riski, Maydi Aula. 2021. Teori Falsifikasi Karl Raimund Popper: Urgensi Pemikirannya dalam Dunia Akademik. Jurnal Filsafat Indonesia, Vol 4 No 3 : 261-272.
- Ritzer, George. 2010. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta. Rajawali Press.

Ritzer, George & Goodman, Douglas J. 2008. Teori Sosiologi Modern. Jakarta. Prenada Media Group.

Saidang & Suparman. Pola Pembentukan Solidaritas Sosial dalam Kelompok Sosial Antara Pelajar. Edumaspul: Jurnal Pendidikan. Vol 3 (2) : 122-126.

Santoso, Thomas. 2020. Memahami Modal Sosial. Surabaya. CV Saga Jawadwipa.

Saragih, Dina Elina, Soni Akhmad Nulhaqim & Muhammad Fedryansyah. 2022. Analisa Segitiga SPK Pada Kekerasan Langsung Antar Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Forum Betawi Rempug (FBR) dan Pemuda Pancasila (PP). Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. Vol.4 No.2 :134-142.

Scruton, Roger, 2007, The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought, Third Edition, New York, Palgrave Macmillan.

Setiadi, Elly M&Kolip, Usman. 2011. Pengantar Sosiologi, Pehaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi dan Pemecahannya. Jakarta. Kencana.

Siswati, Endah. 2017. Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci. Jurnal Translitera. Edisi 7 : 12-33.

Soekanto, Soerjono. 2005. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

-----2007. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. Rajawali Press.

- Soemardjan, Selo dan Soeleman, Soemardi. 1974, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta, Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Stolley, Kathy S. 2005. *The Basic Of Sociology*. Greenwood Press. Westport, Connecticut & London.
- Sztompka, Piotr . (2007) . *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada.
- Sudarsono, Agus & Wijayanti, Agustina Tri. 2016. *Pengantar Sosiologi*. Yogyakarta. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sulistiawati, Asri. Djuara P Lubis & Eko Sri Mulyani. 2014. Analisis Jaringan Sosial dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tani Berkah. *Sodality : Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Vol. 02, No. 02 : 76-82.
- Sumartias, Suwandi & Agus Rahmat. 2013. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Konflik Sosial. *Jurnal Penelitian Komunikasi* Vol. 16 No. 1 : 13-20.
- Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Supono, Boedyo. 2011. Peranan Modal Sosial dalam Implementasi Manajemen dan Bisnis. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* Vol. 11, No. 1 : 10 – 16.
- Syakra, Rusydi. 2003. Modal Sosial : Konsep dan Aplikasi. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 5 No. 1 : 1-21.

- Tanjung, Fahmi & Muryani. 2019. The Influence of Social Capital in Economic Development in Indonesia: Macro Data Analysis of 2012 and 2014. *International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering (ijasre)*, Vol 5 (3) : 128-132.
- Tarigan, M. 2009. Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Temanggung dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2008. Semarang: Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro Semarang.
- Tarrow Sidney, 1998. *Power in Movement: Social Movements, Collective Action, and Politics, 2nd ed.*: Cambridge University Press , Cambridge, UK.
- Tumengkol, Selvie M. 2012. Teori Sosiologi Suatu Perspektif Tentang Teori Konflik Dalam Masyarakat Industri. Karya Ilmiah. Fakultas Ilmu Sosial & Politik. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Turner, Jonathan. 1988. *A Theory of Social Interaction*. California. Stanford University Press.
- Ulumuddin. 2006. Jurgen Habermas dan Hermeunetika Kritis (Sebuah Gerkan Evolusi Sosial. *Jurnal Hunafa* Vol. 3 (1) : 73-90.
- Wahyudi. 2021. Teori Konflik dan Penerapannya Pada Ilmu-Ilmu Sosial. Malang. Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Waluyo, Bagus. Fabiola Dharmawanti Kurnia, Ali Mustofa & Endang Setyorini. 2020. An Analysis on the Open Society to the Main Characters of Charles Dickens' A Christmas

Carol: A Perspective of Socrates. *Journal of Development Research*, 4 (1) : pp 71-75.

Wattimena, Reza A.A. 2018. Bisakah perang dihindari? sejarah, anatomi dan kemungkinan perang di abad 21. The Ary Suta Center. Vol 43 : 45-70.

Widaningsih, Lilis. 2006. KONFLIK RUANG PUBLIK DAN PENGUATAN MODAL SOSIAL (SOCIAL CAPITAL) MASYARAKAT KAMPUNG KOTA (Studi Kasus Konflik Jalan Lingkungan di Kelurahan Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung). Prosiding Seminar Nasional PIPS 2006 SPS Universitas Pendidikan Indonesia : 1-12.

Widarahesty, Yusy & Rindu Ayu. Fenomena Pengunduran Diri Di Kalangan Pejabat Publik Jepang (Studi Tentang Budaya Politik Masyarakat Jepang Tahun 2007-2011). *Jurnal AL-AZHAR Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol . 2, No. 1 : 59-73.

Wulandari, Taat. 2016. Rekeyasa Sosial Kolaborasi Pendidikan Karakter dan Pendidikan Multikultural : Praxis di Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* Volume 4, No 2 : 186-193.

Wursanto.2003. Dasar-dasar Ilmu Organisasi. Yogyakarta.Penerbit Andi.

Zainuddin M, 2011. *Inisiasi Gerakan Sosial : Studi Kasus tentang Strategi Hizbut tahrir Indonesia Membangun Gerakan Sosial di Yogyakarta (1998-2010)*. Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Univeritas Gadjah Mada. Yogyakarta.

- Zainuddin, Sulthan. Soetarto, Endriatmo. Adiwibowo, Soeryo& Pandjaitan, Nurmala K. 2012. Kontestasi dan Konflik Memperebutkan Emas di Poboya. *Sodality: Jurnal Sosiologi Peesaan* Vol. 6 (2) : 145-159.
- Zald, Mayer N & Carthy, John D Mc, 2003. *Social Movement in an Organizational Society*, Transaction Publishers, New Jersey.
- Zuhri, Sihabuddin. 2010. Peranan Sekolah dalam Proses Sosialisasi Politik (Studi Penelitian terhadap Siswa SMA Negeri 2 Semarang). Disertasi. Tidak diterbitkan. Semarang : Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Zuldin, Muhammad. 2019. Ketimpangan sebagai Penyebab Konflik : Kajian Atas Teori Sosial Kontemporer. Temali: *Jurnal Pembangunan Sosial*, Volume 2 Nomor 1 : 157-183.

TENTANG PENULIS

Kurniati Abidin, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 1 September 1972. Menyelesaikan pendidikan S3 pada Program Studi Sosiologi UNM (2016). Dosen IAIN Bone ini mengajar di Fakultas Ushuluddin dan Dakwah serta di Pascasarjana IAIN Bone. Beberapa tulisan yang telah dihasilkannya diantaranya: Pengantar Sosiologi dan Antropologi, Komunitas Waria (Dalam Bingkai Transgender dan Eksklusi Sosial), dan Cakrawala Memahami Sosiologi. Suami Arifuddin, S.T., M.T dan memiliki 5 orang anak: Nur Fakhriyah Arif, Mufti Muarif, Munadil Akram, Fityatul Athifa Arif dan Izzah Ghazwani Arif.

MODAL SOSIAL

TRANSFORMASI KEARAH PENGELOLAAN

Konflik & Pembentukan Open Society

Kehidupan sosial seringkali dikejutkan oleh konflik yang dipersepsi mendasarkan malapetaka. Pertentangan yang terjadi ditengah masyarakat terkadang membesar dengan eskalasi yang tidak bisa diatasi. Disaat itu, konflik membesar dan menghancurkan segalanya. Dalam sejarahnya, bangsa Indonesia telah diperhadapkan pada konflik-konflik baik bersifar horizontal maupun vertikal. Korban telah berjatuh dan kohesi sosial telah koyak.

Meskipun teoritikus sosial berpandangan bahwa konflik adalah sesuatu yang bersifat alamiah namun upaya antisipatif mencegah eskalasi konflik yang membesar sangat diperlukan. Menurut penulis, Modal sosial adalah modal yang efektif bisa mencegah membesarnya eskalasi konflik. Modal sosial adalah sumber daya yang berasal dari masyarakat dan bersifat informal. Modal sosial terbentuk dalam ruang dan waktu serta pengalaman kesejarahan masyarakat tertentu.

Modal sosial memiliki elemen yang menjadikan interaksi antar aktor dan kelompok sosial memiliki ikatan kuat. Elemen-elemen tersebut adalah kepercayaan (trust), Jaringan (network) dan norma (norm). Tingkat interaksi sosial yang tinggi ditentukan oleh tingkat kepercayaan antar kelompok dalam masyarakat. Bila terbentuk sikap saling percaya diantara kelompok maka dengan sendiri kohesi sosial terbentuk.

Kohesi sosial yang tinggi mencerminkan jaringan sosial yang terbentuk sangat kokoh. Ikatan sosial antar kelompok yang kuat tersebut dipayungi oleh norma sosial yang dijunjung tinggi. Norma sosial yang berisi nilai-nilai yang disepakati dan diyakini bisa mentransformasi kehidupan sosial mereka. Kepercayaan, jaringan dan norma adalah sumber daya alami dan informal yang bersumber masyarakat. Alat perekat yang berfungsi untuk merekatkan satu benda dengan benda lainnya.

Secara teoritik, modal sosial dapat diperkuat dengan dukungan negara. Negara memiliki kewajiban untuk memproduksi kebijakan publik yang selaras dengan modal sosial yang dimiliki masyarakat. Syaratnya dengan memberikan ruang pada masyarakat untuk mengekspresikan dirinya secara bebas. Pengungkapan aspirasi jangan dihambat. Singkatnya negara harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi. Keseimbangan antara dinamika publik dengan kekuasaan negara terwujud jika tatanan masyarakat tersebut telah mencapai tipe masyarakat terbuka (open society).

Open society adalah perwujudan aktualisasi kuatnya modal sosial. Open society juga adalah perwujudan ruang interaksi antara kekuatan masyarakat sipil dengan kekuatan negara. Harmonisasi kekuatan sipil dengan otoritas negara mendapatkan wujud idealnya dalam tatanan masyarakat terbuka (open society). Masyarakat terbuka juga dengan sendirinya mampu merespon peluang tingginya eskalasi konflik. Meskipun konflik adalah sesuatu yang tak terhindarkan namun pada masyarakat terbuka (open society) proses resolusi konflik dapat dijalankan secara efektif.